

**PENGEMBANGAN BUDIDAYA  
HORTIKULTURA BERBASIS *LOCAL*  
*ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT*  
(LERD)**

(Studi di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**NOVITA ARIYANI**

**NIM. 125030100111020**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2016**

**PENGEMBANGAN BUDIDAYA  
HORTIKULTURA BERBASIS *LOCAL*  
*ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT*  
(LERD)**

(Studi di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**NOVITA ARIYANI**

**NIM. 125030100111020**



Dosen Pembimbing

1. Dr. Abdullah Said, M.Si
2. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2016**

MOTTO

*“Terkadang dalam Hidup, kita perlu untuk melihat kebawah, untuk melihat seberapa jauh kau melangkah”.*

*-Novita A.*

*“Tidak ada yang tidak mungkin selama kita ada kemauan, gapailah mimpi dengan usaha, penuh ketekunan, dan pantang menyerah.”*

*-Novita A.*



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya,

Teruntuk mereka yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga,

Mendo'akan, menyemangati, dan menginspirasi segala usaha saya dalam menjalani hidup ini,

Mendukung dan menuntun saya menjadi seseorang yang lebih baik.

Terima kasih kepada orang tua saya,

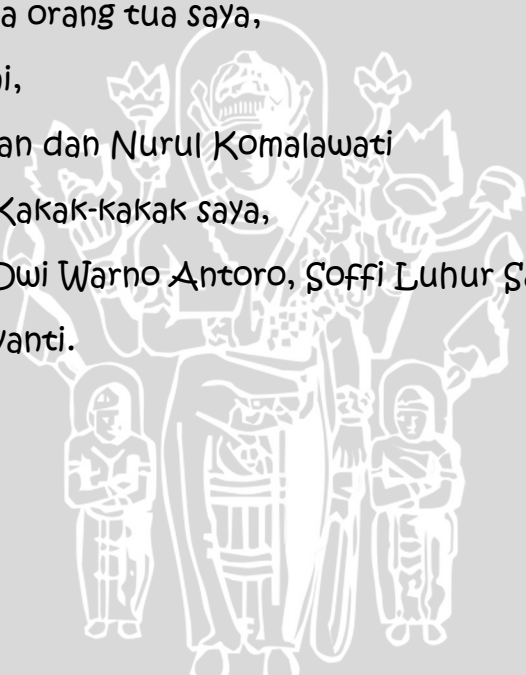
-Sukino dan Sunarni,

-Hari Boedi Setyawan dan Nurul Komalawati

Dan Terima Kasih Kakak-kakak saya,

Rika Fitriyaningsih, Dwi Warno Antoro, Soffi Luhur Santoso dan

Catur Lestari Wijayanti.



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) (Studi di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

Disusun Oleh : Novita Ariyani

NIM : 125030100111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 20 Juni 2016

### Komisi Pembimbing,

**Ketua**



**Dr. Abdullah Said, M.Si**  
NIP. 19570911 198503 1 003

**Anggota**



**Ainul Hayat, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19730713 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 28 Juli 2016  
 Jam : 10.00-11.00  
 Skripsi atas nama : Novita Ariyani  
 Judul : Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) (Studi di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)

**Dan Dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua Komisi Pembimbing,

**Dr. Abdullah Said, M.Si**  
 NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota Komisi Pembimbing,

**Ajul Havat, S.Pd., M.Si**  
 NIP. 19730713 200604 1 001

Penguji I,

**Dr. Bambang Sagfoso H. MS**  
 NIP. 19610204 198601 1 001

Penguji II,

**Nurjati Widodo, S.AP., M.AP**  
 NIP. 2012018301291001



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 29 Juni 2016



Nama : Novita Ariyani

NIM : 125030100111020

## RINGKASAN

Novita Ariyani, 2016. **Pengembangan Budidaya hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development (LERD)* di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep**. Dr. Abdullah Said, M.Si. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. 246 hal + xvi

Pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan budidaya hortikultura merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan daerah sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan budidaya hortikultura ini dilakukan sesuai dengan kondisi potensi dan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola. Kecamatan Rubaru merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Sumenep yang dipilih untuk dilakukan pengembangan budidaya hortikultura karena teridentifikasi sektor potensial dari wilayahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi/upaya yang tepat dalam melakukan pembangunan ekonomi sektor pertanian melalui pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal guna memiliki nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengembangan budidaya hortikultura Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang ditinjau dari perspektif LERD dan menganalisis potensi yang mendukung kegiatan pengembangan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena di lapangan dengan penyajian data yang digunakan sebagai bahan analisis pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Peneliti menggunakan alat analisis *Creswell* untuk mengetahui potensi yang mendukung pengembangan budidaya hortikultura dan pelaksanaan dari kegiatan pengembangan tersebut, dan analisis SWOT untuk merancang usulan strategi alternatif pengembangannya yang berbasis LERD. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang mendukung dari segi keanekaragaman hortikultura, lahan pertanian, tenaga kerja, dan pasar. Namun, pelaksanaan pengembangan tersebut belum memenuhi standar penerapan dari adanya konsep LERD guna meningkatkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Kemudian, pengembangan budidaya hortikultura juga belum dapat dilihat tingkat keberhasilannya, baik dari segi pendapatan petani maupun membuka lapangan kerja. Berdasarkan hasil analisis dari pengembangan budidaya hortikultura sesuai konsep LERD mengidentifikasi bahwa dalam kegiatan pengembangan memerlukan strategi dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian masyarakat lokal. Sehingga, dalam pengembangan budidaya hortikultura memerlukan perhatian pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDM Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep disertai dengan penyusunan kebijakan secara legal yang menjadi acuan dalam pengembangan.

**Kata Kunci : Pengembangan, Hortikultura, LERD, Sumenep**



## SUMMARY

Novita Ariyani, 2016. *Development of Horticultural Cultivation based Local Economic Resources Development (LERD) (Study in Rubaru District of Sumenep Regency)*. Dr. Abdullah Said, M.Si. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si. 246 page + xvi

Economic Development of the region by the development of horticultural cultivation is one of important effort to increasing public welfare. Development of horticultural cultivation depend on the potential dan ability of human resources who have responsibility in management. Rubaru district is one of the districts in Sumenep was chosen to do the cultivation of horticulture because potential sectors of the territory was identified. Therefore, it takes a strategy and appropriate efforts in making economic development of agricultural sector by using optimally the natural resources and human resources in order to significantly additional value for economic growth and regional development. The purpose of this study is to examine the implementation in the cultivation of horticultural crops Rubaru district of Sumenep viewed from the perspective of LERD and to analyze the potential to support the development.

This study used a qualitative approach to describe the phenomenon in the field in which the presentation of the data as anaysis the development of horticultural cultivation crops in the district Rubaru. Researcher used Creswell's data analytical tools to identify potential that supports the cultivation of horticultural crops and the implementation of the development activities, and a SWOT's analysis to design the development proposal of alternative strategies based LERD. The results of this study stated that the cultivation of horticultural crops in the district Rubaru Sumenep regency has potential support in terms of diversity of horticultural, agricultural land, labor, and markets. However, the implementation of the development is not fulfilled standar of the concept LERD to improve the local economy through the utilization of existing resources yet.

Furthermore, The cultivation of horticultural crops are also not seen the level of success, both in terms of farmers income and create jobs. Based on the analysis of the cultivation of horticultural crops according to the concept LERD identified that the development activities need to implenting strategy to increase and stabilize the economy of local communities. Thus in the cultivation of horticultural crops need the attention of the government in the management and utilization of natural resources and human resources of Rubaru District of Sumenep accompanied by legally policy formulation to become the reference in the development.

**Key Words: Development, Horticultural, LERD, Sumenep**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis mendedikasikan penghargaan besar dan terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu bersedia untuk memberikan saran, masukan, dan bimbingan selama proses penyelesaian penulisan skripsi.
4. Bapak Ainul Hayat, S.Pd., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memungkinkan saya untuk menuangkan pemikiran saya dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh narasumber, baik Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kecamatan Rubaru, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep,

kelompok tani dan masyarakat petani di Kecamatan Rubaru yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan.

6. Keluarga besar saya, terutama Bapak Sukino dan Ibu Sunarni, Bapak Boedi Setyawan dan Ibu Nurul Komalawati, yang telah memberikan banyak doa, dukungan, semangat, serta memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi Publik angkatan 2012, khususnya Celine, Kristin, Dedy, Intan, Lingling, Alfiah, Robby, dan Astrid yang begitu unik dan istimewa selama masa perkuliahan.
8. Seluruh sahabat terbaik yang telah menjadi keluarga keduaku, Gana, Vika, Akbar dan Chindy yang selalu menemani dan mengingatkan saya, yang tak henti-hentinya memberikan banyak motivasi, dukungan, dan semangat.
9. Seluruh pihak terkait, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi mereka yang membutuhkan.

Malang, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kontribusi Penelitian .....	15
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Administrasi Pembangunan .....	18
B. Otonomi Daerah .....	21
C. Pembangunan Pertanian.....	24
D. Strategi Pengembangan Pertanian .....	30
1. Definisi Strategi .....	30
2. Strategi Pengembangan Pertanian .....	31
3. Pengembangan Budidaya Hortikultura .....	36
E. Local Economic Development .....	41
1. <i>Local Economic Development (LED)</i> .....	41
2. <i>Local Economic Resources Development (LERD)</i> .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Fokus Penelitian.....	62
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	63
D. Jenis dan Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	66
F. Instrumen Penelitian.....	69
G. Analisis Data.....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	76
1. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep.....	76



2. Gambaran Umum Kecamatan Rubaru .....	85
3. Gambaran Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep.....	92
B. Penyajian Data .....	112
1. Potensi dalam Pengembangan Budidaya Hortikultura di Kecamatan Rubaru.....	112
a. Keanekaragaman Hortikultura .....	112
b. Lahan Pertanian .....	116
c. Teknologi .....	119
d. Tenaga Kerja.....	124
e. Pasar .....	131
2. Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis <i>Local Economic Resources Development</i> (LERD) di Kecamatan Rubaru .....	137
a. Tata Pemerintahan.....	137
b. Proses Manajemen .....	145
c. Kelompok Sasaran .....	163
d. Faktor Lokasi .....	168
e. Kesinergian dan Fokus Kebijakan .....	170
f. Pembangunan Berkelanjutan .....	172
C. Analisis Data Pembahasan .....	174
1. Potensi dalam Pengembangan Budidaya Hortikultura di Kecamatan Rubaru.....	174
a. Keanekaragaman Hortikultura .....	175
b. Lahan Pertanian .....	179
c. Teknologi .....	182
d. Tenaga Kerja.....	186
e. Pasar .....	188
2. Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis <i>Local Economic Resources Development</i> (LERD) di Kecamatan Rubaru .....	191
a. Tata Pemerintahan.....	193
b. Proses Manajemen .....	199
c. Kelompok Sasaran .....	208
d. Faktor Lokasi .....	212
e. Kesinergian dan Fokus Kebijakan .....	218
f. Pembangunan Berkelanjutan .....	220

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>224</b>
A. Kesimpulan .....	224
B. Saran.....	226

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>228</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>231</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Luas Lahan Pertanian di Indonesia 2009-2013 .....	2
2.	Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur .....	4
3.	PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha 2011-2014 .....	5
4.	Data Potensi dan Produktivitas Tahun 2014 Komoditi Hortikultura .....	11
5.	Data Potensi dan Produktivitas Tahun 2014 Komoditi Hortikultura .....	11
6.	Peta Perbandingan Model Strategi Pengembangan (Pertanian) .....	33
7.	Daftar Nama Kecamatan Wilayah Kepulauan .....	77
8.	Daftar Nama Kecamatan Wilayah Daratan .....	78
9.	Nama Sungai, Daerah Irigasi, dan Luas Baku Sawah yang diairi di Kabupaten Sumenep.....	79
10.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumenep .....	83
11.	Luas Wilayah Menurut Desa dan Jenis Tanah 2014 .....	86
12.	Banyaknya Dusun/Lingkungan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa 2014.....	87
13.	Banyaknya Rumah Tangga Menurut Desa dan Lapangan Usaha 2014 .....	88
14.	Luas Lahan Menurut Desa dan Penggunaannya 2014 .....	89
15.	Luas Lahan Sawah Menurut Desa dan Jenis Pengairan.....	90
16.	Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Padi/Palawija 2013 .....	90
17.	Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Sayuran 2013 .....	91
18.	Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Buah-buahan 2013.....	91
19.	Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan 2013 .....	91
20.	Rekapitulasi Tanaman Hortikultura Kecamatan Rubaru 2015 .....	113
21.	Luas Wilayah Menurut Desa dan Jenis Tanah 2014 .....	116
22.	Luas Lahan Pertanian Menurut Desa dan Jenis Lahan 2014.....	117
23.	Alat dan Mesin Pertanian di Kecamatan Rubaru 2013-2015 .....	120
24.	Keadaan Alat dan Mesin Pertanian di Kecamatan Rubaru .....	121
25.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2014.....	125
26.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2019 .....	126
27.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2024.....	127
28.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2029.....	127
29.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2034.....	128
30.	Daftar Kelompok Tani Kecamatan Rubaru 2015 .....	130
31.	Kondisi Subsistem Agribisnis Hulu Kecamatan Rubaru .....	147
32.	Daftar Kios Resmi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Rubaru 2015.....	149
33.	Kondisi Subsistem Agribisnis Hilir Kecamatan Rubaru .....	153
34.	Daftar Produk Hasil Olahan Pertanian Kecamatan Rubaru .....	155
35.	Kondisi Subsistem Agribisnis Usaha Tani Kecamatan Rubaru .....	156

36.	Kondisi Subsistem Agribisnis Usaha Penunjang Kecamatan Rubaru .....	158
37.	Kondisi Subsistem Agribisnis Pemasaran Kecamatan Rubaru .....	162
38.	Kandungan Gizi Tanaman Hortikultura .....	176



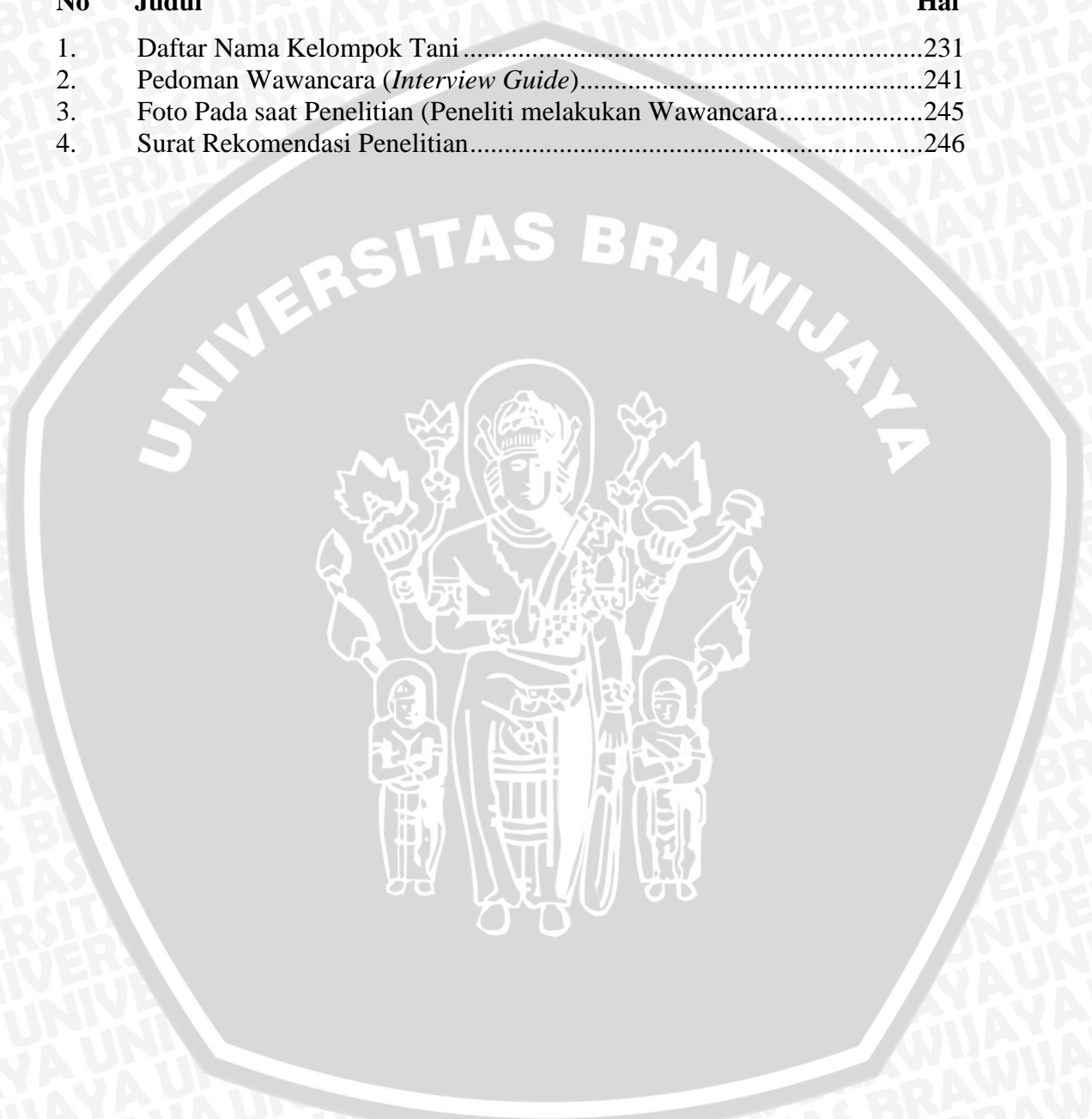
## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Luas Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2009-2013.....	1
2.	Kelembagaan dan Aktor dalam LERD.....	48
3.	Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan/Heksagonal LERD .....	51
4.	Kesinergian dan Fokus Kebijakan.....	53
5.	Segitiga Pembangunan Berkelanjutan.....	54
6.	Skema Langkah-langkah dalam LERD.....	56
7.	Spiral Analisis Data Creswell .....	71
8.	Struktur Lapangan Usaha di Kabupaten Sumenep tahun 2014.....	81
9.	Struktur Ekonomi Kabupaten Sumenep Tahun 2014.....	82
10.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep.....	97
11.	Peta Analisis Komoditi Unggulan.....	114
12.	Alat Pertanian Tradisional yang digunakan Petani di Kecamatan Rubaru.....	120
13.	Grafik Trend Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2009-2013 .....	125
14.	Peta Orientasi Pemasaran Hasil Penelitian.....	133
15.	Keadaan Pasar Banasare di Kecamatan Rubaru.....	134
16.	Kegiatan dalam Pasar .....	134
17.	Peta Analisis Kondisi Prasarana Jalan .....	139
18.	Peta Analisis Sarana Penunjang Pengembangan.....	145
19.	Kebun Bibit Desa, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru.....	148
20.	Hasil Olahan Pertanian Kecamatan Rubaru .....	155
21.	Tempat Penampungan Air Non Permanen untuk Pengairan.....	157
22.	Sarana Kelembagaan Kecamatan Rubaru .....	160
23.	Peta Analisis Struktur Ruang Kawasan.....	169
24.	Matriks Bagan Hasil Penelitian.....	223



DAFTAR LAMPIRAN

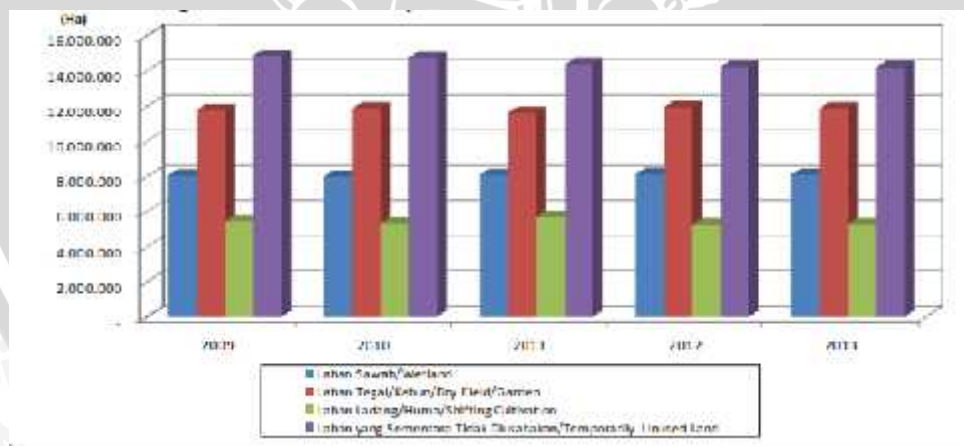
No	Judul	Hal
1.	Daftar Nama Kelompok Tani.....	231
2.	Pedoman Wawancara ( <i>Interview Guide</i> ).....	241
3.	Foto Pada saat Penelitian (Peneliti melakukan Wawancara).....	245
4.	Surat Rekomendasi Penelitian.....	246



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang juga dapat dikatakan sebagai negara agraris. Saat ini, sebutan negara agraris masih dapat ditunjukkan dengan banyaknya potensi lahan pertanian Indonesia yang subur dan hampir sebagian masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Menurut hasil sensus pertanian, telah tercatat jumlah petani di Indonesia menurut jenis kelamin, yaitu sebanyak 24,36 juta orang (76,84%) adalah petani laki-laki dan 7,34 juta orang (23,16%) adalah petani perempuan (Badan Pusat Statistika, 2013). Adapun berikut ini merupakan gambaran luas lahan pertanian di Indonesia.



Gambar 1. Luas Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2009-2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian 2014  
(Kementerian Pertanian)

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian di Indonesia 2009-2013

No	Jenis Lahan	Tahun				
		2009 (ha)	2010 (ha)	2011 (ha)	2012 (ha)	2013 *) (ha)
1	Sawah	8.068.427	8.002.552	8.094.862	8.132.345,91	8.112.103
	a. Sawah Irigasi	4.905.107	4.893.128	4.924.172	4.417.581,92	4.819.525
	b. Sawah Non Irigasi	3.163.220	3.109.424	3.170.690	3.714.763,99	3.292.578
2	Tegal/Kebun	11.782.332	11.887.777	11.626.219	11.947.956	11.876.881
3	Ladang/Huma	5.426.689	5.334.545	5.697.171	5.262.030	5.272.895
4	Lahan yang sementara tidak diusahakan	14.880.526	14.754.249	14.378.586	14.245.408	14.213.815

Catatan: \*) Angka Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistika dalam Sensus Pertanian 2013

Berdasarkan gambar serta tabel diatas, yang menunjukkan bahwa jumlah luas lahan sawah di Indonesia pada tahun 2013 sekitar 8.112.103 ha dapat dijadikan sebagai lahan pertanian yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dan dikelola dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Adanya potensi dari jumlah luas lahan pertanian yang dimanfaatkan juga dapat dimanfaatkan dengan tepat agar dapat berkontribusi kepada negara maupun masyarakat, baik dari segi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi sangat penting bagi Indonesia agar dapat membantu mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan mengembangkan sektor tersebut menjadi lebih baik.

Pertanian merupakan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan oleh manusia yang dapat menunjang dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari (menyediakan bahan pangan) maupun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat terutama para petani dan daerah yang memiliki potensi sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah usaha rumah tangga

pertanian di Indonesia sub sektor tanaman pangan sekitar 17.728.185 rumah tangga, sub sektor Hortikultura sekitar 10.602.147 rumah tangga, sub sektor perkebunan 12.770.090 rumah tangga, sub sektor peternakan 12.969.210 rumah tangga, sub sektor perikanan 1.975.233 rumah tangga, dan sub sektor kehutanan 6.782.885 rumah tangga (Badan Pusat Statistika dalam Sensus Pertanian 2013). Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 tersebut menunjukkan bahwa pertanian dapat dikatakan sebagai pilar pembangunan nasional di Indonesia yang dapat mensejahterahkan masyarakat melalui pengembangan pertanian.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang relatif memiliki luas lahan pertanian terluas di Indonesia dengan luas lahan sawah sekitar 1.102.863 ha (BPS, 2013). Luas lahan di provinsi Jawa Timur menandakan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar dari sektor pertanian yang dapat dikembangkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kebijakan yang ada. Sesuai dengan hasil sensus pertanian pada tahun 2013, Provinsi Jawa Timur merupakan pemasok kebutuhan pangan nasional terbesar dengan cakupan sub sektor pertanian meliputi seluruh subsektor (termasuk jasa pertanian), yaitu tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), tanaman perkebunan, peternakan, budidaya dan penangkapan ikan, tanaman kehutanan, perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar, dan pemungutan hasil hutan (bappeda.jatimprov.go.id).

Wilayah Jawa Timur terbagi menjadi beberapa wilayah pembangunan yang masing-masing mempunyai karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda, baik potensi sumberdaya manusia, sumber daya alam, serta infrastruktur fisik dan

kelembagaan penunjang pembangunan. Terdapat 11 kabupaten yang hampir seluruh subsektor hasil pertaniannya dapat didistribusikan, yaitu Jember, Malang, Banyuwangi, Kediri, Pasuruan, Blitar, Sumenep, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Probolinggo ([bappeda.jatimprov.go.id](http://bappeda.jatimprov.go.id)). Salah satu kabupaten yang menarik perhatian peneliti adalah Kabupaten Sumenep karena kabupaten Sumenep memiliki luas lahan sawah yang paling rendah diantara 11 kabupaten yang telah dijelaskan sebelumnya, namun tetap bisa menjadi kabupaten yang selalu menjadi pemasok (kontributor) hasil pertanian terbesar di provinsi Jawa Timur. Hal ini didukung dengan adanya data luas lahan sawah dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten	2011 (ha)	2012 (ha)	2013*) (ha)
1	Blitar	31.108	25.273,5	31.111
2	Kediri	40.951	38.928,83	41.229
3	Malang	43.812	45.523,93	39.820
4	Jember	79.643	69.341,91	74.592
5	Banyuwangi	61.752	50.336,64	59.819
6	Probolinggo	36.131	48.784,57	36.376
7	Pasuruan	39.641	37.008,27	40.189
8	Bojonegoro	75.659	77.390,76	78.683
9	Tuban	55.103	52.814,69	55.443
10	Lamongan	83.144	84.734,66	84.237
11	Sumenep	24.312	20.649,69	24.477

Catatan: \*) angka Sementara

(Sumber: Badan Pusat Statistika dalam Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2014)

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur dan menjadi salah satu kabupaten di Pulau Madura yang dinilai memiliki potensi pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya

kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep. Berikut merupakan gambaran mengenai kontribusi sektor-sektor menurut lapangan usaha di Kabupaten Sumenep yang disajikan dalam tabel, yaitu.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014

No	Lapangan Usaha (Sektor)	Tahun			
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,78	36,13	32,71	33,30
2	Pertambangan dan Penggalian	26,75	28,11	35,42	34,99
3	Industri Pengolahan	4,95	4,69	4,19	4,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,05	0,05	0,04	0,04
6	Konstruksi	6,42	6,32	5,52	5,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	10,10	9,05	8,88
8	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,86	0,77	0,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Mimium	0,58	0,56	0,50	0,50
10	Informasi dan Komunikasi	4,08	4,09	3,67	3,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	1,58	1,48	1,51
12	Real Estate	0,91	0,87	0,78	0,76
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,17	0,16	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	3,52	3,34	2,89	2,72
15	Jasa Pendidikan	2,13	2,18	2,00	2,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,30	0,30	0,27	0,28
17	Jasa Lainnya	0,68	0,62	0,54	0,54
	<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Sumenep dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep terlihat memiliki angka yang paling tinggi diantara sektor tanpa migas lainnya walaupun mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya. Sektor pertanian di Kabupaten Sumenep dinilai merupakan sektor dominan dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah maupun ekonomi lokal dari daerah tersebut. Penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Sumenep seluas 74% dari total luas wilayah (209.347 Ha), sedangkan 26% sisanya merupakan lahan bukan sawah (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, 2014). Selain itu, Kabupaten Sumenep juga memiliki jumlah penduduk tertinggi dari kabupaten lainnya khusus di Pulau Madura sekitar 1.1061,2, serta memiliki indeks pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan mencapai angka 6,53% (Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumenep, 2015). Jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep tersebut akan menimbulkan kebutuhan pangan ikut meningkat. Hal ini akan memaksa produktivitas pertanian supaya dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal. Kedua alasan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan pertanian di Kabupaten Sumenep.

Dalam *master plan* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep 2013-2033, kawasan strategis yang tepat untuk pengembangan pertanian, yaitu terletak pada Kecamatan Rubaru. Kecamatan Rubaru dinilai memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi serta dapat dijadikan kawasan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari Ibu Hr yang mengatakan bahwa:

“Kecamatan Rubaru memang merupakan kecamatan yang pertaniannya bagus dan memiliki hasil pertanian yang banyak baik dari sektor tanaman

pangan maupun Hortikultura. Kecamatan Rubaru ini memiliki sektor unggulan terutama pada komoditas hortikultura, seperti bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit dengan bawang merah menjadi varietas Kecamatan Rubaru.” (Hasil wawancara pada hari Kamis, 22 Oktober 2015 pukul 09.35 WIB, di Kantor Bappeda Sumenep)

Adanya sektor unggulan hortikultura pada pertanian Kecamatan Rubaru dan dijadikannya bawang merah sebagai varietas Kecamatan Rubaru, membutuhkan adanya tindakan dalam pengembangan produktivitas supaya dapat mensejahterakan masyarakat lokal dan mendorong serta menarik perhatian ekspansi bisnis. Adapun hortikultura merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura). Berdasarkan yang telah dijelaskan, hortikultura dibagi menjadi empat kelompok, yaitu buah-buahan, sayuran, obat-obatan, dan tanaman hias. Di Kecamatan Rubaru, terdapat tanaman hias (melati), buah-buahan (mangga, pisang, pepaya), obat-obatan (jahe, kencur, kunyit, lengkuas, temulawak), dan sayuran (bawang merah, cabe besar, cabe rawit, kacang panjang, ketimun) yang dinilai menjadi sektor unggulan (Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, 2011).

Selain itu, bawang merah yang merupakan varietas dari Kecamatan Rubaru dikarenakan bawang merah merupakan hasil pertanian yang paling unggul dengan memiliki kekhasan bawang merah tersendiri dari segi rasa dan aroma yang membedakan dengan bawang merah lainnya. Sehingga, untuk mengembangkan sektor unggulan pertanian Kecamatan Rubaru tidak hanya bawang merah, melainkan hortikultura yang lain dapat dikembangkan dengan cara budidaya



pertanian atau budidaya tanaman. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, sistem budidaya tanaman merupakan sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Budidaya tanaman perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh. Selain itu, dalam budidaya tanaman diperlukan peran masyarakat, pemerintah, LSM maupun pelaku usaha dengan memanfaatkan teknologi serta sumber daya alam nabati agar dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam tahap pengembangan budidaya tanaman khususnya Hortikultura ini, pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan strategi pengembangan agar dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik pada produksi hortikultura di Kecamatan Rubaru. Strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk Kecamatan Rubaru, yaitu

- (a) Memperbaiki infrastruktur atau fasilitas di Kecamatan Rubaru, seperti perbaikan jalan sebagai prasarana agar dapat menunjang keberlangsungan pengembangan di sektor pertanian,
- (b) Meningkatkan kapasitas SDM, baik itu masyarakat (petani) maupun aparatur dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan pertanian, seperti pemberdayaan masyarakat petani (penyuluhan/ sosialisasi terkait kegiatan pertanian),
- (c) Pengoptimalan area lahan pertanian maupun perkebunan,
- (d) Menetapkan komoditi tanaman sesuai potensi dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, serta aspek sosial ekonomi,
- (d) Memfasilitasi para petani dengan menyubsidi pupuk, memberikan alat-alat pertanian (seperti: kultivator), memberikan benih yang baik dan tepat (seperti: kedondong).

*(Hasil Wawancara dengan Bapak "To" pada hari Senin, 26 Oktober 2015 pukul 09.58 WIB, di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan).*

Tindakan pemerintah dengan strategi tersebut juga diakui oleh Bapak Sy selaku ketua kelompok tani “Sumber Anyar” yang menyatakan bahwa telah dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat petani di Kecamatan Rubaru sejak tahun 2012. Namun, pada pemberian pupuk kepada petani yang diwakilkan perkelompok tani di setiap desa tidak bisa mendapatkan secara bersamaan, melainkan mendapatkan subsidi pupuk secara bergilir atau bergantian. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan pun mendapat kritikan dari kelompok tani karena pada saat proses penyelenggaraan maupun sesudah tidak ada pengawasan. Berdasarkan hal tersebut proses penyelenggaraan strategi dalam pengembangan budidaya hortikultura dapat dinyatakan masih belum optimal.

Hal lain dalam proses penyelenggaraan strategi pengembangan budidaya hortikultura dapat dinilai berjalan dengan baik, yaitu ditunjukkan dari kinerja UPT Pertanian Kecamatan Rubaru dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam budidaya pertanian yang bertindak sebagai pelaksana teknis dalam hal membantu serta menyampaikan cara-cara bertani sebagai upaya dalam budidaya tanaman dengan langkah langsung berinteraksi dengan para petani. UPT Pertanian Kecamatan Rubaru dan PPL membantu cara bertani yang baik, seperti dalam hal menggunakan dan memilih bibit/benih yang baik, proses penanaman, memperkenalkan dan mengatasi apabila terdapat penyakit tanaman maupun hama, pemanfaatan air, kadar dalam pemberian pupuk, pemeliharaan tanaman, ataupun proses bertani dari panen hingga pasca panen. Terdapat juga klinik agribisnis yang dibangun oleh sekelompok masyarakat atau bisa dikatakan sebagai Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) pertanian untuk mendukung pengembangan pertanian seperti dalam pengembangan budidaya tanaman pangan maupun Hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Tindakan pemerintah terutama UPT Pertanian Kecamatan Rubaru dan PPL dalam hal budidaya tanaman ini, dapat membantu petani dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya nabati (pertanian) yang dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak “Sy” yang mengatakan bahwa:

“UPT Pertanian Kecamatan Rubaru dan PPL, serta klinik Agribisnis yang jika dihubungi para petani karena ada masalah, mereka siap membantu dan kadangkala langsung datang walaupun itu hari minggu (bukan hari kerja). Sehingga, petani khususnya di Kecamatan Rubaru yang dulunya dianggap hanya biasa saja, sekarang petani disini bisa dianggap luar biasa karena dapat mengetahui bagaimana cara menanggulangi penyakit tanaman maupun hama-hama yang dapat merusak hasil pertanian, seperti lalat buah yang biasanya menyerang cabe. Cabe yang dulunya yang semula jika dalam 1 ha hanya mendapat puluhan kg (maksimal 100kg), sekarang kita mendapat ratusan kg perminggunya dari hasil pertanian kita. Kemudian bawang merah, pertahunnya kita dapat memproduksi ratusan ton, ketimun setiap hari dapat mengirim ke Surabaya dan Jakarta tidak kurang dari 30 ton, kacang panjang dan terong setiap hari tidak kurang dari 2 ton..”  
*(hasil wawancara pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 pukul 09.15 WIB, di kediaman Bapak Sy)*

Hal tersebut didukung dengan adanya data produktivitas sektor unggulan komoditi Hortikultura di Kecamatan Rubaru yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi ini juga tidak lain dapat meningkatkan pendapatan dari petani. Selain itu, juga dapat memenuhi kebutuhan akan hasil pertanian komoditi hortikultura baik didalam wilayah Sumenep maupun sampai memasok hasil pertanian tersebut keluar daerah Kabupaten Sumenep. Berikut ini merupakan data potensi dan produktivitas komoditi Hortikultura Kecamatan Rubaru, yaitu:

Tabel 4. Data Potensi dan Produktivitas Tahun 2014 Komoditi Hortikultura

No	Desa	Bawang Merah		Cabe Besar		Cabe Rawit	
		Luas Tanam (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Luas Tanam (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)	Luas Tanam (Ha)	Produktivitas (Kwt/Ha)
1	Basoka	36	80	3	149	22	52
2	Mandala	33	80	3	148	19	53
3	Karangnangka	31	80	4	147	17	54
4	Pakondang	17	81	3	149	21	54
5	Matanair	9	80	6	151	41	56
6	Tambaksari	8	78	7	150	37	59
7	Bana Sare	7	77	6	149	42	58
8	Bunbarat	12	80	4	150	31	56
9	Kalebengan	11	79	3	149	23	54
10	Rubaru	13	78	4	148	21	56
11	Duko	11	79	2	147	19	55
<b>JUMLAH</b>		<b>188</b>		<b>45</b>		<b>293</b>	

Sumber: UPT. Pertanian Kec. Rubaru Kab. Sumenep, 2014

Kemudian, terdapat juga data komoditi Hortikultura yang lain di Kecamatan Rubaru yang produktivitasnya tak kalah dengan sektor unggulan dari Kecamatan Rubaru tersebut. Adapun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Data Potensi dan Produktivitas Tahun 2014 Komoditi Hortikultura

No	Desa	Kacang Panjang		Terong		Ketimun	
		Luas Tanam (Ha)	Produktivitas Kwt/Ha	Luas Tanam (Ha)	Produktivitas Kwt/Ha	Luas Tanam (Ha)	Produktivitas Kwt/Ha
1	Basoka	5	119	2,5	186	3	152
2	Mandala	4	116	2	185	2	151
3	Karangnangka	5	114	2	186	2	151
4	Pakondang	9	114	3	187	3	150
5	Matanair	12	120	5	191	6	154
6	Tambaksari	13	119	6	192	5	153
7	Bana Sare	11	120	6	191	6	154
8	Bunbarat	9	118	3	189	3	152
9	Kalebengan	5	119	2	187	2	151
10	Rubaru	6	118	2	189	2	152
11	Duko	4	117	2	187	2	151
<b>JUMLAH</b>		<b>83</b>		<b>35,5</b>		<b>36</b>	

Sumber: UPT. Pertanian Kec. Rubaru Kab. Sumenep, 2014

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah produktivitas hortikultura memang sangat baik. Perkembangan dalam budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru membuat para petani yang tergabung dalam kelompok tani diharapkan dapat

mewujudkan tujuan dari adanya pengembangan budidaya hortikultura. Selain itu, pemerintah yang mendukung kelompok tani dalam budidaya hortikultura ini menimbulkan rasa percaya diri pada petani untuk meningkatkan kualitas hidup atau memperbaiki perekonomian dengan melakukan tindakan yang inovatif berupa pengolahan hasil pertanian. Seperti yang telah diketahui bahwa tanaman hortikultura maupun tanaman pangan bersifat tahunan dan musiman yang hanya pada saat atau musim tertentu suatu tanaman bisa ditanam dan menghasilkan produksi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan pendapatan petani menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, perlunya pengembangan budidaya hortikultura sampai menjadi olahan yang selain dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, juga dapat menguntungkan masyarakat khususnya petani di Kecamatan Rubaru.

Seperti halnya varietas bawang merah yang sudah diakui dengan adanya SK Gubernur No.050/2004/202.2/2011 – tgl. 4 Mei 2011 mendukung untuk lebih bisa memasarkan olahan produk unggulan bawang merah. Salah satu kelompok tani yang berperan dalam mengolah bawang merah, yaitu kelompok wanita tani (KWT) “Melati” yang mengolah bawang merah menjadi bawang goreng. Namun, menurut Bapak “Sy” yang berpendapat bahwa dalam memasarkan hasil olahan pertanian masih belum maksimal. Hal tersebut didukung dengan adanya hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“baik dalam bentuk hasil pertanian maupun sudah diolah dalam hal pemasaran produk unggulan bawang merah dalam daerah masih belum punya tempat dihati masyarakat. Jika masyarakat disini ditanya ini bawang merah dari mana? Kebanyakan masyarakat tidak peduli walaupun itu hasil dari kekayaan tanah di daerah sendiri. Terdapat juga, orang yang menjawab dari Sumenep yang membuktikan masyarakat dalam daerah ini sendiri tidak mengetahui bahwa Rubaru memiliki produk unggulan bawang merah yang khas daripada bawang merah lainnya. Selain itu olahan bawang merah

menjadi bawang goreng dalam bentuk kemasan masih belum berkembang dalam penjualannya.”

(Hasil wawancara pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 pukul 09.15 WIB, di rumah bapak Sy)

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat permasalahan pada pengembangan budidaya tanaman ini, yaitu penyelenggaraan strategi pemerintah yang masih belum optimal dan kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan potensi pertanian sub sektor hortikultura ini, baik dari segi pemasaran maupun pemanfaatan hasil hortikultura yang lain untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Padahal, sejauh ini proses budidaya pertanian mengalami perkembangan dengan ditunjukkannya produktivitas hortikultura yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kurangnya pengoptimalan dalam budidaya hortikultura ini menjadi suatu kerugian yang nyata bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kendala ini dapat diperbaiki dengan adanya pencapaian tujuan pengembangan yang selaras dengan konsep *local economic resources development* (LERD). Konsep LERD menurut Said dalam Ilham (2015), yaitu adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah.

Pengembangan pertanian di Kecamatan Rubaru seyogyanya dapat dibangun dengan konsep LERD agar dapat membangun perekonomian masyarakat setempat. Hal ini agar dapat mencapai tujuan dari adanya LERD, yaitu untuk membangun ekonomi lokal dan kualitas hidup para pelaku ekonominya, yangmana dalam prosesnya dibutuhkan adanya kerjasama dari masyarakat, para

pelaku usaha, dan LSM bekerjasama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK ITB, 2009). Namun, kelompok tani di Kecamatan Rubaru dan pemerintah daerah masih belum memaksimalkan hasil budidaya hortikultura, selain bawang merah. Oleh karena itu, pengembangan dari hasil budidaya hortikultura memiliki kelemahan dalam membangun ekonomi lokal menjadi lebih baik sesuai dari perspektif LERD tersebut.

Adapun berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi atau upaya pemerintah daerah dalam pengembangan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya lahan seoptimal mungkin dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya modal (peralatan) yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas pertanian, serta memanfaatkan hasil pertanian tersebut untuk pertumbuhan ekonomi lokal bagi daerah Kabupaten Sumenep melalui pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru ditinjau dari konsep LERD. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan judul **“Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) (Studi di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potensi dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimanakah pengembangan budidaya hortikultura berbasis *local economic resources development* (LERD) di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis potensi dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengembangan budidaya hortikultura berbasis *local economic resources development* (LERD) di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

### D. Kontribusi Penelitian

Adapun perumusan penerapan konsep LERD dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dalam studi administrasi publik, sehingga nantinya dapat memperkaya kajian ilmiah pada penelitian lebih lanjut tentang pengembangan yang berkaitan dengan konsep rencana pengelolaan potensi pengembangan budidaya pertanian dimasa yang akan datang.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi Pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menambah wawasan yang lebih teknis mengenai bagaimana model pengelolaan potensi yang ada dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya, serta dapat mempermudah kerja *stakeholder* dalam menawarkan dan menjalin hubungan kerjasama untuk melakukan pemanfaatan potensi yang ada di daerah ini.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui secara jelas dari masing-masing per bab. Dalam kajian penerapan konsep LERD dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, disusun dengan urutan sebagai berikut.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah dengan permasalahan yang diangkat, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kontribusi penelitian secara akademis dan praktis, serta sistematika pembahasan yang berisi tentang perincian setiap bab dalam penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang landasan teori yang disesuaikan dengan teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan mengenai judul yang diangkat, kemudian secara garis besar di kelompokkan sesuai dengan hasil studi kepustakaan dari beberapa literatur.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, termasuk di kemukakan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pada objek penelitian yang befokus pada penerapan konsep LERD dalam pengembangan budidaya hortikultura, yaitu menerangkan penyajian data secara rinci sesuai dengan keperluan pembahasan yang dibatasi oleh fokus penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta rekomendasi berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan studi yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Pembangunan

Secara konseptual, administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok (Zauhar, 1996:6). Administrasi dapat membantu masyarakat karena tujuan konsep administrasi muncul akibat adanya kebutuhan manusia untuk saling bekerja sama atau membuat kelompok sehingga dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Administrasi yang semata-mata untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan merupakan administrasi publik. Menurut Zauhar (1996:33), “administrasi publik merupakan proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik atau dengan rumusan spesifik seperti melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan.”

Masyarakat senantiasa mengharapkan agar administrasi publik dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang dibutuhkan. Hal tersebut memaksa pejabat-pejabat publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena kegiatan dalam administrasi publik harus diprioritaskan dan sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku (Islamy, 2003:36). Salah satu metode yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu memenuhi dari aspek administrasi pembangunan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Administrasi pembangunan lahir karena berkembangnya peran administrasi publik yang merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan

pembangunan, baik dibidang sosial, politik, maupun ekonomi. Administrasi pembangunan menurut Siagian (2014:4) meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan yang dapat diartikan;

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-bulding*).

“Administrasi pembangunan pada hakekatnya adalah administrasi negara yang mendukung usaha-usaha pembangunan” (Islamy, 2003:42). Administrasi pembangunan menunjuk pada usaha yang sudah diprogram atau direncanakan secara sistematis dalam melaksanakan kegiatan program/proyek terkait pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan dengan menuju keadaan yang lebih baik. Kartasmita (1996:9) berpendapat bahwa administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Selain itu, terdapat juga pernyataan lain mengenai administrasi pembangunan, yaitu:

“Administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna menemukan sasaran-sasaran pembangunan mereka” (Riggs, 1994).

Berdasarkan konsep administrasi pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, arti dari “administrasi pembangunan” sebenarnya dikaitkan dengan

implikasinya yang didalamnya mengenai peningkatan kemampuan administratif. Hal tersebut dimaksudkan jika terdapat program pembangunan yang berhasil dilaksanakan dengan metode atau cara-cara tertentu sesuai dengan kebijakan/landasan hukum, maka dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat politik, termasuk perubahan kemampuan masyarakat dalam bidang administrasi. Dengan kata lain, administrasi pembangunan diharapkan dapat terlaksana agar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan perubahan sosial.

Tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekaligus perubahan sosial dapat dicapai melalui konsep administrasi pembangunan (Siagian, 1983: 4) yang diartikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam memperbaiki tata kehidupan bangsa, pemerintah tidak dapat melepas peranannya. Seperti adanya otonomi daerah yang membantu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain dapat membangun daerah secara mandiri, otonomi daerah ini juga bermanfaat dalam pembangunan daerah secara optimal dan meringankan beban pemerintah pusat yang harus mengatur bangsa ini tanpa dapat memahami apa yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dalam administrasi pembangunan ini adanya otonomi daerah dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan peranannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan yaitu suatu usaha yang dilakukan pemerintah (negara) bersama

masyarakat secara terencana untuk melakukan perubahan dengan keputusan yang diambil terhadap kondisi kehidupan supaya menjadi lebih baik dengan potensi yang dimiliki dan berjalan dengan adanya otonomi daerah.

## B. Otonomi Daerah

Indonesia telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. “Dalam interpretasi ekonomi, desentralisasi merupakan medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui pilihan publik” (Muluk, 2006). Menurut Hossein dalam Muluk (2006), desentralisasi mencakup dua elemen pokok, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom tersebut. Daerah otonom muncul karena adanya pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom disebut otonomi daerah.

Desentralisasi dapat membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat karena adanya konsep desentralisasi mampu meningkatkan kebebasan, persamaan, dan kesejahteraan (Muluk, 2006). Manfaat *local government* dengan adanya konsep desentralisasi, yaitu:

- a. Adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual dalam menikmati pelayanan publik.
- b. Local government memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik.
- c. Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik.

Berdasarkan hal tersebut dapat diungkapkan bahwa dengan adanya desentralisasi yang memunculkan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai

dengan aspirasi masyarakat dan kondisi daerah tersebut dapat mewujudkan tujuan dalam mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, usaha dalam mewujudkan tujuan pengembangan pertanian harus sejalan dengan era otonomi daerah, yaitu pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonomi yang mempunyai kewajiban menjaga dengan kebijakan yang dibuat dan memfasilitasi sektor pengembangan agar kondisi yang diinginkan dapat tumbuh dan berkembang. Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagaan, penduniaan) dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional (*sijori*) perubahan pola atau sistem informasi global (Widjaja, 2014). Pelaksanaan otonomi daerah saat ini dilaksanakan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menitikberatkan pada daerah yang berhak menetapkan kebijakan daerah, seperti: dalam mengelola daerah masing-masing melalui penyelenggaraan pemerintahan dan menentukan kebijakan pembangunan demi mensejahterakan masyarakat daerah yang terkait.

Selanjutnya Widjaja (2004) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah. Adapun tujuan otonomi daerah adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Berdasarkan asumsi tersebut maka

diharapkan pemerintah daerah mampu melayani dan mengurus kepentingan masyarakat dengan kewenangan yang diberi, seperti mengatur dan mengembangkan sumber daya daerah secara mandiri, baik itu dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Sehingga, dengan adanya kemandirian tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan.

Adanya otonomi daerah menimbulkan peran pemerintah menjadi unsur pendorong dari pembangunan. Menurut Djamin dalam Islamy (2003), peran pemerintah diklarifikasikan sebagai berikut.

- a. Fungsi pengaturan : pemerintah berperan menentukan kebijakan pembangunan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan dan pengawasan.
- b. Fungsi pemilikan : pemerintah memiliki sendiri usaha-usaha pembangunan ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c. Fungsi Penyelenggaraan : pemerintah menyelenggarakan sendiri semua kegiatan ekonomi atau sosial

Pendorong pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek industri, pariwisata, pertanian, pertambangan, perdagangan dan sebagainya sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. Salah satu sektor yang sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian dianggap penting karena peranan sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam penyediaan lapangan kerja, penyedia pangan, penyumbang devisa negara melalui ekspor. Sehingga, adanya otonomi daerah dapat membantu konsep administrasi pembangunan untuk dibangun dan dikembangkan, seperti dari pertanian yang merupakan aspek utama sebagai pijakan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan perekonomian.



### C. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pada dasarnya selalu mengarah pada perubahan menjadi lebih baik. Menurut Suryono (2010:119), “pembangunan dianggap sebagai sebuah gerakan yang mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisir, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Pembangunan juga dapat diartikan sama dengan pengembangan karena pengembangan juga akan mendorong laju pembangunan, sehingga posisi pengembangan dan pembangunan itu seimbang. Hal ini didukung dengan penjelasan menurut Soemarno (2004) bahwa pengembangan merupakan upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat dari standar hidupnya sangat rendah pada kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Definisi tersebut membuktikan bahwa pembangunan dan pengembangan memiliki arti yang sama.

Pembangunan dunia ketiga termasuk negara Indonesia selalu diawali dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat dengan jalan melakukan peningkatan pendapatan negara (Hanani, Ibrahim, dan Purnomo, 2003). Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris (negara dengan basis perekonomian agraris), sehingga pembangunan pertanian di Indonesia merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Potensi sumberdaya yang sangat besar dan sangat penting bagi Indonesia juga mendukung adanya pembangunan pertanian. Pertanian sering kita lihat sebagai suatu kegiatan usahatani yang memanfaatkan sumber daya alam

(SDA) yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan kebutuhan pangan manusia. Hadisapoetro dalam Yuwono dkk (2011) berpendapat bahwa pertanian merupakan setiap campur tangan tenaga manusia dalam perkembangan tanam-tanaman maupun hewan agar diperoleh manfaat yang lebih baik daripada tanpa campur tangan tenaga manusia. Pertanian dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Pertanian dalam arti sempit meliputi tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan. Sedangkan, dalam arti luas meliputi selain pertanian dalam arti sempit, yaitu perikanan, peternakan, dan kehutanan. Selanjutnya, pertanian merupakan satu-satunya industri besar yang berfungsi ekonomi dan sekaligus berfungsi sosial yang dapat menjadi faktor pembangunan daerah khususnya pedesaan, karena hanya pertanian yang merupakan kegiatan ekonomi besar dan luas yang berpangkalan di pedesaan (Febrianto, 2013).

Sektor pertanian di Indonesia memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Peran strategis yang dipaparkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. 19/Permentan/HK.140/4/2015 sebelumnya harus memerhatikan potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan yang berfungsi menjawab tantangan pembangunan pertanian. Adapun potensi dalam pembangunan pertanian, yaitu:

(a) Keanekaragaman hayati dan agroekosistem

Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amphibi, dan 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Potensi sumberhayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70

jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar, dan 55 jenis tanaman rempah.

(b) Lahan pertanian,

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup>. Luasan daerah yang memiliki ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian yang terdiri dari 70, 59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.

(c) Teknologi

Teknologi pertanian Indonesia berkembang dengan pesat dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Teknologi yang digunakan dalam industri pertanian modern di Indonesia guna mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Teknologi yang digunakan, yaitu berupa pengelolaan sumberdaya air dengan menggunakan teknologi pertanian spesifik lokasi seperti teknologi panen air, teknologi pemanfaatan air secara efisiensi melalui irigasi tetes, jaringan irigasi tingkat desa (JIDES), dan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT). Selain itu, terdapat juga berbagai protipe alat dan mesin pertanian, teknologi pascapanen, teknologi budidaya, teknologi pemasaran, dan teknologi pengolahan hasil pertanian, serta teknologi informasi yang dapat mendukung dalam pembangunan pertanian.

(d) Tenaga kerja

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumahtangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

(e) Pasar

Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. (*Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019*)

Potensi pertanian yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan dan direncanakan dengan baik untuk dapat membangun pertanian yang ada di Indonesia, baik dari segi mengatasi permasalahan maupun tantangan yang dihadapi. Untuk melaksanakan rencana strategis tersebut, sektor pertanian berupaya untuk terus memperbaiki kinerja

pembangunannya untuk memenuhi visi pertanian di abad 21 ini, yaitu mewujudkan pertanian modern, tangguh dan efisien. Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pertanian, khususnya memberdayakan petani, peternak dan nelayan, agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri (Solahuddin, 1999).

“Pembangunan pertanian dapat juga dikatakan sebagai pembangunan ekonomi di sektor pertanian, karena pertanian merupakan salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi dan pengertian pertanian sendiri mengandung tekanan unsur ekonomi” (Yuwono dkk, 2011). Hadisapoetra dalam Yuwono dkk (2011) mengemukakan bahwa pembangunan pertanian menghasilkan perubahan-perubahan dalam: (1) susunan kekuatan dalam masyarakat, (2) produksi, produktivitas, dan pendapatan, (3) alat-alat dan bahan produksi, (4) tujuan ekonomi dari subsisten ke komersial, dan (5) corak sosial dan tertutup ke arah terbuka. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pembangunan pertanian bertujuan pada perubahan pertanian yang dapat mensejahterahkan masyarakat, baik masyarakat pertanian maupun masyarakat pada umumnya yang dapat diukur dari segi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, tradisi makan dan gizi, kesehatan, dan sebagainya.

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Adapun tujuan pembangunan pertanian, yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan
- b. Meningkatkan ketahanan pangan nasional
- c. Menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor

- d. Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien dibidang agribisnis
- e. Meningkatkan kemandirian petani-nelayan dan pemberdayaan kelembagaan serta prasarana pertanian (Solahuddin,1999).

Tujuan tersebut timbul karena adanya alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pertanian di Indonesia. Menurut Hanani dkk (2003) terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu (1) potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, (4) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, (5) perannya dalam penyediaan pangan masyarakat, (6) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Sehingga, dalam mewujudkan pembangunan pertanian, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu (1) pemanfaatan sumber daya tanpa merusak lingkungan, (2) pemanfaatan teknologi yang senantiasa berubah, (3) pemanfaatan institusi (kelembagaan) yang saling menguntungkan, dan (4) pemanfaatan budaya untuk keberhasilan pembangunan pertanian (Soekartawi, 1995).

Menurut Mosher (1987), faktor utama atau syarat pokok dalam mensukseskan pembangunan pertanian, yaitu (a) adanya pasar atau pemasaran hasil pertanian, (b) adanya teknologi yang selalu berubah, (c) adanya sarana produksi lokal, (d) adanya insentif produksi bagi petani, (e) adanya transportasi yang memadai. Syarat-syarat pokok tersebut dapat membantu dalam mencapai pembangunan pertanian didukung dengan adanya faktor-faktor yang mempercepat tujuan pembangunan pertanian itu sendiri. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempercepat atau melancarkan pembangunan pertanian menurut Mosher (1987), yaitu: (a) pendidikan pembangunan, (b) kredit produksi, (c)

kegiatan bersama oleh petani, (d) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, (d) perencanaan nasional pembangunan nasional. Dalam pembangunan pertanian juga harus memperhatikan kondisi wilayah baik dari segi karakteristik maupun potensi sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang didukung dengan infrastruktur fisik dan kelembagaan penunjang pembangunan.

Pertanian di Indonesia sebenarnya tidak hanya terdiri atas sub sektor pangan, tetapi juga terdapat sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan yang perlu menjadi sasaran dalam pembangunan pertanian untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sehingga, pembangunan yang pada mulanya hanya terfokus pada pertanian sub sektor tanaman pangan yang menimbulkan kesenjangan pada pertanian sub sektor lainnya dapat ditangani dengan tindakan pemerintah melalui penetapan visi pembangunan pertanian yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik (Hanani dkk, 2003).

Selain itu, untuk mewujudkan pembangunan pertanian akan didukung dengan adanya budidaya tanaman yang mempertimbangkan permintaan pasar, berkonsentrasi pada komoditas yang berdaya saing tinggi, mampu memenuhi fungsi sebagai komoditas ekonomi dan sosial, mampu memaksimalkan sumber daya alam terutama lahan, berwawasan lingkungan serta mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya untuk mewujudkan pembangunan pertanian sebagai pembangunan nasional. Sehingga, pembangunan atau pengembangan

pertanian salah satunya pada sub sektor hortikultura penting untuk dibudidayakan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

#### **D. Strategi Pengembangan Pertanian**

##### **1. Definisi Strategi**

Terdapat banyak pengertian tentang strategi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Strategi merupakan suatu hal yang seringkali dijadikan bahan pembicaraan bagi suatu organisasi. Menurut Suryono (2010:114), “pengertian strategi pada prinsipnya berkait dengan persoalan: (a) Kebijakan pelaksanaan, (b) Penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan (c) Penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut”. Dalam mengimplementasikan suatu strategi, pelaksana harus memiliki indikator strategi seperti yang telah disebutkan terlebih dahulu agar dapat melaksanakan secara maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Sedangkan menurut Kusdi (2009:87), “pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut”. Kedua pengertian tersebut sama-sama menjelaskan tentang indikator dalam melaksanakan suatu strategi sehingga dapat dikatakan bahwa strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dibarengi dengan cara bertahap sehingga terbentuklah metode untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki melalui penggunaan sarana dan sumber daya yang ada.

Pengertian strategi juga termuat dalam *Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged* (1966, p. 256) dalam Zauhar (2012) menyatakan bahwa strategi adalah:

- a. *the science and art of employing the political, economic, psychological, and military forces of a nations or groups of nations to afford the maximum support to adopted policies in peace or war,*
- b. *the science and art of military command exercise to meet the enemy in combat under advantageous conditions,*
- c. *a careful plan or method or a clever stratagen,*
- d. *the art of devising or employing plans or stratagen toward a goal.*

Staregi yang dapat diartikan sebagai (a) ilmu dan seni menggunakan kekuatan politik, ekonomi, psikologis, dan militer dari negara-negara atau kelompok negara untuk membayar dukungan maksimal dengan kebijakan yang diterapkan dalam damai atau perang, (b) ilmu dan seni latihan komando militer untuk memenuhi musuh dalam pertempuran di bawah kondisi yang menguntungkan, (c) rencana-hati atau metode atau siasat pintar, (d) seni merancang atau menggunakan rencana atau strategi mencapai tujuan. Demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan dengan langkah/cara khusus agar mendapatkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Strategi Pengembangan Pertanian**

Upaya dalam mengembangkan pertanian membutuhkan strategi yang dapat membantu memahami tantangan yang akan dihadapi menuju pencapaian tujuan. Menurut Solahuddin (1999), wujud pertanian dan pengembangan pertanian agar dapat mewujudkan visi dan misi pertanian akan dicapai melalui pengembangan pertanian dengan strategi:



- (a) optimalisasi pemanfaatan sumber daya domestik meliputi lahan, air plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi;
- (b) perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumber daya, produksi, dan konsumsi melalui diversifikasi pertanian;
- (c) penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi dan tepat guna;
- (d) peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berdaya saing tinggi.

Strategi yang dikemukakan dapat memperlancar proses pengembangan pertanian dengan mengadakan pilihan-pilihan sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung dan kemampuan yang tersedia di lokasi pertanian yang ingin dikembangkan.

Korten dan Alfonso (1981) yang dikutip oleh Suryono (2010), menjelaskan empat model strategi pengembangan pertanian (*agriculture development strategy model*) antara lain:

- a. Strategi pertumbuhan (*growth strategy*)  
Berusaha mencapai kenaikan yang cepat dalam nilai tambah ekonomi hasil petanian dengan menyalurkan sumber daya dan sumber dana kepada petani-petani yang paling responsif terhadap stimuli sumber daya dan sumber dan tersebut.
- b. Strategi kesejahteraan (*welfare strategy*)  
Bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat banyak, baik melalui sektor pertanian maupun melalui sektor-sektor lainnya.
- c. Strategi jawaban (*respons strategy*)  
Merupakan jalan keluar terhadap kelemahan welfare strategi yang dianggap bahwa masyarakat itu bodoh dan perlunya intervensi pemerintah atasan dalam program-program pembangunan masyarakat (*top down oriented*).
- d. Strategi menyeluruh (*holistic strategy*)  
Memiliki tujuan yang bervariasi dan bersifat kompleks dengan sasaran pokok menciptakan keadilan (*equity*), pemerataan (*distribution*), dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Berbagai pilihan strategi diatas, juga bisa dilihat dari sajian tabel berikut ini.

Tabel 6. Peta Perbandingan Model Strategi Pengembangan (Pertanian)

ASPEK	STRATEGI			
	<i>Growth</i>	<i>Welfare</i>	<i>Response</i>	<i>Holistic</i>
<b>Tujuan</b>	Kenaikan produksi yang tinggi	Kesejahteraan masyarakat	Masyarakat menentukan nasibnya sendiri	Campuran equity, kesejahteraan dan partisipasi
<b>Cara /Metode</b>	Memelihara investasi dan saving	Pelayanan masyarakat semaksimal mungkin	Pemerintah mendukung inisiatif masyarakat	Menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai mitra pembangunan pemerintah
<b>Orientasi Peranan</b>	Wiraswasta, pengusaha, buruh	Peranan masyarakat pasif	Tergantung inisiatif masyarakat	Pemerintah dan masyarakat bekerjasama
<b>Asumsi Dasar</b>	Pertumbuhan produksi akan berdampak <i>trickle down</i>	Tenaga ahli dari pemerintah pusat melayani kebutuhan masyarakat ( <i>top down</i> )	Pemerintah pusat hanya mendorong inisiatif masyarakat dan dilaksanakan sendiri	Kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien
<b>Struktur Birokrasi</b>	Sentralisasi birokrasi dominan	Peranan pengusaha lebih dominan daripada birokrasi	Bantuan birokrasi sentralisasi diperlukan untuk mendorong organisasi sosial	Koordinasi vertikal dan horizontal secara profesional
<b>Koordinasi</b>	Melalui sentralisasi birokrasi dan mekanisme pasar	Melalui sentralisasi	Bersifat internal dalam hubungan antar masyarakat itu sendiri	Banyak tahap hermanen, koordinatif, dan mekanisasi
<b>Arus Komunikasi</b>	Timbal balik pemerintah dan pengusaha melalui mekanisme pasar	Top down dan periodik dari pemerintah	Personal communication	Jaringan komunikasi formal, informal, dan nonformal
<b>Wilayah Inisiatif dan Pengawasan</b>	Pengusaha industri pertanian	Lembaga pusat perencanaan	Organisasi informal dalam masyarakat	Kombinasi pemerintah dan masyarakat
<b>Indikator Keberhasilan</b>	Produk pertanian meningkat, pengusaha untung, devisa meningkat	Terselurnya barang dan jasa pada masyarakat	Partisipasi masyarakat meningkat, pembangunan bermanfaat, masyarakat puas	Pertumbuhan yang merata, kepuasan partisipasi masyarakat meningkat

Sumber: Suryono (2010)

Strategi dalam pengembangan pertanian bisa diterapkan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam hal pengembangan pertanian. Strategi dalam pengembangan pertanian tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, sekaligus langkah-langkah yang perlu dilakukan dari masing-masing aspek yang ada dalam strategi. Pemaparan strategi pengembangan pertanian yang disajikan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa cara, tujuan, peran, serta aktor yang berbeda-beda untuk mencapai keberhasilan menjawab tantangan dalam mencapai pembangunan pertanian yang ideal (sesuai dengan keinginan). Hal ini merupakan suatu pilihan strategi dalam membangun pertanian sesuai dengan keinginan atau tujuan pemerintah yang ingin dicapai yang dilihat dari segi kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Dalam pengembangan pertanian yang ingin dilakukan sebaiknya terlebih dahulu memerhatikan kelestarian lingkungan, dukungan kelembagaan agribisnis, teknologi strategis berbasis lokal, pendayagunaan dan perlindungan sumberdaya hayati, sistem informasi pertanian yang tangguh, faktor penunjang keberhasilan pengembangan pertanian agar dapat melaksanakan strategi dengan tepat pada daerah strategis pengembangan pertanian (Hanani, 2003). Sehingga, dengan adanya faktor-faktor yang harus terlebih diperhatikan maka pelaksanaan strategi pengembangan pertanian dapat dilakukan. Seperti yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 yang ingin mewujudkan tujuan dan sasaran dalam mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia, terdapat 7 (tujuh) strategi utama dalam mengembangkan pertanian, yaitu adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan,
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian,
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit,
4. Penguatan kelembagaan petani,
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian,
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Selain tujuh strategi utama tersebut, terdapat 9 (sembilan) strategi pendukung sebagai berikut.

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,
2. Peningkatan dukungan perkarantina,
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi,
4. Pelayanan informasi publik,
5. Pengelolaan regulasi,
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi,
7. Pengelolaan perencanaan,
8. Penataan dan penguatan organisasi, dan
9. Pengelolaan sistem pengawasan.

Strategi-strategi tersebut dilaksanakan dalam mengembangkan pertanian yang disesuaikan dengan kondisi pengembangan pertanian yang selama ini dilakukan di daerah-daerah di Indonesia. Strategi tersebut bertujuan dalam membantu pengembangan pertanian menjadi lebih baik dengan melakukan perbaikan terhadap keadaan sebelumnya dengan upaya-upaya yang direncanakan, sekaligus mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan mengenai strategi pengembangan pertanian tersebut, maka untuk mencapai pengembangan pertanian yang diharapkan dapat dilakukan dengan upaya pengembangan yang utuh dan menyeluruh pada semua aspek yang didalamnya terkait dengan pertanian. Strategi pengembangan pertanian yang tepat dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, yaitu sesuai dengan renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, baik itu tujuh strategi utama

maupun sembilan strategi pendukung yang dinilai sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan dan sasaran yang baru dan perumusan langsung dari pemerintah. Seperti pada kecamatan Rubaru yang ingin membangun pertanian menjadi lebih baik dengan pengembangan budidaya tanaman sub sektor hortikultura yang dinilai terdapat potensi yang menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan melakukan perannya dengan baik agar dapat mencapai tujuan dari adanya pengembangan pertanian ini.

### 3. Pengembangan Budidaya Hortikultura

Pengembangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah suatu kondisi menjadi lebih baik, baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya maupun politik. Pengembangan juga akan mendorong laju pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pengembangan budidaya, baik melalui komoditas unggulan maupun komplementer, diidentifikasi menurut *volume* fisik yang jelas. Garis besar kegiatan tersebut, meliputi persiapan lahan dan petani, pelatihan usaha tani, penyediaan agroinput, alat pertanian, dan penyelenggaraan penyuluhan, terutama dilaksanakan melalui proyek yang ada di kabupaten terpilih (Soemarno, 2004).

Pengembangan budidaya pertanian dilakukan, apabila populasi manusia semakin berkembang dengan laju yang cukup tinggi, kebutuhan pangan pun harus dipenuhi. Pada awalnya manusia melakukan budidaya pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan diri-sendiri, namun berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan terhadap barang-barang lain yang tidak dapat dipenuhinya sendiri,

kemudian berkembangnya sistem pertukaran barang antar individu atau kelompok orang (Yuwono dkk, 2011). Berdasarkan hal ini menimbulkan adanya kegiatan berdagang yang membutuhkan produktivitas yang tinggi terhadap hasil pertanian dengan budidaya pertanian.

Menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman yang menjelaskan bahwa sistem budidaya tanaman merupakan sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sistem budidaya tanaman yang diatur dalam UU No.12 Tahun 1992 bertujuan untuk:

- (a) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- (b) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- (c) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Adapun pembinaan teknis budidaya, cara memanen dan cara mempertahankan kualitas produk, perlakuan pasca panen, dilaksanakan oleh bagian proyek yang berada pada Dinas teknis terkait pengembangan yang dilakukan. Pemerintah daerah berperan dalam budidaya tanaman, yaitu mulai dari perencanaan budidaya tanaman, penyelenggaraan budidaya tanaman, sarana produksi, mengatur tata ruang dan tata guna dalam budidaya tanaman, Pengusahaan hasil budidaya tanaman, pembinaan dan melibatkan peranserta masyarakat (UU No.12 Tahun 1992).

Hasil pertanian di Indonesia subsektor hortikultura penting untuk dibudidayakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hortikultura dapat

diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika (UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura). Menurut Hanani (2003), komoditas hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar didalam negeri dan pasar internasional yang terus meningkat. Secara sederhana, fungsi utama hortikultura dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Fungsi penyediaan pangan, yakni terutama sekali dalam kaitannya dengan penyediaan vitamin, mineral, serat, dan senyawa lain untuk pemenuhan gizi.
- b. Fungsi ekonomi, yakni pada umumnya komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi petani, pedagang, kalangan industri, dan lain-lain.
- c. Fungsi kesehatan, yakni ditunjukkan oleh manfaat komoditas biofarmaka untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit tidak menular.
- d. Fungsi sosial budaya, yakni ditunjukkan oleh peran komoditas hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan atau kenyamanan lingkungan, serta peranannya dalam berbagai upacara, kepariwisataan, dan lain-lain (Zulkarnain, 2010).

Dalam pengembangan budidaya hortikultura dibutuhkan sumberdaya utama yang penting, yaitu berupa lahan pertanian, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang merupakan faktor pemicu pertumbuhan baik dibidang yang berkenaan dengan produksi, penanganan pasca panen maupun pemasaran dalam rangkah meningkatkan nilai tambah (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2012). Iptek tersebut dapat membantu dalam mengupayakan budidaya tanaman produk

hortikultura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (ekspor). Seperti pernyataan Hanani dkk (2003) bahwa upaya tersebut memerlukan usaha peningkatan produksi hortikultura yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas melalui penguasaan Iptek, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Peningkatan produksi hortikultura dapat menggunakan Iptek yang memang memiliki tujuan sebagai motor penggerak untuk mendorong produktivitas dan efisiensi guna menghasilkan kemajuan hortikultura (Dirjen, 2012). Teknologi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan diversifikasi produk, meliputi: (i) teknologi biologis (benih, varietas, karakteristik produk) yang sesuai dengan permintaan pasar, (ii) teknologi pengolahan di sektor hilir untuk berbagai skala usaha, (iii) teknologi pengepakan, kemasan, dan distribusi, serta penyimpanan untuk menjamin produk tetap dalam kondisi segar ke konsumen akhir, dan (iv) teknologi informasi untuk pemasaran dan distribusinya (Dirjen, 2012).

Penekanan pembangunan hortikultura dimaksudkan untuk: (a) memperbaiki mutu konsumsi gizi masyarakat dan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, (b) mengantisipasi fluktuasi harga produk hortikultura yang tajam, (c) mengurangi impor dan meningkatkan ekspor nonmigas dari sektor pertanian (hortikultura) untuk menambah devisa negara, (d) memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa; dan (e) mendukung berkembangnya agrowisata



dan agroindustri (Soekartawi, 1995). Namun, pembangunan hortikultura ini juga harus memperhatikan langkah yang harus dilakukan. Menurut Dirjen (2012), dalam pembangunan hortikultura memiliki langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Pembinaan politik pertanian, yaitu berupa reformasi agraria, pengaturan kembali hak penguasaan tanah agar tidak terjadi kesenjangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah serta menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis hortikultura di pedesaan.
- b. Membuka peluang dan mendorong petani untuk melakukan budidaya produk-produk unggulan.

Selain itu, dalam pengembangan hortikultura harus melakukan pendekatan secara utuh dari hulu sampai hilir, yaitu berupa pembangunan usahatani/kebun berskala komersial dengan mempertimbangkan skala ekonomi yang didukung oleh penyediaan bibit yang berkualitas/bermutu, serta sarana dan prasana seperti pengairan, pengolahan, teknologi pasca panen, penyimpanan, pemasaran dan transportasi. Pendekatan tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah dan kualitas produksi hortikultura agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan permintaan pasar. Seperti pada kecamatan Rubaru, kecamatan Rubaru dipilih sebagai wilayah dalam pengembangan budidaya hortikultura. Hortikultura di kecamatan Rubaru pada dasarnya adalah sebuah potensi yang dapat dikembangkan dengan budidaya disertai penggunaan strategi agar dapat mencapai tujuan dari adanya pengembangan budidaya hortikultura ini. Kemudian, pengembangan pertanian salah satunya dengan cara pengembangan budidaya hortikultura dapat dilakukan dengan strategi yang dapat

mensejahterakan masyarakat yang diharapkan selaras dengan konsep *Local Economic Resources Development* yang diterapkan dalam pengembangan budidaya tanaman sub sektor hortikultura pada kecamatan Rubaru yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya yang ada.

#### **E. *Local Economic Resources Development (LERD)***

Menurut Said dalam Ilham (2015), konsep LERD atau pembangunan sumberdaya ekonomi lokal merupakan sebuah teori yang lahir dari perkembangan teori LED karena:

1. Pengembangan Sumberdaya ekonomi lokal (LERD) secara nasional merupakan urgensi/kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh daerah maju maupun relatif tertinggal.
2. Sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dan otonomi daerah sehingga tidak memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan ekonomi setiap daerah secara terpusat.

Berikut merupakan penjelasan mengenai LED dan LERD, yaitu:

##### **1. *Local Economic Development (LED)***

Pembangunan ekonomi berbasis lokal merupakan pergeseran mendasar dalam aktor serta kegiatan terkait pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berbasis lokal dapat dinyatakan sebagai Konsep *Local Economic Development* (LED). Konsep LED sebenarnya adalah alternatif baru dari konsep pembangunan *top-down* dan *bottom-up* yang beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh struktur kelembagaan di wilayah tersebut: industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, dan pengusaha lokal (Bappenas, 2008).

Menurut Febrian (2014), LED merupakan suatu proses dimana pemerintah lokal dan atau kelompok didasarkan komunitas mengelola sumberdaya yang ada dan masuk ke dalam susunan kerjasama (kemitraan) dengan sektor swasta atau dengan diantaranya mereka untuk menciptakan pekerjaan baru, merangsang kegiatan ekonomi di zona ekonomi yang didefinisikan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan adanya pendapat yang dijelaskan oleh Blakely (1989:78) bahwa terdapat dua syarat utama yang harus diamati dalam proses pembangunan ekonomi lokal, yaitu pertama, proses harus dimulai oleh penyelenggara atau kelompok lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau setidaknya koordinasi pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi. Kedua, daerah pembangunan ekonomi atau zona perhatian harus ditentukan terlebih dahulu.

Kemudian, dalam pelaksanaan LED menurut Nastiti (2010:5) perlu berpedoman pada indikator yang sering digunakan dalam pengembangan ekonomi lokal, yaitu pada peningkatan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan kerja lokal dan penyerapan komoditas lokal yang bertujuan pada suatu pencapaian untuk meningkatkan jumlah dan keanekaragaman kesempatan kerja yang disediakan untuk masyarakat setempat. Langkah perencanaan pertama organisasi atau instansi dalam pembangunan ekonomi lokal harus terlebih dahulu menentukan peran dalam proses pembangunan yang dilakukan. Pada dasarnya menurut Blakely and Ted (2003) terdapat 4 (empat) program tindakan terbuka untuk organisasi atau instansi dalam mengambil inisiatif pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, yaitu bertindak sebagai *entrepreneur*, *coordinator*, *fasilitator*,

dan *stimulator*. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 4 tindakan dalam pembangunan ekonomi, yaitu.

### 1. *Entrepreneur*

Dalam peran ini, organisasi mengambil tanggung jawab penuh dari operasi bisnis perusahaan. Organisasi pemerintah atau masyarakat lokal dapat memutuskan untuk mengoperasikan perusahaan komersial sendiri. Tanah atau bangunan mungkin berada dalam kontrol pemerintah daerah untuk alasan konservasi atau lingkungan atau untuk rencana pembangunan masa depan dan dibuat untuk tujuan ekonomi. Pemerintah daerah mungkin ingin mempertahankan tanah komersial dan bangunan atau menyerahkan sumber daya ini untuk kelompok masyarakat setempat.

### 2. *Coordinator*

Pemerintah daerah atau kelompok berbasis masyarakat dapat dibentuk sebagai badan koordinasi untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi untuk pengembangan daerah. Karena layanan yang diberikan oleh kedua pemerintah, baik pusat maupun daerah dan kelompok berbasis masyarakat, serta bisnis memiliki dampak kepada kelompok masyarakat, semakin berusaha untuk memberikan beberapa kepemimpinan dalam perencanaan dan koordinasi pelayanan dalam wilayah mereka. Peran ini untuk pembangunan ekonomi yang melibatkan kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi ekonomi (tingkat pekerjaan, tenaga kerja, pengangguran).

### 3. *Facilitator*

Beberapa kelompok masyarakat dan/ atau pemerintah daerah telah memutuskan dapat meningkatkan pembangunan di daerah masyarakat yang memiliki potensi. Hal ini mungkin melibatkan dalam pelurusan proses pembangunan dan prosedur perencanaan yang lebih baik dan peraturan zonasi.

### 4. *Stimulator*

Kelompok masyarakat dan pemerintah daerah, keduanya dalam posisi untuk merangsang penciptaan bisnis atau ekspansi dengan mengambil tindakan tertentu yang mendorong perusahaan untuk datang ke wilayah pembangunan.

Selain itu, Blakely dalam Supriyadi (2007:109) juga berasumsi bahwa dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- a. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha.
- b. Perluasan kesempatan kerja bagi si miskin untuk meningkatkan pendapatan.
- c. Keberdayaan usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
- d. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat lokal.

Pada dasarnya proses sumber daya yang ada dan kelompok berbasis masyarakat baik itu pemerintah atau kelompok berbasis masyarakat dalam pengelolaannya juga dapat menggunakan model kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi di zona ekonomi secara lebih baik. Berdasarkan asumsi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi lokal merupakan sebuah

pendekatan jangka panjang untuk pembangunan kapasitas masyarakat yang akan membantu pemerintah untuk reorientasi diri dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah tertentu dengan lebih menitikberatkan pada kerjasama dalam membangun perekonomian daerah dengan potensi yang ada.

## **2. Local Economic Resources Development (LERD)**

Local Economic Resources Development (LERD) merupakan suatu konsep atau program yang dapat diartikan menjadi pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. “Konsep dasar LERD adalah sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi sumber daya alam, posisi geografis, kelembagaan publik, kewiraswastaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi dan lain-lain” (Bappenas, 2008). Said (2012) menjelaskan bahwa LERD lebih menitikberatkan pada usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah. Sumberdaya yang dimaksud adalah meliputi sumberdaya alam (Natural resources), dan Sumberdaya manusia (Human resources). Sumber daya alam merupakan komponen-komponen dari unit lahan yang penggunaan secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal yang dengan keadaan ekologi tertentu akan menghasilkan produksi tertentu (FAO, 1995). Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud dalam pengertian diatas meliputi kewirausahaan, tenaga kerja dan sumber daya institusi (HIS, 2006).

Menurut Rachmawati (2010), pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada sumberdaya lokal atau setempat

sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha (kecil dan menengah utamanya) karena lebih mengandalkan pada bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga dipandang tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Kemudian, pengembangan sumberdaya ekonomi lokal sebenarnya juga merupakan upaya kolektif dan sistematis dalam rangka mengembangkan perekonomian suatu wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat berbasis sumber daya lokal yang dinilai unggul melalui pemberdayaan masyarakat (Nirwansyah, 2012: 1-4). Secara umum program pengembangan sumberdaya ekonomi lokal berbasis pertanian dikelompokkan dalam 5 (lima) program pendekatan, yaitu:

1. Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produksi,
2. Program pengembangan agrobisnis dan agroindustri,
3. Program peningkatan kesejahteraan petani,
4. Program penguatan dukungan penelitian dan pengembangan, dan
5. Program penguatan kelembagaan pendukung, organisasi, dan manajemen pengembangan (Bappeda Kota Batu, 2007).

Adapun tujuan dari program LERD adalah untuk membangun kapasitas ekonomi lokal dan kualitas hidup para pelaku ekonominya, selain itu, program ini juga menempuh suatu proses dimana masyarakat, para pelaku usaha, dan LSM bekerjasama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK ITB, 2009).

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal menaruh perhatian pada pengembangan kelembagaan baru berbasis lokal yang mampu menggerakkan masyarakat kedalam *marketplace* dan lebih menempatkan kelompok masyarakat dibanding individual pada pusat sistem ekonomi dan mampu menciptakan tenaga

kerja (Blakely, 1990 dalam Rachmawati, 2010). Pengembangan ekonomi lokal juga lebih spesifiknya dalam Blakely (1989) menjelaskan bagaimana merumuskan proses pembangunan wilayah dengan melibatkan institusi pemerintah dan swasta, pengembangan industri alternatif, peningkatan keterampilan dan inovasi tenaga kerja lokal, mentransfer ilmu pengetahuan dan keahlian dan identifikasi pasar-pasar baru. Berdasarkan penjelasan mengenai LERD, Bappenas (2008) memberikan kesimpulan bahwa LERD adalah sebagai berikut.

- a. Pada sisi *demand*, LERD berupaya meningkatkan jumlah dan variasi lapangan kerja,
- b. Pada sisi *supply*, LERD berupaya memberikan kemampuan dan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal terhadap sumber-sumber ekonomi.

Dalam pelaksanaan konsep LERD terdapat berbagai pihak berupa lembaga formal, non formal, maupun individu yang terlibat. Menurut Blakely (1989) yang mengatakan bahwa upaya pengembangan ekonomi lokal perlu adanya ketegasan/komitmen dari pemerintah daerah dan juga masyarakat lokal yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki kerjasama dengan pihak swasta/pelaku usaha ataupun dengan pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas pembangunan ditingkat daerah. Kelompok ataupun pihak yang berkaitan dengan konsep LERD juga dijelaskan oleh Said (2012) yang menjelaskan bahwa aktor/kelembagaan merupakan aktor/kelembagaan yang mengkoordinir semua kegiatan dalam usaha



pengembangan sumber-sumber potensi ekonomi daerah. Berikut merupakan gambaran mengenai kelembagaan dan aktor dalam konsep LERD.



Gambar 2. Kelembagaan dan aktor dalam LERD  
Sumber: Said (2012)

Berdasarkan gambar diatas, Said (2012) menjabarkan berdasarkan analisis konsep LERD, aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan aktor utama dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Peran Pemerintah Daerah sesuai dengan konsep LERD yaitu bertugas mengkoordinir pembuatan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengembangan sumberdaya ekonomi daerah di tingkat daerah, berperan aktif dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan sumberdaya manusia serta mengkoordinir pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah.

## 2. Pelaku usaha lokal dan pelaku usaha baru

Pelaku usaha lokal merupakan salah satu aktor yang memiliki peran dalam melakukan usaha pengelolaan sumberdaya alam yang ada di daerah. Pengelolaan yang dilakukan sebagai suatu upaya dalam meningkatkan nilai jual sumberdaya yang ada ataupun mendistribusikan sumberdaya alam yang ada pada luar wilayah sentra produksi. Sedangkan pelaku usaha baru adalah pelaku usaha yang bergabung dalam pengembangan sumberdaya ekonomi lokal dengan menciptakan inovasi usaha untuk mendukung proses pengembangan yang telah berlangsung. Kedua pelaku usaha tersebut sama-sama memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya dan mendukung dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

## 3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah baik secara mandiri maupun hasil kemitraan dengan pihak lain yang ditujukan untuk mengkoordinir pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah.

## 4. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan salah satu aktor utama dalam proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Peran dari masyarakat lokal, yaitu mengkoordinir proses sumber daya alam diperoleh, distribusi, pengelolaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang ada, sekaligus sebagai kontrol atas pelaksanaan pengelolaan dengan bekerjasama dengan aktor lainnya.

#### 5. Koperasi

Koperasi merupakan aktor yang berperan dalam mengkoordinir urusan sumberdaya pada sektor tertentu yang ada di kawasan khusus. Urusan yang dimaksud adalah urusan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya modal, serta sumberdaya pendukung lainnya.

#### 6. Lembaga Keuangan di Daerah

Lembaga keuangan yang ada di daerah memiliki peran dalam menyediakan sumberdaya modal dalam menunjang proses pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Lembaga keuangan ini dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau yang berasal dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta.

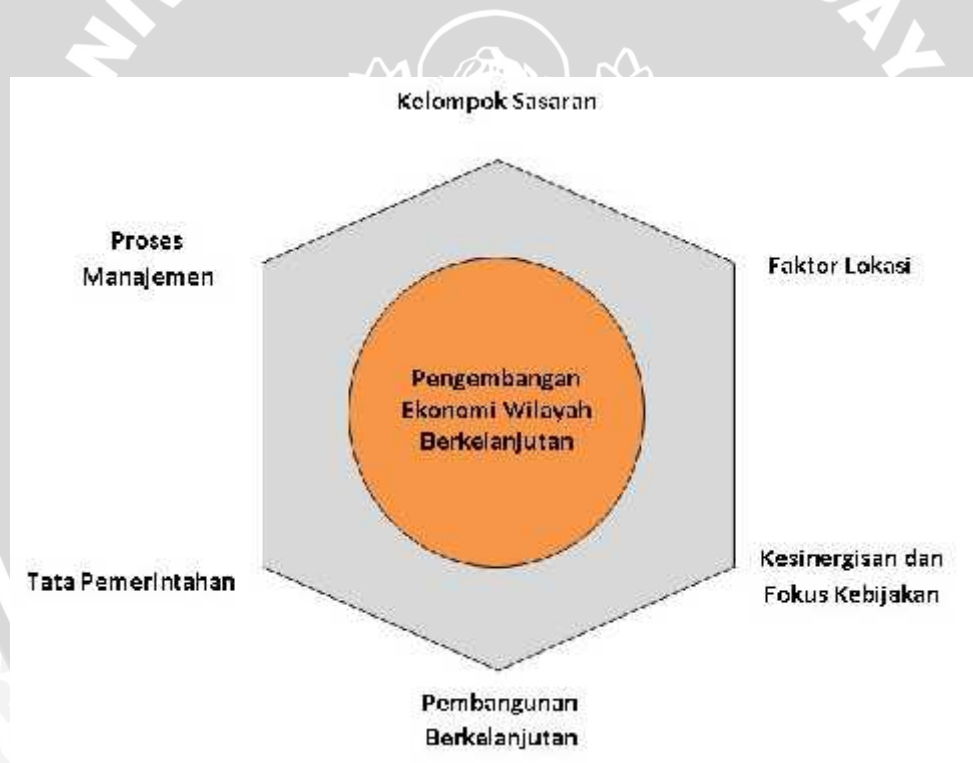
#### 7. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan aktor pendukung yang berperan memberikan evaluasi dan kontribusi akademis terhadap proses pengembangan, serta memberikan aksi langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya baik secara sukarela maupun dari hasil kerjasama.

Para aktor dalam menangani segala urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep LERD akan menjadi kapasitas dan peluang dalam menjalin kerjasama atau koordinasi antar aktor untuk mewujudkan peningkatan kapasitas aktor dalam pelaksanaan LERD tersebut. Konsep kelembagaan dan aktor dalam LERD dapat dijadikan sebagai indikator partisipasi *stakeholders*, yaitu aktor yang berperan dalam pengembangan budidaya hortikultura dan memperbaiki konsep strategi

daerah dalam mengembangkan pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Rubaru.

Kemudian, Said (2012) juga membahas mengenai *logical framework* (*logframe*) yang jelas dalam proses pengembangan sumber daya/potensi ekonomi lokal. Pada pelaksanaan proses LERD tersebut, *logframe* yang merupakan suatu pendekatan perencanaan yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas digambarkan dalam bentuk heksagonal LERD, yaitu sebagai berikut.



Gambar 3. Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan/Heksagonal LERD  
Sumber: Said (2012)

### 1. Tata Pemerintahan (Pemerintah Daerah)

Pemerintah daerah merupakan salah satu aktor penting dalam konsep LERD. Dalam konsep LERD, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembangunan, seperti sebagai pelaksana konsep LERD, aktif dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengkoordinir pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah, dan menyesuaikan dengan regulasi/kebijakan yang tepat sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

### 2. Proses Manajemen

Proses manajemen merupakan usaha yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menunjang dalam pencapaian tujuan secara sistematis. Dalam manajemen terdapat input, proses, dan output yang ketiga langkah tersebut memiliki fokus masing-masing yang harus dipahami oleh semua aktor yang bersangkutan dalam konsep LERD.

### 3. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran merupakan obyek kebijakan. Namun, tidak semua kelompok sasaran harus menerima posisi sebagai objek, ada saat tertentu dimana kelompok sasaran juga berperan sebagai subyek sebuah kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu kesuksesan LERD, karena kelompok ini menjadi pelaksana akhir dari program atau kebijakan yang ada bersama dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Kelompok sasaran harus memiliki pola komunikasi yang baik dengan pemerintah agar program yang dibuat kemudian proses pelaksanaan hingga evaluasi dapat

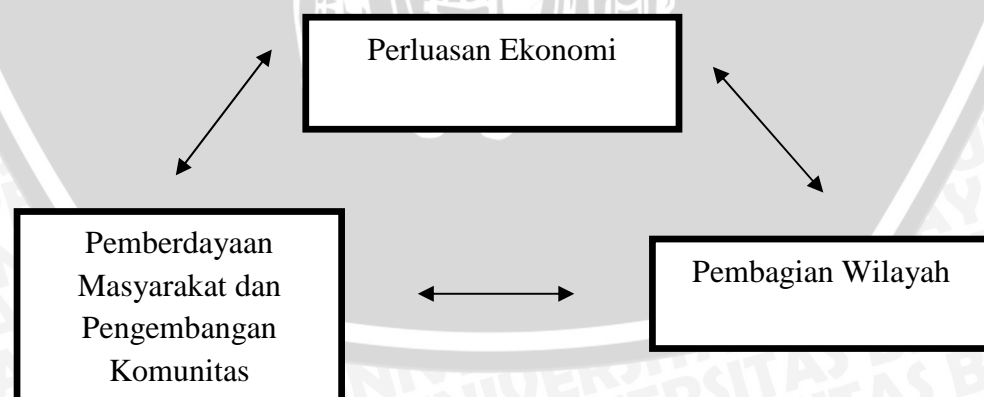
dikoordinasikan dengan baik sehingga setiap kali muncul permasalahan akan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.

#### 4. Faktor Lokasi

Faktor lokasi dibedakan menjadi 3, yakni:

- a. Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, infrastruktur pendukung pengelolaan SDA, potensi SDA yang menjadi komoditi ekonomi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja terampil, jumlah lembaga keuangan lokal.
- b. Faktor lokasi tidak terukur untuk dunia usaha yakni peluang kerjasama dan lembaga penelitian.
- c. Faktor lokasi tidak terukur individual meliputi kualitas pemukiman, lingkungan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum, etos kerja SDM.

#### 5. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan

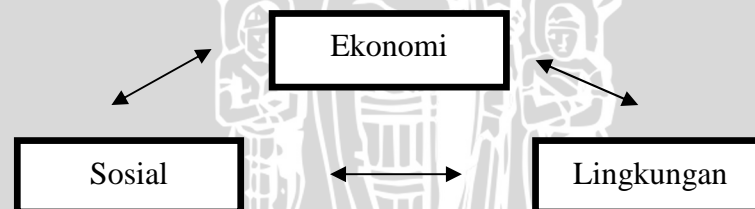


Gambar 4. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan  
Sumber: Said (2012)

Keterkaitan dan fokus kebijakan melibatkan 3 unsur, yakni:

- a. Perluasan ekonomi, yakni meliputi kebijakan investasi, promosi persaingan usaha, peran perusahaan daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, dan pengembangan keahlian.
- b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas, meliputi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan swasta dan kebijakan pengurangan kemiskinan.
- c. Pembangunan wilayah, meliputi kebijakan kawasan industri, pusat pertumbuhan, pengembangan ekonomi, kerjasama antar daerah, tata ruang LERD, jaringan usaha antar sentra dan sistem industri berkelanjutan.

#### 6. Pembangunan berkelanjutan



Gambar 5. Segitiga Pembangunan Berkelanjutan  
Sumber: Said (2012)

Konsep pembangunan berkelanjutan juga termasuk dalam kajian LERD.

Secara singkat, pembangunan berkelanjutan melibatkan 3 unsur yang meliputi unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut, yaitu: (Asdak, 2012:40-42)

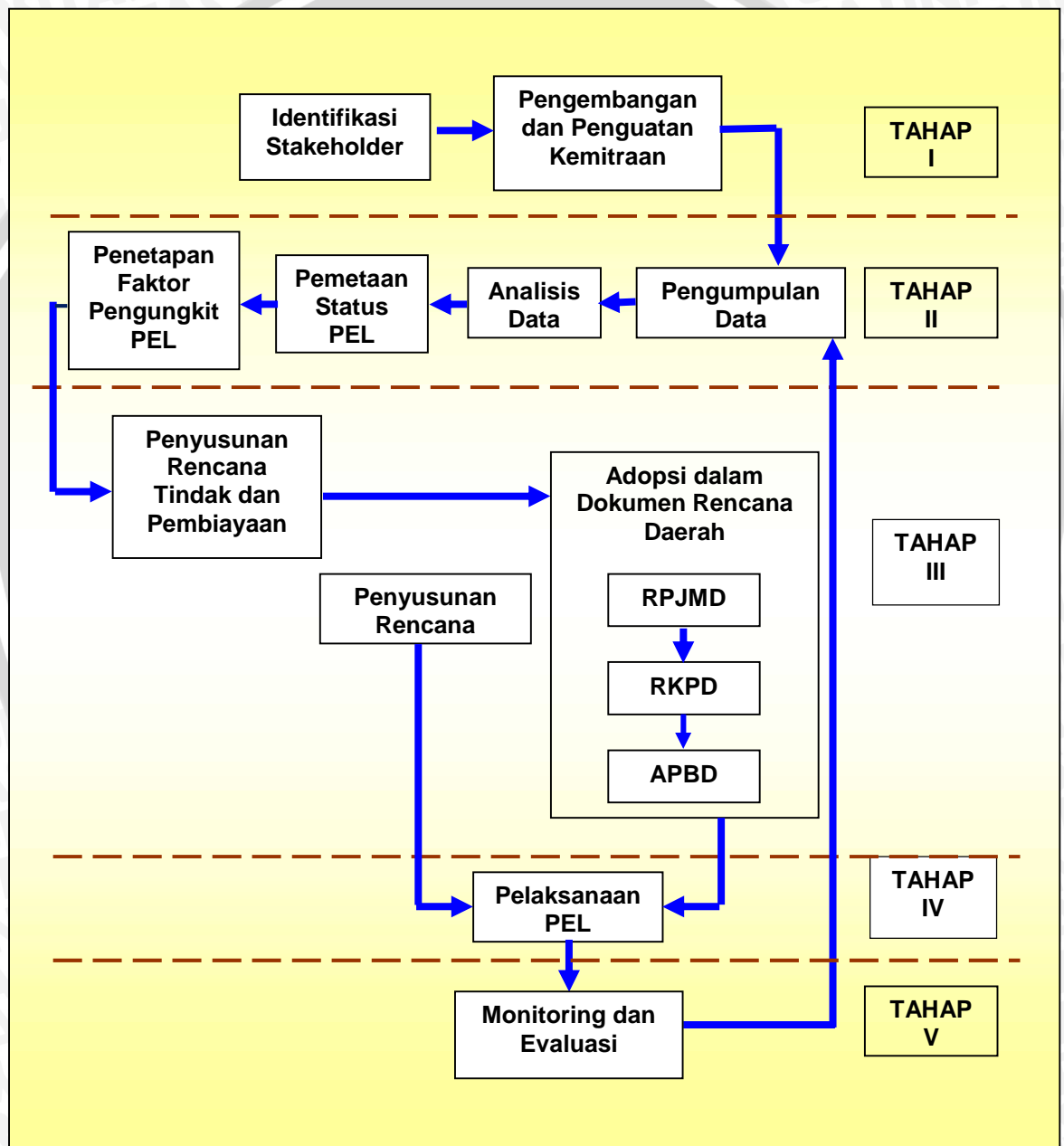
- a. Ekonomi, yaitu sebagai upaya mempertahankan/menjaga kapital agar tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan. Keseluruhan kapital yang dimaksud yaitu berupa sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial.
- b. Sosial, yaitu sebagai upaya yang lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas daripada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Seperti adanya kombinasi dari hubungan sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan hukum, disiplin dan moralitas yang akan menciptakan tercapainya keberlanjutan sistem sosial dengan bantuan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan secara sistematis.
- c. Lingkungan, yaitu sebagai upaya yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia di Bumi yang ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Manusia dalam beraktivitas harus mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga menuntut manusia harus mampu belajar untuk hidup selaran dan tidak “melawan” Hukum lingkungan.

Peran aktor/kelembagaan merupakan semua kegiatan yang dikoordinir oleh aktor-aktor yang terlibat dalam usaha pengembangan sumber-sumber potensi potensi daerah yang diidentifikasi melalui pengembangan ekonomi wilayah berkelanjutan/heksagonal LERD seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam heksagonal LERD tersebut memperjelas posisi setiap faktor yang dapat



berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan LERD tersebut.

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam konsep LERD yang telah dirumuskan oleh Said (2012), yaitu sebagai berikut.



Gambar 6. Langkah-Langkah dalam LERD  
Sumber: Said (2012)

Pelaksanaan penerapan dari konsep LERD dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah harus mengikuti langkah-langkah atau kaidah-kaidah yang sesuai dengan konsep LERD itu sendiri agar proses pengembangan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun penjelasan dari langkah-langkah dalam LERD yaitu sebagai berikut.

1. Langkah 1 dentifikasi Stakeholder

Tujuan : Mengidentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal

Output : Diketuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal

Caranya : melalui forum Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis

2. Langkah 2 Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Tujuan : Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL

Output : Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL

Peran forum adalah

- Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal
- Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL

3. Langkah 3 Pengumpulan Data

(Tahap II Kajian Cepat Status PEL)

Tujuan : Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner

Output : Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL

Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia

4. Langkah 4 Analisis Data

Tujuan : Menganalisis data dengan menggunakan *Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development* (RALED)

- Output : Hasil Analisis PEL
5. Langkah 5 Pemetaan Status PEL
- Tujuan : Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah
- Output : Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah
- Hasilnya:
- Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik.
  - Peta status PEL komoditas/wilayah
6. Langkah 6 Identifikasi Faktor Pengungkit PEL
- Tujuan : Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL
- Output : Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL
7. Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL (Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran)
- Tujuan : Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif.
- Output : Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas.
- Rencana tindak dimaksud, yaitu di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dengan dikoordinasikan oleh Bappeda.
8. Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis
- Tujuan : Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani
- Output : Rencana bisnis PEL
9. Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah
- Tujuan : Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah
- Output : Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL
10. Langkah 10 Pelaksanaan PEL
- Tujuan : Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka
- Output : Kebijakan yang mendukung PEL

#### 11. Langkah 11

Tujuan : Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci

Output : Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan

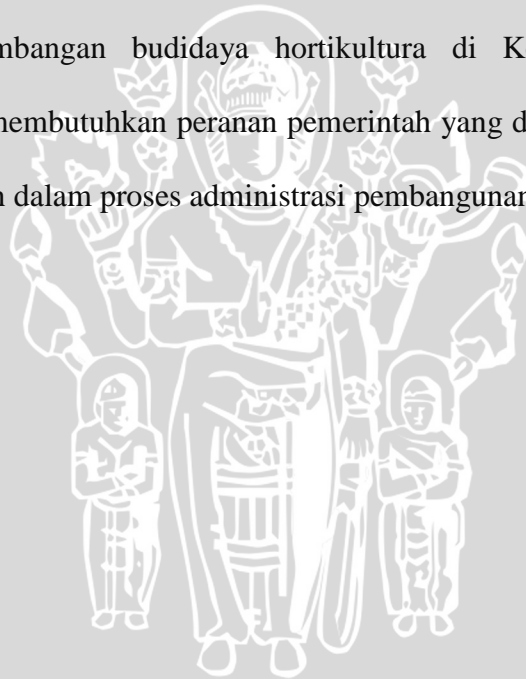
Langkah-langkah dalam LERD yang terdapat 11 langkah seperti yang telah diuraikan diatas akan dapat menghasilkan suatu rancangan/perencanaan dalam pengembangan potensi yang dimiliki suatu daerah dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Nirwansyah (2012, 18) ukuran yang sering digunakan untuk mengukur pengembangan sumber daya ekonomi lokal antara lain: (a) Serapan tenaga kerja; (b) Tingkat Pengangguran; (c) Penghasilan yang diperoleh; (d) Pendapatan yang ada pada sebuah wilayah; (e) Populasi setempat. Sedangkan, menurut Simposium Nasional tahun 2010 sebagaimana dikutip oleh Rachmawati (2010:32) terdapat 10 faktor penentu keberhasilan LERD yaitu:

2. Mengenali potensi sumberdaya lokal suatu wilayah;
3. adanya keunikan produk;
4. Pengembangan variasi produk;
5. Mempercantik tampilan produk supaya produk sehingga bernilai lebih;
6. Memperluas jangkauan pemasaran melalui promosi berbasis *website*;
7. Keterkaitan antar sektor dan wilayah;
8. Dukungan pemerintah daerah dan kerjasama pemerintah-swasta;
9. Kemudahan perizinan bagi pelaku usaha kecil menengah dan investor;
10. Kondisi usaha yang kondusif;
11. Belajar dari pengalaman wilayah lain yang telah berhasil mengembangkan produk unggulan.

Berdasarkan penjelasan mengenai LERD, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa LERD merupakan perkembangan konsep dari LED sebagai upaya yang lebih cenderung berorientasi pada proses atau dengan kata lain lebih menekankan

dalam pengoptimalan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kerjasama antar aktor seperti pemerintah, masyarakat lokal, kelompok masyarakat maupun kelompok swasta demi mensejahterahkan masyarakat lokal dan mencapai tujuan bersama yang didasari atas kewenangan daerah. Konsep LERD juga dalam sistem kelembagaan pemerintah lebih cenderung mendorong proses desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2008). Sehingga dalam penerapan konsep LERD pada strategi pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep membutuhkan peranan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya otonomi daerah dalam proses administrasi pembangunan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur untuk mengetahui cara yang akan digunakan dalam penelitian agar berjalan secara sistematis dan dapat memecahkan permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Riyanto, 2008:108). Sedangkan menurut Sugiyono (2014:9) metodologi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sejalan dengan itu, penelitian kualitatif (Creswell, 2014:79) dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Berdasarkan hal ini, jenis Penelitian deskriptif kualitatif ditetapkan agar dapat mendeskripsikan fenomena secara empiris yang terjadi dilapangan mengenai pengembangan budidaya hortikultura di kecamatan Rubaru Kabupaten

Sumenep yang ditinjau dari konsep LERD. Adapun pendekatan kualitatif lebih menekankan pada penggambaran variabel secara deskripsi baik dalam bentuk definisi, penjelasan konsep, catatan atau bentuk lainnya yang menggambarkan kondisi lapangan yang dapat menyerap informasi dalam identifikasi potensi pertanian khususnya hortikultura untuk dikembangkan melalui budidaya pertanian di lokasi studi hingga proses analisa tahapan pengembangan dan pengelolaan yang telah dilaksanakan.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti dapat memfokuskan penelitian supaya sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Potensi dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru bisa dilihat dari:
  1. Keanekaragaman Hortikultura
  2. Lahan Pertanian
  3. Teknologi
  4. Tenaga Kerja
  5. Pasar
- b. Pengembangan budidaya hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep berdasarkan teori Said (2012); lihat hal. 49-54, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Tata Pemerintahan
2. Proses Manajemen
3. Kelompok Sasaran
4. Faktor Lokasi
5. Kesinergian dan Fokus Kebijakan
6. Pembangunan Berkelanjutan

### **C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang bersangkutan dengan tujuan penelitian. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dengan alasan sebagai berikut.

1. Kecamatan Rubaru merupakan kecamatan yang dijadikan kawasan strategis sektor pertanian karena memiliki potensi pertanian khususnya di sub sektor hortikultura.
2. Pemerintah daerah memiliki konsep strategis dalam mengembangkan pertanian khususnya pada sub sektor hortikultura melalui budidaya pertanian di Kecamatan Rubaru.
3. Kecamatan Rubaru memiliki hasil pertanian yang lebih bervariasi dari kecamatan lainnya di Sumenep, terutama dari aspek pertanian sub sektor hortikultura.

Sedangkan situs penelitian adalah letak peneliti dalam menjalankan penelitian yang akan menghasilkan informasi data, yaitu pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kantor Kecamatan Rubaru, UPT. Kecamatan Rubaru,



Kelompok Tani, dan Masyarakat petani yang dapat menjadi sumber informasi untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Data Primer**

Sumber primer (Sugiyono, 2014: 225) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini bisa diperoleh di lapangan dari aktor-aktor yang bersangkutan dalam pengembangan budidaya pertanian di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Sumber data primer dalam penelitian merupakan aktor-aktor yang menangani pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dan bersedia untuk memberikan data. Adapun data narasumber dalam penelitian ini berjumlah 18 narasumber dengan nama telah disamarkan dengan alasan dan tujuan tertentu. Berikut merupakan data terkait dengan narasumber yang telah disamarkan.

- 1) Hr (Bappeda Kabupaten Sumenep)
- 2) Ms, "Nn", As, Rs, He (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep)
- 3) Sw, "A", dan Bc (UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru)
- 4) Za dan "Tn" (Pengurus Pemerintah Kecamatan Rubaru)
- 5) Sy, Zn, Si, dan St (Kelompok Tani di Kecamatan Rubaru)
- 6) Na, Hj, dan Wr (Masyarakat Petani)

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data secara tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui catatan/laporan/dokumen yang bersifat resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun kecamatan/desa, sumber dari jurnal ilmiah, majalah/berita koran, buku, dan lain sebagainya yang tetap bersangkutan dengan penelitian yang sama. Menurut Sugiyono (2014:225) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti: dokumen yang dapat memperkuat atau mendukung penelitian dalam memecahkan permasalahan. Sehingga, dalam penelitian ini, data bisa didapat dari dokumen yang berkaitan dengan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru yang berasal dari dinas-dinas terkait berupa laporan hasil produksi pertanian, peraturan yang berkaitan dalam pengembangan budidaya hortikultura seperti perda tentang RTRW Kabupaten Sumenep, dan *masterplan* dalam pengembangan kawasan agropolitan yang mencakup budidaya hortikultura Kecamatan Rubaru.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, peristiwa, dan kejadian yang ada dalam lokasi penelitian, serta dari dokumen-dokumen. Menurut Arikunto (2010), sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama pada penelitian kualitatif biasanya berupa informasi yang didapat hasil informan melalui proses wawancara, selebihnya merupakan data tambahan yang diperoleh dari dokumen, dan lain-lain. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Informan. Informan yang diwawancarai untuk penelitian ini terdiri dari pengurus Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, pengurus Kecamatan Rubaru, Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Rubaru, serta masyarakat petani Kecamatan Rubaru terkait pengembangan budidaya hortikultura yang dilihat dari konsep LERD di Kecamatan Rubaru. Data-data yang diperoleh peneliti diperoleh langsung dari hasil wawancara dari beberapa informan seperti yang telah disebutkan untuk dapat mengungkap permasalahan yang ada sesuai dengan fokus penelitian.
- 2) Peristiwa. Sumber data dalam penelitian ini diambil sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan yang bermanfaat dan dinilai tepat yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- 3) Dokumen dan catatan dalam penelitian yang digunakan adalah dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penelitian dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Dokumen diperoleh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, kantor Kecamatan Rubaru, UPT Pertanian Kecamatan Rubaru, maupun jurnal, majalah, koran, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Dalam pengumpulan data harus ditangani secara serius agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang dimaksud penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

## 1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyedik dengan subyek atau responden. Menurut Arikunto (2010:198), wawancara (interview/kuesioner lisan) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pengumpulan data melalui wawancara ini berpedoman pada pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber atau informan yang dapat mendukung dalam memberikan data sesuai dengan fokus penelitian yang dapat diyakini terkait apa yang dinyatakan bersifat benar dan dipercaya. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang termasuk dalam kategori *in-dept interview* yang pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dalam mengajak informan untuk berpendapat mengenai pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Adapun Wawancara dilakukan kepada pihak bersangkutan, yaitu Kepala Seksi Produksi Hortikultura, Staf Produksi Hortikultura, Kepala Seksi Penyuluhan, Kepala Seksi Bina Usaha Pertanian, Staf Bina Usaha Pertanian yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPT. Kecamatan Rubaru, PPL Kecamatan Rubaru, ketua kelompok tani, anggota kelompok tani, serta masyarakat petani.

## 2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2010:199). Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan secara terstruktur. Observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2014:145). Kemudian, observasi terstruktur menurut Sugiyono (2014:146) adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Sehingga, observasi pada penelitian ini, yaitu peneliti mengamati atau melihat potensi hortikultura yang dapat dikembangkan dengan suatu strategi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Rubaru dan juga sesuai dengan fokus penelitian. Selama penelitian, peneliti menempuh jarak dari kediaman peneliti menuju lokasi penelitian sekitar 27 km perjalanan darat dengan mengendarai kendaraan bermotor dalam kurun waktu sekitar 50 menit. Peneliti melakukan observasi selama 2 minggu dari pukul 08.00 – 13.00 WIB setiap harinya untuk melihat situasi dan kondisi petani yang sedang melaksanakan tugasnya, serta kondisi lainnya yang bersangkutan dengan fokus penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (Arikunto, 2010:201). Dalam dokumentasi ini, peneliti menyelidiki barang-

barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan khusus, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian yang dilakukan didapat dari dokumen seperti: Perda mengenai RTRW Kabupaten Sumenep, pembukuan mengenai hasil produksi pertanian, lokasi strategis pertanian, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian mengenai pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru yang dilihat dari konsep LERD dengan mendapatkannya dalam bentuk *softcopy file*, ada juga yang *download* dari situs internet, maupun *fotocopy* dokumen tersebut. Pada saat dilapangan, peneliti menggunakan kamera handphone untuk mendokumentasikan fenomena yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih muda dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2010:203). Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu adalah sebagai berikut.

1. Peneliti sendiri, sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, seperti: menggunakan alat panca indera dalam melakukan pengamatan, mencatat fenomena yang terjadi di lapangan.

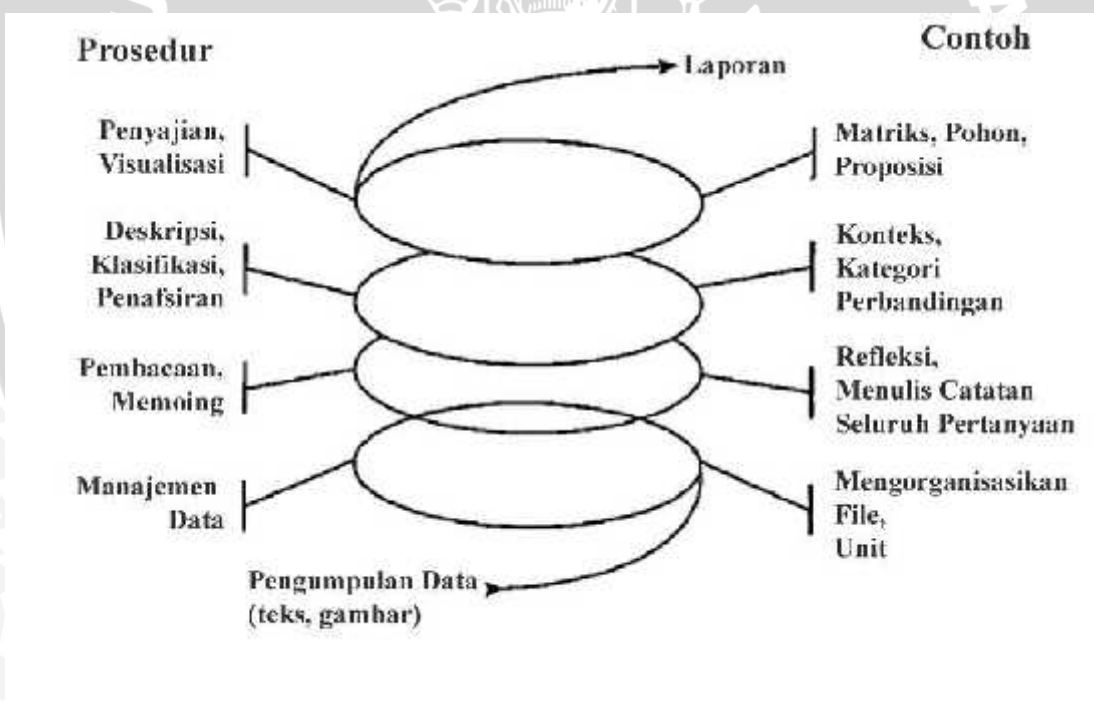
2. Pedoman wawancara, sebagai pedoman yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara kepada narasumber untuk menggali informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Perangkat Penunjang, sebagai peralatan yang digunakan demi kelancaran pelaksanaan penelitian, seperti:
  - a. Catatan lapangan, sebagai catatan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian
  - b. Alat tulis, sebagai alat bantu dalam mencatat informasi atau data yang didapat dari observasi maupun hasil wawancara terkait dengan tujuan penelitian.
  - c. Alat perekam, sebagai alat untuk merekam proses berjalannya wawancara kepada narasumber.
  - d. Situs internet, merupakan alat peneliti untuk mendapatkan segala informasi atau data yang menunjang penelitian.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data pada jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan proses mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena di lapangan yang diteliti secara faktual dan akurat. Proses pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data bukanlah proses yang mandiri, semuanya saling terkait dan seringkali berjalan secara serempak dalam proyek riset (Creswell, 2014:254). Dalam menganalisis data kualitatif menurut Creswell (2014:254) dapat menggunakan prosedur analisis sesuai dengan pola atau kontur spiral. Spiral analisis data menurut Creswell digunakan oleh peneliti supaya dapat memudahkan

dalam proses penelitian di lapangan dan mendeskripsikan fenomena yang ada, mengklarifikasi dan menafsirkan fenomena-fenomena tersebut dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Spiral analisis data menggambarkan bahwa peneliti bergerak dalam lingkaran proses penelitian yang bisa menghasilkan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, peneliti menganggap bahwa spiral analisis data tepat untuk digunakan dalam penelitian yang dilakukan karena bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada dilapangan.

Adapun spiral analisis data digambarkan dan dijelaskan dengan tahapannya sebagai berikut.



Gambar 7. Spiral Analisis Data  
 Sumber: Creswell (2014)



Langkah-langkah sesuai dengan spiral analisis data dijelaskan berikut ini.

1. Mengorganisasikan Data

Pada tahap awal, peneliti mengorganisir data dalam file-file komputer dengan mengonversi file-file menjadi satuan teks yang sesuai (misalnya: sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah cerita lengkap) untuk analisis baik dengan tangan maupun dengan komputer. Langkah ini seperti melakukan transkripsi wawancara, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda sesuai sumber informasi yang didapat. Pada tahap ini, peneliti telah melakukan transkrip wawancara seluruh narasumber yang berkaitan dengan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian yang dapat menjawab potensi yang mendukung pengembangan budidaya hortikultura dan pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura yang dilakukan di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

2. Membaca dan Membuat Memo (Memoing)

Setelah mengorganisasikan data, peneliti melanjutkan proses analisis dengan memaknai data-data tersebut secara keseluruhan. Memo ini berupa frasa pendek, ide atau konsep penting yang muncul dalam pikiran analis. Dalam tahap ini juga bisa dikatakan membaca seluruh teks, kemudian membuat catatan pinggir dan membentuk kode awal. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data-data yang diterima pada transkrip wawancara yang sudah dikelompokkan sesuai fokus kemudian disimpulkan dari masing-masing

pernyataan narasumber pada setiap fokus penelitian yang menjadi poin utama dari fokus potensi yang mendukung pengembangan budidaya hortikultura dan pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

3. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, Menafsirkan Data menjadi Kode dan Tema

Pembentukan kode atau kategori, yaitu peneliti membuat deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran menurut sudut pandang mereka dari perspektif yang ada dalam literatur. Proses pengodean (coding) dimulai dengan mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan dalam studi, kemudian memberikan label pada kode tersebut. kemudian, tema dalam penelitian kualitatif merupakan satuan informasi yang luas yang tersusun dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Dengan kata lain,

- a. proses mendeskripsikan data menjadi kode dan tema, yaitu mendeskripsikan pengalaman personal dan mendeskripsikan esensi fenomena di lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Proses pendeskripsian ini ditulis berdasarkan pengalaman dari aktor yang berkaitan dalam pengembangan budidaya hortikultura yang disesuaikan dengan fenomena di lapangan sesuai dengan hasil observasi di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

b. proses mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema, yaitu mengembangkan pernyataan penting dan mengelompokkan pernyataan menjadi pernyataan yang memiliki makna sesuai dengan nilai-nilai dari hasil pengamatan yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengklasifikasian ini mengelompokkan pernyataan dari aktor yang berkaitan dalam kegiatan pengembangan budidaya hortikultura kedalam fokus penelitian yang sesuai yang terbagi ke sub-sub fokus penelitian.

#### 4. Menafsirkan Data

Penafsiran dalam penelitian kualitatif adalah keluar dari kode dan tema menuju makna yang lebih luas dari data. Hal ini peneliti akan menafsirkan data melalui pengembangan kode, pembentukan tema dari kode tersebut, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memaknai data. Proses tersebut dapat diartikan bahwa peneliti akan mengembangkan deskripsi tekstural “Apa yang terjadi”, deskripsi struktural “Bagaimana fenomena tersebut dialami”, dan mengembangkan esensi dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, peneliti mengembangkan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara yang dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut lebih dideskripsikan proses dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura disertai dengan potensi SDA maupun SDM yang mendukung sesuai dengan fenomena di lapangan.

#### 5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data

Pada fase akhir spiral tersebut, para peneliti menyajikan data yaitu mengemas apa yang ditemukan bisa dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar. Data yang diterima atau yang didapatkan bisa disajikan dalam bentuk teks, tabel, bagan, atau gambar sesuai dengan apa yang dihasilkan peneliti dalam proses penelitiannya. Pada tahap ini, peneliti juga mengemas data dalam bentuk tabel maupun bagan yang dapat memudahkan dalam membaca data yang menjawab fokus potensi yang mendukung pengembangan budidaya hortikultura dan pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

###### a. Kondisi Geografis

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang unik di Jawa Timur karena wilayahnya meliputi wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Luas wilayah Kabupaten Sumenep mencapai 2.093,47 km<sup>2</sup>, dengan 54,79% meliputi wilayah daratan sekitar 1.146,94 km<sup>2</sup> dan 45,21% sekitar 946,53 km<sup>2</sup> merupakan wilayah kepulauan. Hampir separuh wilayah di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan merupakan wilayah kepulauan. Jumlah pulau di Kabupaten Sumenep terdapat sebanyak 126 pulau tersebar membentuk gugusan pulau-pulau, baik pulau yang berpenghuni sebanyak 48 pulau maupun yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau.

Luas wilayah yang mencapai 2.093,47 km<sup>2</sup>, terdiri dari pemukiman seluas 179,32 km<sup>2</sup>, areal hutan seluas 423,96 km<sup>2</sup>, rumput tanah kosong seluas 14,68 km<sup>2</sup>, perkebunan/tegalan/semak belukar/ladang seluas 1.130,19 km<sup>2</sup>, kolam/pertambakan/air payau/danau/waduk/rawa seluas 59,07 km<sup>2</sup>, dan lain-lainnya 63,41 km<sup>2</sup>. Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan seluas ± 50.000 km<sup>2</sup>.

Dengan adanya luas wilayah yang disertai penggunaan wilayah di Kabupaten



Sumenep menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki banyak potensi dari segi sumber daya alamnya yang dapat dikembangkan.

Secara geografis, Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura yang terletak diantara  $113^{\circ}32'54''$  –  $116^{\circ}16'48''$  Bujur Timur dan  $4^{\circ}55'$  –  $7^{\circ}24'$

Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Selatan : Selat Madura
- b. Utara : Laut Jawa
- c. Timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- d. Barat : Kabupaten Pamekasan

Dengan kondisi geografis tersebut, terdapat 18 kecamatan berada di wilayah daratan dan 9 kecamatan di wilayah kepulauan. Berikut merupakan daftar nama kecamatan dari Kabupaten Sumenep.

Tabel 7. Daftar Nama Kecamatan Wilayah Kepulauan

No.	Nama Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Banyaknya Pulau		Jumlah
			Berpenghuni	Tidak Berpenghuni	
1	Giligenting	30,32	3	5	8
2	Talango	50,27	2	3	5
3	Dungkek	63,35	1	-	1
4	Nonggunong	40,08	3	-	3
5	R a a s	38,90	9	5	14
6	Sapeken	201,89	21	32	53
7	Arjasa	241,99	3	9	12
8	Kangayan	204,68	3	23	26
9	Masalembu	40,85	3	1	4
Jumlah			48	78	126

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel tersebut, dapat menunjukkan bahwa dalam 1 kecamatan yang berada di wilayah kepulauan masih ada yang memiliki beberapa pulau baik itu yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni dengan total pulau yang ada di

Kabupaten Sumenep sebanyak 126 pulau. Selain itu, luas dari kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan memiliki besaran luas yang berbeda-beda, dengan kecamatan Arjasa yang merupakan kecamatan yang paling luas. Kemudian, berikut ini merupakan daftar nama kecamatan yang berada di wilayah daratan disertai besaran luas wilayah dari Kabupaten Sumenep.

Tabel 8. Daftar Nama Kecamatan Wilayah Daratan

No	Nama Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Pragaan	57,84
2	Bluto	51,25
3	Saronggi	67,71
4	Kalianget	30,19
5	Kota Sumenep	27,84
6	Batuan	27,10
7	Lenteng	71,41
8	Ganding	53,97
9	Guluk-Guluk	59,57
10	Pasongsongan	119,03
11	Ambunten	50,54
12	Rubaru	84,46
13	D a s u k	64,50
14	Manding	68,88
15	Batu Putih	112,31
16	Gapura	65,78
17	Batang-Batang	80,36
18	G a y a m	88,40

Sumber: Sumenep dalam Angka 2015

Semua wilayah yang berada di Kabupaten Sumenep memiliki tingkat keadaan geografi dan iklim sama. Kabupaten Sumenep termasuk dalam kategori daerah tropis. Pada tahun 2013, keadaan cuaca di Kabupaten Sumenep menunjukkan lebih basah dengan ditandai jumlah hari hujan sekitar 169 hari yang terjadi selama 9 bulan, sedangkan 3 bulan lainnya yakni Agustus, September, dan Oktober tidak ada hari hujan (Statistik Daerah Kabupaten Sumenep, 2015).

Kemudian, curah hujan di Kabupaten Sumenep adalah 1.123,8 mm per tahunnya yang dapat menambah tingkat kelembapan tanah untuk wilayah pertaniannya.

Selain itu, di Kabupaten Sumenep terdapat 21 sungai dengan panjang total mencapai 109,7 km yang dimanfaatkan sebagai sumber air untuk 27 daerah irigasi. Irigasi tersebut mampu mengairi 5.245 hektar areal sawah. Berikut merupakan daftar nama sungai yang menjadi sumber air untuk daerah irigasi.

Tabel 9. Nama Sungai, Daerah Irigasi, dan Luas Baku Sawah yang Diairi di Kabupaten Sumenep

No	Nama Sungai	Daerah Irigasi	Panjang Sungai (km)	Luas Baku Sawah (Ha)
1	Panele	Banjeru	2,5	194
2	Bakul	Banjar	6,0	187
3	Ambat	Braji	4,5	213
4	Beringin	Kali Masjid	5,5	85
5	Patrean	Parsanga	7,5	554
6	Karpenang	Karpenang	3,0	166
7	Anjuk	Kebonagung	9,0	707
8	Bakjati	Jepun	10,0	1.424
		Nonsaen II	2,5	78
9	Lembung Duwek	Nonsaen I	3,5	78
		Korcah	2,5	87
10	Canggur	Talambung	5,7	140
11	Ringpiring	Tmbk. Pereng Bawah	2,0	109
12	Paseman	Tmbk. Pereng Atas	3,0	119
13	Duko	Reang	2,0	80
14	Manseon	Bakeong	4,0	68
15	Sabuntar	Catoh	0,8	19
		Pelat	1,5	116
16	Salagading	Tambakagung	5,6	399
17	Kikbau	Candi	18,5	124
18	Sangka	Duko	1,6	15
		Sumber Nangka	0,5	10
		Bilis-Bilis	2,6	125
19	Talaga	Angon-Angon	1,2	30
20	Sambakati	Sambakati	1,1	50
		Bujutan	0,2	15
21	Sawahsumur	Sawahsumur	1,7	42
22	Pandeman	Pandeman Atas	0,5	4
		Pandeman Bawah	2,5	8
<b>Jumlah</b>			<b>111,5</b>	<b>5.245</b>

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2015

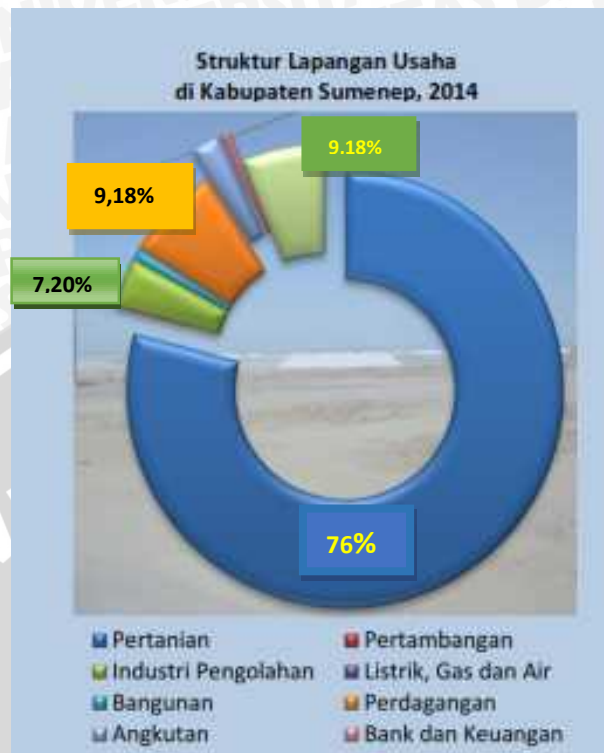


Berdasarkan dari tabel diatas, sungai yang dapat mengairi sawah yang ada di Kabupaten Sumenep mencapai 5.245 ha. Terdapat juga irigasi air tanah yang menunjang lahan persawahan atau kegiatan pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep yang mencapai 3.093,10 ha. Kedua hal tersebut merupakan suatu kelebihan yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam mengembangkan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep.

#### **b. Kondisi Demografis**

Kabupaten Sumenep memiliki 27 kecamatan dengan 332 desa/kelurahan. Dengan jumlah penduduk Sumenep pada tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi sebesar 1.061.211 jiwa yang terdiri dari 507 ribu penduduk laki-laki dan 560 ribu penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebesar 324.272. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang biasa disebut dengan sebutan *sex-rasio* sebesar 90,65% yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 91 penduduk laki-laki. Kepadatan rumah tangga di Kabupaten Sumenep sebesar 3,29 jiwa.

Persentase perbandingan penduduk 15 tahun keatas yang bekerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang masuk dalam usia angkatan kerja digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterserapan angkatan kerja dalam lapangan usaha yang tersedia. Dari 622.460 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 616.145 diantaranya terserap dalam dunia kerja, dengan kata lain tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Sumenep sebesar 98,99%. Berikut merupakan struktur lapangan usaha yang menjadi kesempatan kerja bagi masyarakat, yaitu.

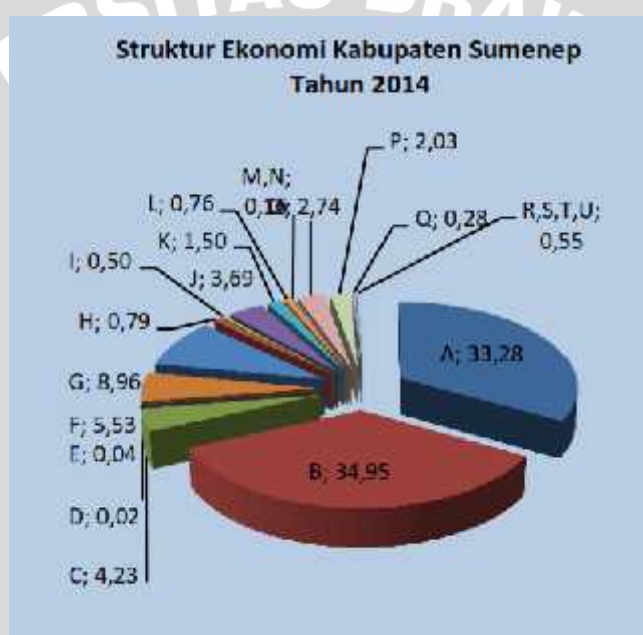


Gambar 8. Struktur Lapangan Usaha di Kabupaten Sumenep, 2014  
*Sumber: Sumenep dalam Angka 2015*

Gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah agraris, kesempatan kerja terbesar, yaitu terdapat pada sektor pertanian yang mencapai 76%. Kesempatan terbesar kedua dan ketiga pada sektor perdagangan sebesar 9,18% dan sektor jasa-jasa sekitar 7,20%. Sedangkan sektor pertambangan serta sektor listrik, gas, dan air hanya mampu menyediakan kesempatan kerja dibawah 2%. Prosentase dari kesempatan kerja dan peluang kerja yang tersedia, masih menyisakan pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep, yaitu pada tahun 2014 mencapai 6.315 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,01%. Walaupun demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting bagi Kabupaten Sumenep dalam mensejahterakan masyarakat.

### c. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Sumenep didukung dari berbagai sektor yang ada. Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep merupakan salah satu sektor yang dapat menunjukkan sebagai sektor yang sangat berkontribusi pada perekonomian masyarakat maupun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan gambaran struktur ekonomi Kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut.



Gambar 9. Struktur Ekonomi Kabupaten Sumenep Tahun 2014  
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumenep, 2015

Berdasarkan gambar diatas, struktur ekonomi Sumenep masih didominasi oleh struktur ekonomi primer, yaitu sumber daya primer dari pertanian dan pertambangan dan penggalian sangat dominan membentuk PDRB Kabupaten Sumenep. Di tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian menempati kedudukan pertama dalam berkontribusi terhadap PDRB sebesar 34,95%.

Kemudian sektor pertanian terdapat di posisi kedua dengan perbandingan yang tidak begitu besar, yaitu 33,28%. Sektor ketiga yang mendominasi dalam

memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumenep adalah sektor perdagangan sebesar 8,96%. Dengan demikian, dilihat dari potensi yang dimiliki Kabupaten Sumenep, baik dari sumber daya alamnya, faktor penunjang seperti sumber irigasinya, kesempatan kerja dan peluang kerja bagi sumber daya manusia yang ada, maupun kontribusi yang diberikan kepada daerah dapat menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah yang paling menonjol untuk dikembangkan bagi Kabupaten Sumenep.

#### d. Kondisi Pertanian

Sejauh ini, pertanian di Kabupaten Sumenep dari segi penggunaan lahan pertanian seluas 209,347 ha (74%) dari total luas wilayah Kabupaten Sumenep, sedangkan 26% sisanya adalah lahan bukan pertanian. Namun, dari penggunaan lahan pertanian tersebut, yang berupa lahan sawah hanya 16,27%, sedangkan sebagian besarnya (83,73%) berupa tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat, kolam/tebat/empang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini.

Tabel 10. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumenep

Jenis Lahan	Luas (ha)
Pertanian	154.831
a. Sawah	25.185
- Irigasi	8.637
- Non Irigasi	16.548
b. Bukan sawah	129.646
- Tegal/Ladang/Kebun	117.356
- Lainnya	12.290
Bukan Pertanian	54.516
a. Rumah/Bangunan	18.680
b. Hutan Negara	21.207
c. Lainnya	14.629
<b>Jumlah</b>	<b>209.347</b>

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumenep, 2015

Berdasarkan tabel diatas dengan penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang penggunaan lahan, adapun dari penggunaan lahan tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil produksi pertanian dari Kabupaten Sumenep, yaitu

- a. Pada musim tanam tahun 2014, produksi padi sawah sebesar 179.423 ton dari luas panen sekitar 31.315 ha, artinya produktivitas padi sawah mencapai 5,72 ton tiap hektar. Sementara itu, luas tanam padi ladang hanya sekitar 1,57% dari areal ladang dengan mencapai produksi padi sekitar 9.551 ton dan areal ladang yang lain di Kabupaten Sumenep ditanami dengan komoditi palawija seperti jagung, ubi kayu, dan palawija yang lain.
- b. Tanaman jagung yang merupakan komoditi jenis palawija yang menjadi unggulan para petani di Kabupaten Sumenep, pada tahun 2014, areal luas tanaman yang mencapai 93,12% dari seluruh areal pertanian dapat mencapai produksi sebesar 397.600 ton. Kemudian, luas tanam jenis tanaman palawija yang lain rata-rata persentasenya dibawah 10% dari areal pertanian di Kabupaten Sumenep.
- c. Buah-buahan yang termasuk pada jenis hortikultura, pada tahun 2014 yang memiliki total produksi tertinggi adalah pisang sebesar 343.884 kw (kwuintal) pertahunnya. Kemudian, mangga dengan total produksi mencapai 235.884 kw dan buah rambutan sebesar 10.100 kw. Sedangkan produksi tanaman sayuran yang juga termasuk pada jenis hortikultura adalah cabe rawit sekitar 42.848 kw dan bawang merah yang mampu berproduksi hingga 15.947 kw dengan nilai produksi sebesar Rp 19 Milyar lebih.

- d. Luas lahan perkebunan rakyat di Kabupaten Sumenep mencapai 98.025,92 ha. Jenis perkebunan terluas adalah tanaman perkebunan kelapa yang mencapai 51.021,87 ha dengan produktivitas 1,27 ton perhektar tiap tahunnya. Areal perkebunan rakyat terluas berikutnya adalah Jambu Mente dan Kapok Randu. Pada tahun 2012, perkebunan tembakau merupakan perkebunan terluas kedua sekitar 23.413 ha, namun pada tahun 2013 susut menjadi hanya 7.158 ha saja dikarenakan curah hujan yang tinggi.
- e. Luas kawasan hutan di Kabupaten Sumenep tahun 2014 adalah 42.375,30 ha. Terdiri dari hutan lindung seluas 25.882,3 ha, hutan produksi 15.150,56 ha, dan hutan jenis lainnya seluas 1.342,4 ha. Lokasi hutan terutama berada di wilayah kepulauan.

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Rubaru

### a. Kondisi Geografis

Kecamatan Rubaru merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Adapun Batas wilayah Kecamatan Rubaru adalah sebagai berikut.

- |                    |   |                                      |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| a. Sebelah Utara   | : | Kecamatan Ambunten dan Dasuk         |
| b. Sebelah Timur   | : | Kecamatan Manding dan Kecamatan Kota |
| c. Sebelah Selatan | : | Kecamatan Lenteng dan Ganding        |
| d. Sebelah Barat   | : | Kecamatan Pasongsongan               |

Secara geografis, Kecamatan Rubaru termasuk wilayah dataran rendah yang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 84,46km<sup>2</sup> (8.446,04 ha). Menurut keadaan topografinya, wilayah

di Kecamatan Rubaru memiliki tingkat kemiringan tanah yang berbeda-beda, yaitu:

- daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan lebih dari 60% meliputi areal seluas 7,52 km<sup>2</sup> atau 6,89% dari total wilayah kecamatan,
- daerah perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 30% sampai 60% atau seluas 43,19 km<sup>2</sup> atau 51,14%,
- daerah landai dengan tingkat kemiringan kurang dari 30% seluas 33,75 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Rubaru terdiri dari 11 Desa dengan dengan memiliki dua tipe jenis tanah, yaitu antara lain:

Tabel 11. Luas Wilayah Menurut Desa dan Jenis Tanah 2014

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah (ha)	Tanah kering (ha)	Jumlah (ha)
1	Basoka	86,51	1.812,57	1.899,08
2	Mandala	42,02	1.437,04	1.479,06
3	Karangangka	53,11	768,77	821,88
4	Pakondang	44,21	898,38	942,59
5	Matanair	45,39	651,21	696,60
6	Tambaksari	99,70	362,92	462,62
7	Bana Sare	15,49	263,45	278,94
8	Bunbarat	79,90	264,66	344,56
9	Kalebengan	14,62	388,32	402,94
10	Rubaru	85,12	452,07	537,19
11	Duko	19,30	561,28	580,58
<b>Jumlah</b>		585,37	7.860,67	8.446,04

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam Angka 2015

Dengan latar belakang keadaan geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Rubaru, seperti ditunjukkan dengan tingkat kemiringan tanah berupa daerah pegunungan dan perbukitan, dan jenis tanah maka sektor pertanian merupakan sektor yang dapat mendominasi untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Rubaru sebagai mata pencaharian bagi masyarakat lokal di Kecamatan tersebut.

### b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Rubaru pada tahun 2014 tercatat sebesar 37.025 jiwa yang terdiri dari 17.218 jiwa laki-laki dan 19.807 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Rubaru, bisa dilihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2014 yang menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki akan memperoleh *sex-ratio* sebesar 86,93% yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 86 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kecamatan Rubaru sebesar 438,27 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Rubaru terbagi dalam 11 Desa, 37 Dusun, 37 Rukun Warga, dan 232 Rukun Tetangga. Adapun pernyataan ini disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 12. Banyaknya Dusun/Lingkungan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa 2014

No.	Desa	Dusun	RW	RT
1	Basoka	4	4	25
2	Mandala	4	4	24
3	Karangnangka	3	3	24
4	Pakondang	3	3	32
5	Matanair	3	3	28
6	Tambaksari	4	4	13
7	Banasare	3	3	21
8	Bunbarat	3	3	13
9	Kalebengan	3	3	13
10	Rubaru	4	4	21
11	Duko	3	3	18
<b>Jumlah</b>		37	37	232

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam Angka 2015

Kemudian, penduduk di Kecamatan Rubaru dengan jumlah 37.025 jiwa telah terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia dengan nilai berikut ini.



Tabel 13. Banyaknya Rumah Tangga Menurut Desa dan Lapangan Usaha 2014

No	Desa	Pertanian (jiwa)	Perdagangan (jiwa)	Angkutan (jiwa)	Industri (jiwa)	Penggalian (jiwa)	Pertukangan (jiwa)	Jasa (jiwa)
1	Basoka	941	77	15	48	-	18	21
2	Mandala	1.351	56	12	13	-	17	16
3	Karangangka	853	44	21	74	7	6	13
4	Pakondang	1.123	90	19	41	3	14	22
5	Matanair	1.082	99	19	184	4	44	24
6	Tambaksari	465	66	14	21	2	20	13
7	Bana Sare	385	124	23	23	4	29	20
8	Bunbarat	401	49	12	61	1	15	12
9	Kalebengan	617	69	20	87	2	16	10
10	Rubaru	640	102	19	73	4	20	31
11	Duko	634	44	10	98	12	14	16
<b>Jumlah</b>		8.492	820	184	723	39	213	198

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk lokal Kecamatan Rubaru tersebut. Jumlah penduduk lokal yang bermatapencaharian sebagai petani memiliki nilai yang paling tinggi dari keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Rubaru. Sehingga, jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor pertanian dapat dinilai seyogyanya dipertahankan maupun dikembangkan guna mensejahterakan masyarakat.

### c. Kondisi Pertanian

Salah satu tolak ukur yang sering digunakan sebagai alat untuk memantau perubahan tingkat kesejahteraan petani adalah produksi yang dihasilkan. Kegiatan usaha pertanian yang menggunakan lahan, maka faktor kondisi dan luas lahan adalah hal yang berkaitan langsung dan menentukan hasil produksi. Luas lahan yang sempit sudah tentu akan memberikan hasil yang sedikit

pula. Berikut ini merupakan data yang menggambarkan penggunaan lahan sebagai lahan pertanian di Kecamatan Rubaru, yaitu.

Tabel 14. Luas Lahan Menurut Desa dan Penggunaannya 2014

No	Desa/Kelurahan	Pertanian (ha)	Bukan Pertanian (ha)	Jumlah (ha)	Presentase Lahan Pertanian (%)
1	Basoka	1.788,64	110,44	1.899,08	94,18
2	Mandala	1.388,88	90,17	1479,05	93,90
3	Karangnangka	714,21	107,67	821,88	86,90
4	Pakondang	831,89	110,70	942,59	88,26
5	Matanair	533,46	163,14	696,60	76,58
6	Tambaksari	389,48	64,14	462,62	86,14
7	Bana Sare	234,78	44,16	278,94	84,17
8	Bunbarat	298,19	46,36	344,55	86,54
9	Kalebengan	317,49	85,45	402,94	78,79
10	Rubaru	485,45	51,74	537,19	90,37
11	Duko	505,15	75,43	580,58	87,01
<b>Jumlah</b>		7.496,62	949,40	8.446,02	88,76

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam Angka 2015

Penggunaan lahan yang telah berada di Kecamatan Rubaru hampir 90% digunakan sebagai lahan pertanian. Penggunaan lahan tersebut merupakan suatu pemanfaatan yang baik dalam mensejahterakan masyarakat melalui sektor pertanian.

Kemudian, disamping penggunaan lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, terdapat pula sarana dalam mengembangkan sektor pertanian tersebut yang dapat dilihat dari sarana pertanian yang digunakan. Salah satu sarana pertanian yang digunakan oleh petani, yaitu berupa sarana pengairan. Sarana pengairan berupa sistem irigasi ini di Kecamatan Rubaru dinilai sangat sederhana, yaitu menggunakan tadah hujan. Adapun data yang menggambarkan penggunaan sarana pengairan tersebut di Kecamatan Rubaru, yaitu sebagai berikut.

Tabel 15. Luas Lahan Sawah Menurut Desa dan Jenis Pengairan 2014

No	Desa/Kelurahan	Irigasi (ha)			Tadah Hujan (ha)	Jumlah (ha)
		Teknis	Setengah Teknis	Sederhana		
1	Basoka	-	-	-	86,51	86,51
2	Mandala	-	-	-	42,02	42,02
3	Karangnangka	-	-	-	53,11	53,11
4	Pakondang	-	-	-	44,21	44,21
5	Matanair	-	-	14,00	31,39	45,39
6	Tambaksari	-	-	-	99,79	99,79
7	Bana Sare	-	-	-	15,49	15,49
8	Bunbarat	-	-	-	79,90	79,90
9	Kalebengan	-	-	-	14,62	14,62
10	Rubaru	-	-	-	85,12	85,12
11	Duko	-	-	10,00	9,30	19,30
<b>Jumlah</b>				24,00	561,46	585,46

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam angka 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh desa menggunakan tadah hujan dalam mengelola sumberdaya air pada proses pengairan untuk lahan pertanian. Selain itu, penjelasan dari kondisi pertanian di Kecamatan Rubaru juga dapat dilihat dari hasil pertanian yang sangat melimpah dan beranekaragam.

Berikut merupakan laporan hasil pertanian dari Kecamatan Rubaru.

Tabel 16. Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Padi/Palawija 2013

No.	Komoditi	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Juta Rp)
1	Padi Sawah	1.254	7.034	34,900
2	Padi Ladang	239	1.189	5,800
3	Jagung	6.880	16.490	23,010
4	Kedelai	16	4.311	145
5	Kacang Tanah	266	872	2,860
6	Kacang Hijau	22	564	240
7	Ubi Kayu	788	6.511	7,390
8	Ubi Jalar	16	80	133

Sumber: PPL Kec. Rubaru dalam Kecamatan Rubaru dalam Angka 2014

Tabel 17. Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Sayuran 2013

No.	Komoditi	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Juta Rp)
1	Bawang Merah	245	1.188	35.120
2	Cabe Merah	103	298	1.784
3	Cabe Rawit	2.442	14.946	66.642
4	Tomat	54	162	404
5	Ketimun	262	2.101	3.852
6	Terong	60	180	326
7	Kacang Panjang	232	1.164	2.110

Sumber: PPL Kec. Rubaru dalam Kecamatan Rubaru dalam Angka 2014

Tabel 18. Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Buah-buahan 2013

No.	Komoditi	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Juta Rp)
1	Mangga	104	7.699	24.680
2	Pisang	208	328	984
3	Pepaya	10	20	28
4	Rambutan	1	16	63
5	Sirsak	1	66	183

Sumber: PPL Kec. Rubaru dalam Kecamatan Rubaru dalam Angka 2014

Tabel 19. Luas Tanam, Produksi, dan Nilai Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan 2013

No.	Komoditi	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Juta Rp)
1	Kelapa	1.424	2848	2.039.
2	Jambu Mente	1.160	570	4.640
3	Kapuk Randu	99	100	670
4	Siwalan	102	118	4,6
5	Asam Jawa	9	4,7	110
6	Cabe Jamu	124	108	3.824
7	Lada	20	2	16,10
8	Serat Nanas	18	2,4	18,20
9	Pandan	12	5,7	21,40
10	Pinang	13	6,6	12,0
11	Tembakau	760	371	7.414
12	Temulawak	8	3,1	8,4

Sumber: PPL Kec. Rubaru dalam Kecamatan Rubaru dalam Angka 2014

Hasil produksi pertanian di Kecamatan Rubaru dapat dilihat dari tabel diatas, yang menunjukkan bahwa hasil pertanian dari segala komoditas memiliki nilai produksi maupun produktivitas yang cukup besar. Oleh karena itu, Kecamatan Rubaru dapat dinilai memiliki potensi dalam bidang pertanian untuk dikembangkan supaya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Rubaru.

### **3. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan**

Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep merupakan suatu gambaran umum secara sistematis dan berkesinambungan dengan beberapa faktor pendukung seperti kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk mencapai terwujudnya konsep pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian Kabupaten Sumenep dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Sehingga, dengan dibentuknya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep ini diharapkan dapat memenuhi tujuan dalam pembangunan pertanian.

#### **a. Visi Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu SKPD memiliki visi misi yang digunakan dalam melaksanakan

tugasnya. Adapun visi misi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut.

a) Visi

“Terwujudnya petani yang sejahtera dan mandiri, yang berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan.”

b) Misi

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani serta aparatur dalam penerapan usaha tani modern melalui inovasi teknologi dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam;
2. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui perekayasaan usaha tani hulu dan hilir;
3. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang pembangunan pertanian secara optimal dan berkelanjutan.

**b. Tujuan dan Strategi**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep memiliki tujuan dan strategi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun tujuan dan strategi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep, yaitu:

a) Tujuan

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Menuju Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Mengembangkan Pembangunan Pertanian Yang Berorientasi Agribisnis Menuju Kemandirian Usaha;

### 3. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Sektor Pertanian.

#### b) Strategi: Langkah-langkah Pencapaian Program

1. Pengamanan ketersediaan pangan melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi serta optimalisasi dan pemanfaatan lahan kering;
2. Penyediaan benih unggul serta faktor penunjangnya dengan prinsip 6 tepat, dilakukan melalui pemberdayaan pelaku usaha pembenihan, pengembangan teknologi dalam produksi dan distribusi benih, pelepasan varietas baru dan penyediaan benih sumber varietas unggul bebas hama penyakit;
3. Pengembangan sistem sertifikasi benih untuk mempertahankan mutu benih dan kemurnian varietas, baik di lapangan maupun di laboratorium yang selanjutnya dilakukan pelabelan terhadap benih yang telah memenuhi syarat kelulusan sertifikasi;
4. Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak fenomena iklim seperti banjir dan kekeringan serta pengendalian OPT, dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen;
5. Intensifikasi, rehabilitasi lahan-lahan marginal dan diversifikasi komoditi untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan dan kerusakan lahan yang cukup tinggi yang menyebabkan menurunnya produksi dan produktivitas pertanian;

6. Optimalisasi dan pengembangan sumberdaya, sarana, dan prasarana dengan fokus kegiatan yang garah pada pengembangan teknologi di bidang mekanisasi maupun budidaya tanaman
7. Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produktivitas dan produksi. Fenomena perubahan iklim dan kerusakan sumber daya alam dapat menurunkan produktivitas areal pertanaman.

### **c. Kedudukan, Fungsi dan Tugas**

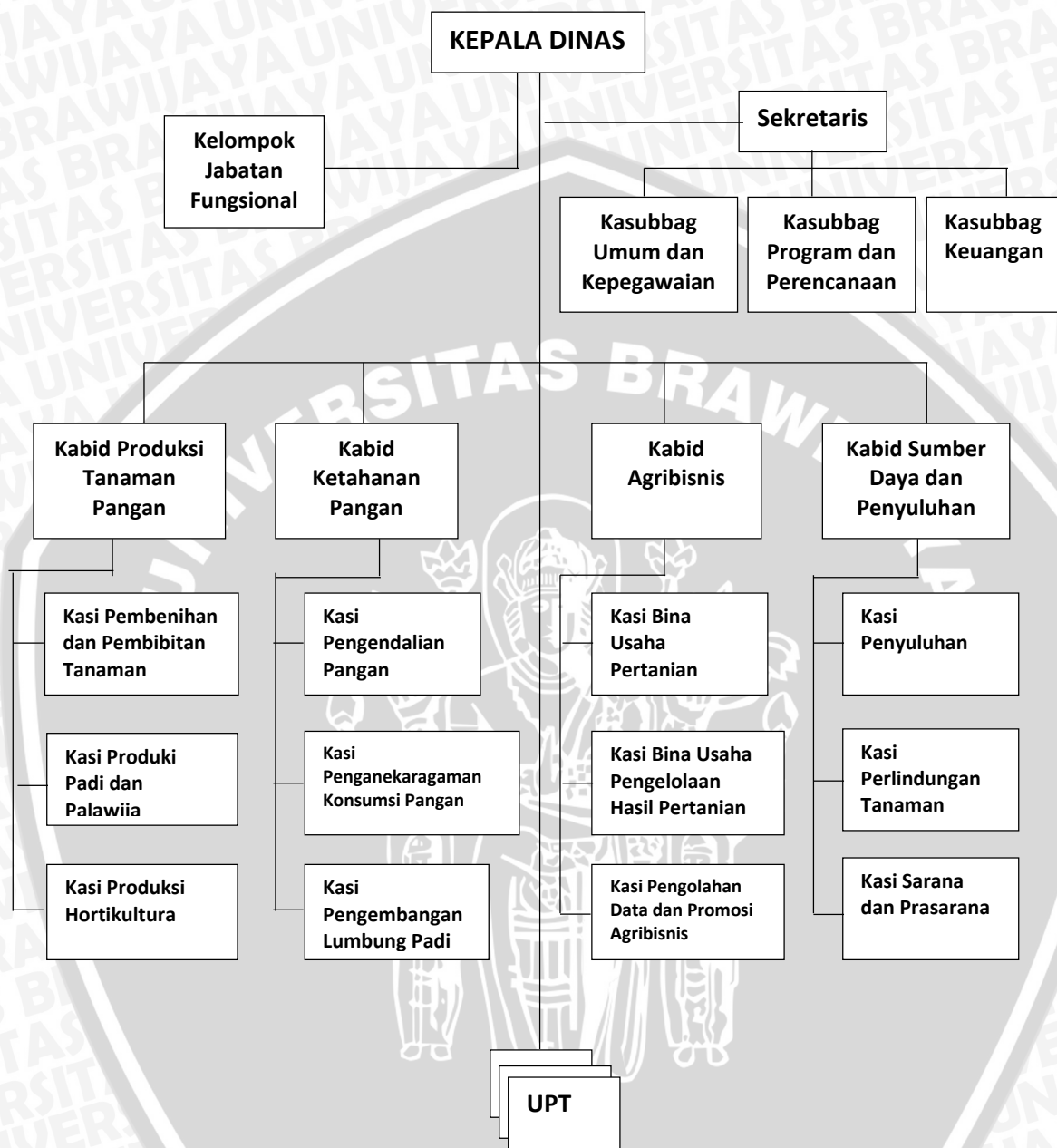
Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep No. 28 Tahun 2008 yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pertanian tanaman pangan. Kemudian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pertanian tanaman pangan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan program, pembinaan umum dan teknis operasional serta pengembangan usaha pertanian tanaman pangan;
3. Perencanaan dan pelaksanaan program, pembinaan umum dan teknis operasional tanaman pangan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan program, pembinaan umum dan teknis operasional serta pengembangan agribisnis;



5. Perencanaan dan pelaksanaan program, pembinaan umum dan teknis operasional serta pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
6. Pelaksanaan pengamatan dan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
7. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya pertanian tanaman pangan, sarana, prasarana serta pengembangan usaha dan permodalan;
8. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program ketahanan pangan;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan, kewaspadaan pangan, ketersediaan pangan dan usaha penyelamatan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep juga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pertanian tanaman pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi, dan 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kecamatan serta Kelompok jabatan fungsional. Adapun pernyataan tersebut disajikan dalam bentuk gambar struktur organisasi, yaitu adalah sebagai berikut.



Gambar 10. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan (2016)

Kemudian, sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, bagian Keempat belas pasal 214, diuraikan tugas dan fungsi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan dan keuangan

b. Fungsi

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat.
- 2) Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketetalaksanaan.
- 3) Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan kemandirian dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan.
- 4) Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- 5) Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- 3) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- 4) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2 Sub Bagian Program dan Perencanaan

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- 3) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- 4) Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3 Sub Bagian Keuangan

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- 2) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- 4) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Tanaman Pangan

#### a. Tugas

Melaksanakan urusan pembenihan dan pembibitan tanaman dan produksi padi dan palawija serta produksi hortikultura.

#### b. Fungsi

- 1) Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas produksi tanaman pangan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan, penyediaan, pemanfaatan benih dan bibit tanaman serta pembinaan penangkar dan pedagang benih dan bibit tanaman.
- 3) Penyusunan rencana sasaran luas, produktivitas dan peningkatan produksi tanaman pangan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan terhadap rekomendasi paket teknologi anjuran spesifik lokasi pelaksanaan model / pola pengembangan produksi

tanaman pangan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi dan mutu produksi.

- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan dan standarisasi teknis perlindungan tanaman dan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman pangan serta analisa dampak kerugian gangguan organisme pengganggu tanaman pangan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1 Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pembenihan dan pembibitan tanaman;
- 2) Melaksanakan bimbingan tentang pengadaan, pengawasan mutu, penyimpanan, pendistribusian benih bina dan bibit tanaman;
- 3) Melaksanakan bimbingan pengembangan, pemanfaatan benih unggul, bermutu dan berlabel serta pembinaan teknis terhadap penangkar dan pedagang benih bina dan bibit tanaman;
- 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan balai benih dan kebun bibit serta memfasilitasi sertifikasi benih dan bibit, sarana dan prasarana bagi penangkar benih dan bibit tanaman;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemasaran hasil penangkar benih dan bibit tanaman;

- 6) Melaksanakan pengkajian dan menyiapkan rekomendasi terhadap benih dan bibit tanaman spesifikasi lokal;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Seksi Produksi Padi dan Palawija

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas produksi padi dan palawija;
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis, rencana sasaran luas, peningkatan produksi tanaman padi dan palawija melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitas;
- 3) Menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi, model/pola pengembangan produksi, rencana perluasan areal tanam padi dan palawija;
- 4) Menyiapkan bahan pemantauan dan laporan peningkatan mutu produksi tanaman padi dan palawija serta penerapan teknologi panen dan pasca panen;
- 5) Mengumpulkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, pengendalian serangan dan analisa dampak kerugian gangguan organisme pengganggu tanaman padi dan palawija;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.3 Seksi Produksi Hortikultura

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas produksi hortikultura;

- 2) Melaksanakan bimbingan teknis, rencana sasaran luas, peningkatan produksi hortikultura melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitas;
  - 3) Menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi, model/pola pengembangan produksi, rencana perluasan areal tanam hortikultura;
  - 4) Menyiapkan bahan pemantauan dan laporan peningkatan mutu produksi hortikultura serta penerapan teknologi panen dan pasca panen;
  - 5) Mengumpulkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan, pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, pengendalian serangan dan analisa dampak kerugian gangguan organisme pengganggu hortikultura;
  - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas dan Fungsi Bidang Ketahanan Pangan
- a. Tugas  
Melaksanakan Urusan Pengendalian pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan lumbung pangan.
  - b. Fungsi
    - 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas ketahanan pangan.
    - 2) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan pemantapan ketahanan pangan.
    - 3) Pelaksanaan pengkajian pemantauan produksi dan ketersediaan dan cadangan pangan strategis.



- 4) Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan.
- 5) Pelaksanaan pengkajian kebutuhan, distribusi pangan masyarakat dan koordinasi pencegahan penanggulangan kerawanan pangan dan keadaan darurat pangan.
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses masyarakat terhadap teknologi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan berkualitas.
- 7) Penyusunan norma dan standart teknis pengembangan lumbung pangan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.1 Seksi Pengendalian Pangan

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengendalian pangan;
- 2) Menyiapkan bahan pemantauan, pengkajian, evaluasi distribusi dan potensi sumber pangan strategis;
- 3) Melaksanakan pemantauan, pengkajian dan pengawasan sistim jaminan mutu pangan dan standar teknis pengembangan distribusi pangan;
- 4) Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pangan tingkat rumah tangga dan masyarakat serta keamanan pangan;
- 5) Melaksanakan pengkajian, perekayasaan dan pengembangan sistim kelembagaan ketahanan pangan di perdesaan;
- 6) Melaksanakan pemantauan, identifikasi kerawanan pangan masyarakat;

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penganekaragaman konsumsi pangan;
- 2) Menyiapkan bahan pemantauan, pengembangan dan evaluasi penganekaragaman konsumsi pangan strategis;
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan promosi pangan lokal;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses masyarakat terhadap teknologi penganekaragaman konsumsi pangan;
- 5) Menyiapkan pemasyarakatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi berimbang, aman dan berkualitas;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3 Seksi Pengembangan Lumbung Pangan

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan lumbung pangan;
- 2) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi ketersediaan dan cadangan sumber pangan strategis;
- 3) Melaksanakan pemantauan dan pengkajian keterjangkauan pangan masyarakat;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi harga bahan pangan strategis tingkat konsumen;

- 5) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan lumbung pangan;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis

##### a. Tugas

Melaksanakan urusan bina usaha pertanian dan bina usaha Pengolahan Hasil Pertanian serta pengolahan data dan promosi agribisnis.

##### b. Fungsi

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas agribisnis.
- 2) Pelaksanaan identifikasi potensi dan perencanaan pengembangan usaha pertanian, kelembagaan usaha dan jasa serta sistim agribisnis.
- 3) Pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan dan pengkreditan dalam rangka pengembangan permodalan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan data, promosi pengolahan dan pemasaran hasil usaha dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksebilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis dan statistik pertanian.
- 6) Pelaksanaan koordinasi, analisa penyajian data statistik serta perizinan bidang usaha dan jasa pertanian.

- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1 Seksi Bina Usaha Pertanian

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina usaha pertanian;
- 2) Melaksanakan analisa usaha pertanian dan pembenihan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan kerjasama usaha pertanian;
- 4) Melaksanakan analisis rekayasa teknologi pertanian dan pembenihan yang berwawasan lingkungan;
- 5) Melakukan inventarisasi, identifikasi dan aplikasi terhadap rekayasa teknologi pertanian dan pembenihan;
- 6) Melakukan bimbingan dan pelatihan teknis terhadap pengembangan pertanian dan pembenihan;
- 7) Melaksanakan identifikasi potensi, perencanaan dan pengembangan permodalan serta investasi;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2 Seksi Bina Usaha Pengolahan Hasil Pertanian

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina usaha pengolahan hasil pertanian;
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan kerjasama usaha pengolahan hasil pertanian;
- 3) Melaksanakan analisis rekayasa teknologi pertanian untuk usaha pengolahan hasil pertanian;

- 4) Melakukan inventarisasi, identifikasi dan aplikasi terhadap rekayasa teknologi pertanian untuk usaha pengolahan hasil pertanian;
- 5) Melakukan bimbingan dan pelatihan teknis terhadap pengusaha pengolah hasil pertanian;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.3 Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengolahan data dan promosi agribisnis;
- 2) Melaksanakan pengelolaan data agribisnis, data statistik pertanian, serta memberikan informasi data agribisnis;
- 3) Melaksanakan pengembangan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian;
- 4) Memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis;
- 5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan data dan promosi agribisnis;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan

### a. Tugas

Melaksanakan urusan penyuluhan dan perlindungan tanaman serta sarana dan prasarana.

### b. Fungsi

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sumber daya dan penyuluhan.
- 2) Pelaksanaan pengkajian metodologi dan sistim penyuluhan guna meningkatkan sumber daya manusia penyuluh dan petani serta bimbingan teknis dinamika kelompok tani dalam rangka peningkatan kompetensi kelembagaan petani.
- 3) Penyipanan bahan penyelenggaraan penyuluh, sistem penyuluhan, pengadaan dan penyebaran sarana penyuluh pertanian serta bimbingan teknis pengujian dan penerapan teknologi spesifik lokasi.
- 4) Penyusunan bahan pengembangan kemitraan usaha dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kelembagaan petani.
- 5) Perumusan pemanfaatan air irigasi, pengembangan sumber air dan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta rehabilitasi pengelolaan pertanian.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan data agroklimat dan potensi sumberdaya lahan, sumberdaya air, sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pembinaan dan pengendalian pupuk dan pestisida.

- 7) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan rancang bangun prototype, modifikasi alat dan mesin pertanian serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan sumberdaya dan penyuluhan pertanian.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 5.1 Seksi Penyuluhan

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penyuluhan;
- 2) Melaksanakan pelatihan teknis dan pertemuan - pertemuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pertanian serta menyusun program penyuluhan tingkat daerah, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan rencana kerja penyuluh;
- 3) Melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan penilaian angka kredit penyuluh serta menyusun pedoman penyelenggaraan penyuluhan, sistim penyuluhan dan pengadaan, penyebaran informasi penyuluhan pertanian;
- 4) Melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi serta supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan serta hasil sistim kerja laku penyuluh;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.2 Seksi Perlindungan Tanaman

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perlindungan tanaman;

- 2) Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian, pemberantasan hama penyakit, organisme pengganggu tanaman pertanian;
- 3) Melaksanakan pengamatan terhadap serangan hama penyakit tanaman dan tumbuhan pengganggu, penggunaan metode pemberantasan terhadap hama penyakit dan tumbuhan pengganggu;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan tanaman pertanian;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana

- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sarana dan prasarana;
- 2) Melaksanakan inventarisasi data agroklimat dan potensi sumberdaya lahan, sumberdaya air, sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- 3) Melaksanakan pembinaan teknis pendayagunaan lahan, pemanfaatan air irigasi, pembinaan HIPPA serta usaha konservasi lahan pertanian;
- 4) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bencana alam banjir, kekeringan dan explosive organisme pengganggu tanaman;
- 5) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengendalian distribusi pupuk dan pestisida serta penggunaannya sesuai standar mutu dan pembinaan teknis pengembangan pupuk organik;
- 6) Melaksanakan pembinaan rancang bangun, modifikasi prototype, kualifikasi dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian



- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Potensi dalam Pengembangan Budidaya Hortikultura di Kecamatan Rubaru**

#### **a. Keanekaragaman Hortikultura**

Hortikultura di Kecamatan Rubaru menjadi komoditas unggulan dari segi pertanian. Terdapat keanekaragaman hortikultura yang menjadi potensi untuk dibudidayakan di Kecamatan Rubaru. Potensi hortikultura di Kecamatan Rubaru cukup tinggi, khususnya untuk tanaman bawang merah dan cabe rawit. Pada tahun 2014, produksi bawang merah di Kecamatan Rubaru mencapai 1.498,40 ton atau sekitar 23,56% dari total produksi hortikultura, sedangkan cabe rawit produksinya mencapai 1.631,70 ton atau sekitar 25,65% dari total produksi hortikultura di Kecamatan Rubaru. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Bapak “Sw”, yaitu

“Hampir bisa dikatakan seluruh komoditas hortikultura ini bisa dan cocok dibudidayakan di Rubaru, seperti halnya: mulai dari bawang merah, cabe rawit, cabe, terong, mentimun, sawi, tomat, terus ya itu diantaranya kan itu termasuk sangat dominan komoditas-komoditas itu. Cuman yang terbesar kalau Rubaru itu bahkan terkenal itu bawang merahnya. Bawang merah melalui permentan tahun 2011 itu sudah mempunyai varietas tersendiri, varietas Rubaru, itu 2011 dilepas oleh kementerian” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Komoditas unggulan hortikultura ini juga tertera dalam laporan revisi *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan (2014) yang menjelaskan bahwa komoditas unggulan di Kecamatan Rubaru, yaitu

- 1) bawang merah, cabe besar dan ketimun.

Adapun desa-desa di Kecamatan Rubaru yang menjadi penghasil utama hortikultura adalah desa Desa Basoka, Mandala, Karangnangka, Pakondang, dan Duko, sedangkan untuk tanaman cabe besar desa penghasil utamanya adalah Desa Karangnangka, Matanair, Tambaksari, Banasare, Kalebengan, dan Rubaru.

- 2) buah anggur, durian, jambu biji, jeruk siam, mangga, nanas, nangka, papaya, salak, sawo, dan sirsak.

Komoditas tanaman buah tersebar secara merata di seluruh desa di wilayah pengembangan Kecamatan Rubaru.

Penjelasan tersebut mengenai keanekaragaman hortikultura yang menjadi komoditas unggulan Kecamatan Rubaru juga dapat dibuktikan dengan adanya tabel rekapitulasi hortikultura berikut ini.

Tabel 20. Rekapitulasi Hortikultura Kecamatan Rubaru 2015

No	Komoditas	Tanam (ha)	Produksi (kuintal)	Produktivitas	Harga Jual Petani (Rp/kg)
<b>A</b>	<b>Buah-buahan</b>			<b>kuintal/pohon</b>	
1	Durian	-	46	0,66	15.000,-
2	Mangga	-	14.052	0,52	3.600,-
3	Pisang	-	14.643	0,41	3.003,-
<b>B</b>	<b>Sayuran</b>			<b>(ton/ha)</b>	
1	Bawang Merah	201	13.839	69,20	16.790
2	Buncis	1	105	10,50	3.000,-
3	Cabe Besar	37	1.189	31,29	10.023,-
4	Cabe Rawit	65	1.999	29,40	13.640,-
5	Kacang Panjang	18	661	2,64	3.005,-
6	Kangkung	3	283	9,43	2.335,-
7	Ketimun	21	2.246	112,30	2.278,-
8	Terong	20	3.221	14,64	2.644,-
9	Tomat	4	376	9,40	5.000,-
<b>C</b>	<b>Biofarmaka</b>				
1	Laos	-	1788,36	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2016

Adapun tabel rekapitulasi hortikultura tersebut sebagai bukti yang menjelaskan angka produktivitas bahwa telah dilakukan pengembangan hortikultura selama ini, sekaligus menjadi potensi untuk lebih dikembangkan dan dibudidayakan. Sehingga, pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dapat didukung dari adanya keanekaragaman hortikultura yang selama ini telah diproduksi.

Selain itu, terdapat juga hasil pemetaan mengenai analisis komoditi unggulan dari setiap desa yang ada di Kecamatan Rubaru. berikut ini merupakan pemetaan dari komoditi unggulan Kecamatan Rubaru.



Gambar 11. Peta Analisis Komoditi Unggulan

Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Berdasarkan dari pemetaan komoditi unggulan tersebut, dapat dilihat bahwa potensi hortikultura seperti Bawang merah (Desa Duko, Basoka, Karangnangka, Mandala, Pakondang), Cabe besar (Desa Rubaru, Kalebengan, Banasare, Tambaksari, Matanair, Karangnangka), dan Ketimun (Desa Kalebengan, Banasaren Tambaksari, Matanair) di Kecamatan Rubaru.

Sampai saat ini, pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dapat dilaksanakan dengan maksimal khususnya untuk tanaman terong, cabe kecil, cabe besar, tomat, kacang panjang, timun/mentimun, sawi karena penanamannya tidak memandang musim yang artinya dapat berproduksi sepanjang tahun dan memang selama beberapa tahun ini sudah dilakukan. Terdapat juga bawang merah yang memang merupakan varietas Rubaru atau varietas Sumenep yang telah diakui dan dapat dibudidayakan hanya pada bulan panen, yaitu jatuh pada bulan Desember, Februari, dan Juni. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak “Sy”, yaitu:

“Dari terong, lombok kecil, cabe besar (khususnya ditanam di desa Karangnangka, Basoka, Mandala), terus tomat, kacang panjang, timun, itu eksis itu semua di Kecamatan Rubaru. Cuman di eksisnya itu di desa Karangnangka, Bunbarat, Banasare, Matanair, Tambaksari, itu semua horti itu yang dari kacang panjang, timun, tomat, terong, cabe, Sawi dan segala macam itu yang paling dominan. Kalo kubis satu tahun sekali, itu musiman. Kalo bawang merah itu ditanam dalam 1tahun cuma 3 kali saja, desember, february, dan juni” (Hasil wawancara Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hortikultura di Kecamatan Rubaru merupakan kekuatan atau faktor pendukung dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura guna mensejahterahkan masyarakat.

### b. Lahan Pertanian

Seperti yang telah digambarkan dalam gambaran umum mengenai Kecamatan Rubaru bahwa lahan potensial untuk pertanian mencapai angka 7.496,62 ha setara dengan 88,76% dari luas seluruh wilayah. Penggunaan lahan di Kecamatan Rubaru didominasi oleh tanah kering sebesar 7.860,67 ha atau sekitar 93% dari total luas wilayah seperti disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 21. Luas Wilayah Menurut Desa dan Jenis Tanah 2014

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah (ha)	Tanah kering (ha)	Jumlah (ha)
1	Basoka	86,51	1.812,57	1.899,08
2	Mandala	42,02	1.437,04	1.479,06
3	Karangangka	53,11	768,77	821,88
4	Pakondang	44,21	898,38	942,59
5	Matanair	45,39	651,21	696,60
6	Tambaksari	99,70	362,92	462,62
7	Bana Sare	15,49	263,45	278,94
8	Bunbarat	79,90	264,66	344,56
9	Kalebengan	14,62	388,32	402,94
10	Rubaru	85,12	452,07	537,19
11	Duko	19,30	561,28	580,58
<b>Jumlah</b>		585,37	7.860,67	8.446,04

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam Angka 2015

Kemudian, dari lahan potensial pertanian dapat diklasifikasikan lagi dari segi penggunaan lahan sebagai lahan sawah maupun bukan sawah di Kecamatan Rubaru. Pengklasifikasian penggunaan lahan menunjukkan prosentase lahan bukan sawah lebih besar yang mencapai angka 92,19%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Penggunaan lahan bukan sawah ini memang cocok sebagai lahan penanaman hortikultura di Kecamatan Rubaru. Berikut merupakan data dalam bentuk tabel yang menggambarkan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Rubaru.

Tabel 22. Luas Lahan Pertanian Menurut Desa dan Jenis Lahan 2014

No	Desa/Kelurahan	Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)	Jumlah (ha)	Presentase Lahan Sawah (%)	Presentase Lahan Bukan Sawah (%)
1	Basoka	86,51	1.702,13	1.788,64	4,84	95,16
2	Mandala	42,02	1.346,86	1.388,88	3,03	96,97
3	Karangnangka	53,11	661,10	714,21	7,44	92,56
4	Pakondang	44,21	787,86	832,07	5,31	94,69
5	Matanair	45,39	488,07	533,46	8,52	91,48
6	Tambaksari	99,70	298,78	398,48	25,02	74,98
7	Bana Sare	15,49	219,29	234,78	6,60	93,40
8	Bunbarat	79,90	218,29	298,19	26,79	73,21
9	Kalebengan	14,62	3012,87	317,49	4,60	95,40
10	Rubaru	85,12	400,33	485,45	17,53	82,47
11	Duko	19,30	485,85	505,15	3,82	96,18
<b>Jumlah</b>		585,37	6.991,43	7.496,80	7,81	92,19

Sumber: Kecamatan Rubaru dalam Angka 2015

Angka yang tertera dalam tabel tersebut yang berarti penggunaan lahan bukan sawah lebih dipergunakan untuk penanam hortikultura juga dibuktikan dari adanya pernyataan dari Bapak Sw yang turut bertanggung jawab atas pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru yang mengatakan bahwa:

“Tidak terbatas dari lahan sawah, tegal termasuk juga pekarangan-pekarangan bisa digunakan untuk budidaya tanaman itu” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Artinya penanaman hortikultura memang bisa dibudidayakan baik dengan lahan sawah maupun lahan bukan sawah seperti tegal dan pekarangan yang lebih banyak digunakan bagi masyarakat petani karena penanaman hortikultura tidak membutuhkan aliran air/genangan air seperti padi dalam proses panennya.

Namun, secara empiris masih terdapat petani di Kecamatan Rubaru yang menanam hortikultura menggunakan lahan pertanian dengan sistem tumpang

tindih atau bergantian. Artinya, setelah penanaman tanaman pangan seperti: padi, jagung, dan sebagainya barulah menanam hortikultura. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ketersediaan lahan untuk pertanian hortikultura hanya bisa digunakan dalam waktu tertentu saja atau pada musim tertentu. Walaupun sebagian besar petani lainnya juga memanfaatkan lahan pekarangan atau tegal yang dijadikan sebagai lahan untuk hortikultura.

Kemudian, sesuai dengan revisi *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan Kecamatan Rubaru (2014) bahwa sesuai dengan analisis kesesuaian lahan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur menghasilkan hasil kajian penilaian hortikultura yang cocok untuk ditanami di lahan Kecamatan Rubaru. Hortikultura yang dapat ditanam dan dibudidayakan sesuai analisis lahan, yaitu cabe, srikaya, mentimun, dan mangga. Sebagaimana atas pernyataan dari Bapak “Ms”, yaitu mengatakan:

“Memang, kec. Rubaru dioptimalkan lahannya untuk tanaman sayuran termasuk horti, terutama bawang merah, cabe rawit, mentimun, dan terong” (Hasil wawancara pada hari Senin, 21 Maret pukul 08.30 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan).

Kemudian, tidak hanya Bapak “Ms”, Bapak “Sy” yang menjadi salah satu aktor dalam pengembangan budidaya hortikultura juga berpendapat bahwa:

“Lahan untuk menanam bawang itu cocok sekali, pokoknya untuk tanaman horti sangat mendukung” (Hasil wawancara Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selama ini lahan pertanian di Kecamatan Rubaru memang sangat cocok untuk ditanamani hortikultura, seperti bawang merah, mentimun, terong, cabe, dan sayuran lainnya. Walaupun secara

empiris sesuai dengan analisis lahan yang dilakukan untuk tanaman srikaya tidak terlaksana atau tidak dibudidayakan di Kecamatan Rubaru. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian di Kecamatan Rubaru dari segi tekstur tanah dan luas lahannya tetap menjadi salah satu potensi untuk mendukung terlaksananya pengembangan budidaya hortikultura, namun juga memiliki kelemahan berupa penggunaan lahan pertanian yang tumpang tindih antara hortikultura dengan komoditas lain.

### c. Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam kegiatan bertani bertujuan untuk mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Teknologi pertanian dapat digunakan mulai dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Inovasi teknologi saat ini, yaitu rekomendasi sistem pengelolaan tanaman, sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) hingga munculnya berbagai prototipe alat dan mesin pertanian yang bermanfaat bagi petani.

Teknologi pertanian di Kecamatan Rubaru yaitu salah satunya berupa alat dan mesin pertanian. Sebagaimana setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru, PPL, beberapa kelompok tani, dan masyarakat petani di Kecamatan Rubaru menunjukkan bahwa para petani disana dapat dikatakan tidak semua petani menggunakan alat dan mesin pertanian yang modern, masih ada yang menggunakan alat dan mesin pertanian secara tradisional atau konvensional seperti gambar yang ditunjukkan dibawah ini.



a)



b)



Gambar 12. Alat Pertanian Tradisional yang digunakan Petani, a) sapi untuk mengolah tanah/membajak sawah, b) alat pengangkut dari kayu di Kecamatan Rubaru

*Sumber: Pengamatan Peneliti, 2016*

Hal tersebut dikarenakan memang tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern yang diberikan oleh pemerintah. Berikut merupakan laporan yang dapat mendukung pernyataan tersebut.

Tabel 23. Alat dan mesin pertanian di Kecamatan Rubaru 2013-2015

No.	Obyek	Jumlah (Unit)
1	Hand Traktor	20
2	Pompa Air	32
3	Cultivator	3

*Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2016*

Sejauh ini, mulai dari tahun 2013-2015 bantuan fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern yang mendukung kegiatan usaha tani hortikultura yang diperoleh seperti yang ditunjukkan tabel diatas menunjukkan angka yang memiliki perbandingan jauh terhadap jumlah petani atau kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru. Hal ini juga bisa dilihat dari data pengadaan alat dan mesin pertanian yang diberikan oleh UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru, yaitu sebagai berikut.

Tabel 24. Keadaan alat dan mesin pertanian di Kecamatan Rubaru

No	Kelompok	Desa	Tahun Pengadaan	Obyek
1	KT. Sumber Rejeki	Banasare	2005	Hand Traktor
2	Bunga Harapan	Basoka	2009	Hand Traktor
3	Harapan Sejahtera	Basoka	2008	Hand Traktor
4	KT. Serbaguna I	Bun Barat	2006	Hand Traktor
5	Barokah	Bun Barat	2008	Hand Traktor
6	Bunga Tanjung	Bun Barat	2008	Hand Traktor
7	KT. Kelapa Mas	Duko	2005	Hand Traktor
8	KT. Bunga Sumekar	Kalebengan	2006	Hand Traktor
9	KT. Telaga Biru	Karangnangka	2004	Hand Traktor
10	KT. Putra Mandala	Mandala	2004	Hand Traktor
11	KT. Suka Maju	Matanair	2005	Hand Traktor
12	KT Sejahtera	Pakondang	2006	Hand Traktor
13	KT Flamboyan	Rubaru	2004	Hand Traktor
14	KT Sumber Makmur	Tambak Sari	2004	Hand Traktor
15	AL- Barokah	Pakondang	2010	Hand Traktor
16	Gapoktan	Bun Barat	2007	Pompa Air
17	Gapoktam	Bun Barat	2007	Pompa Air
18	KT. Karya Indah	Karangnangka	2004	Pompa Air
19	KT. Hobbul Wathon	Mandala	2004	Pompa Air
20	KT. Al- Hikmah	Pakondang	2003	Pompa Air
21	Barokah	Banasare	2010	Pompa Air
22	KT. Hobbul Wathon	Mandala	2003	Pompa Air

Sumber: UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru

Berdasarkan tabel diatas dari 200 kelompok tani yang terdiri dari 4887 anggota kelompok di Kecamatan Rubaru, sejak tahun 2003 hanya beberapa kelompok tani saja yang menerima seperti yang telah dipaparkan. Kemudian, hal ini juga didukung adanya pernyataan dari Bapak “Sw” yang mengatakan bahwa tidak semua kelompok tani memiliki alat dan mesin pertanian, seperti yang dikutip dari pernyataan berikut ini.

“Dalam pengelolaan sumberdaya air, sesungguhnya kalau berbicara masalah SDA, sumber daya alam kurang mendukung artinya tidak ada sumber-sumber yang apa ya, disini sumber airnya dari sumur, tidak ada sungai, jadi pake sumber-sumber sumur itu. Alat dan mesin pertaniannya sudah... bahkan dalam pengolahan tanah sudah banyak pake hand traktor walaupun pada intinya belum semua memiliki alat-alat. Kemudian untuk pascapanen disini sudah banyak mendapat bantuan alat-alat seperti: mesin selip, alat ngangkut” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Pemenuhan teknologi dalam kegiatan usaha tani di Kecamatan Rubaru, diawali dengan pemenuhan teknologi dalam pengelolaan airnya, yaitu pompa. Pompa ini merupakan fasilitas yang dapat membantu kegiatan usaha tani para petani karena Kecamatan Rubaru berada di dataran tinggi yang akan mengalami kesusahan dalam pemenuhan air pada musim kemarau. Selama ini di Kecamatan Rubaru masih mengandalkan tadah hujan untuk sistem pengairannya seperti keterangan yang dijelaskan dalam gambaran umum Kecamatan Rubaru. Kemudian, Bapak “Bc” juga menyampaikan bahwa:

“Jadi Alat dan mesin pertanian yang paling banyak itu hand traktor, power thresher, pompa.. rumah pompa” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dari segi pemenuhan fasilitas alat dan mesin pertanian modern, pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Dinas

Pertanian Tanaman Pangan sudah diusahakan/dipenuhi untuk mendukung kegiatan usaha tani hortikultura untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru.

Pemberian fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern ini juga dinyatakan oleh Bapak “Zn”. Dalam kelompoknya, beliau mendapat beberapa jenis bantuan dari pemerintah, seperti yang dapat diperhatikan dari pernyataan berikut.

“Iya yang sering bawang merah mendapat bibit, pupuk sesuai dengan kebutuhan kelompok itu, terus pompa, traktor” (Hasil wawancara Selasa, 29 Maret 2016 pukul 10.45 WIB di Kediaman Bapak Zn).

Pemberian fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern tersebut yang diberikan kepada kelompok tani berdasarkan program dari pemerintah, sehingga pemberian fasilitas ini hanya akan diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum seperti kelompok tani dari “A” dan “B” sesuai dari hasil observasi dan wawancara peneliti. Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak “As”, yaitu:

“iya namanya aja program dari pemerintah mbak, yang dikasih ya cuma kelompok tani yang berbadan hukum saja. Kan harus jelas” (Hasil wawancara pada hari Kamis, 28 April 2016 pukul 10.15 WIB di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep).

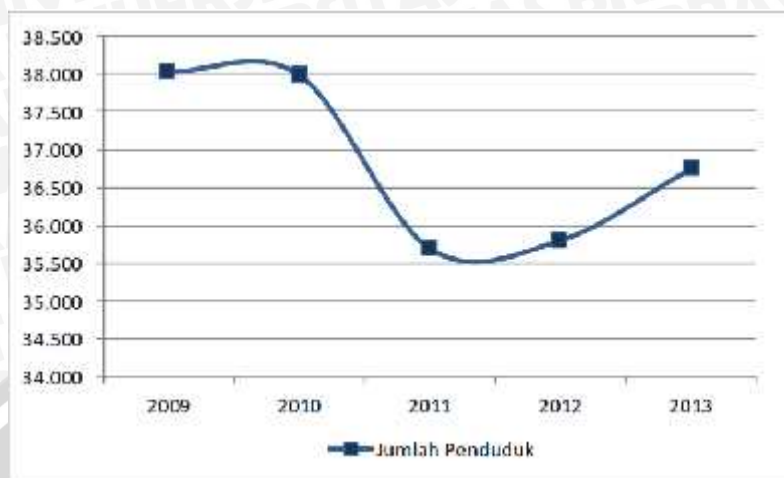
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua petani yang ada di Rubaru sejumlah 8.492 orang yang terdiri 4.887 orang tergabung dalam 200 kelompok tani mendapatkan bantuan fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern dari pemerintah. Bagi para petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani maupun kelompok tani yang tidak mendapatkan bantuan alsintan modern, para petani tersebut menggunakan alsintan seadanya atau yang bersifat konvensional dalam menjalankan kegiatan usaha tani yang mendukung kegiatan

pengembangan budidaya hortikultura. Sehingga, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani di Kecamatan Rubaru masih menggunakan alat dan mesin pertanian konvensional atau tradisional dalam kegiatan usaha tani.

#### d. Tenaga Kerja

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Pertumbuhan penduduk di masing-masing desa di Kecamatan Rubaru pada umumnya cenderung meningkat, namun tidak konstan. Prosentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah prosentase penambahan penduduk rata-rata setiap tahun. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kecamatan Rubaru relatif sangat rendah, yaitu sekitar 1,467% per tahun.

Jika ditinjau dari proyeksi penduduk yang merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang, maka proyeksi penduduk dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pengembangan pertanian. Proyeksi penduduk ini digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan fasilitas dan utilitas yang dibutuhkan masyarakat di wilayah perencanaan dan dapat memperkirakan terhadap kondisi atau dampak di masa mendatang, sehingga permasalahan saat ini dapat dipecahkan dan permasalahan di masa mendatang akan dapat diantisipasi. Bahan yang digunakan sebagai acuan proyeksi penduduk tersebut, yaitu data kependudukan yang berupa *time series* dari tahun 2009-2013. Berikut merupakan gambar grafik trend pertumbuhan di Kecamatan Rubaru Tahun 2009-2013 yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk cenderung tidak konstan.



Gambar 13. Grafik Trend Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2009-2013

Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Kemudian, terdapat analisis distribusi dan kepadatan penduduk yang menunjukkan tingkat aktivitas suatu daerah. Analisis tersebut diperlukan untuk menciptakan pemerataan aktivitas sehingga populasi penduduk tidak membebani wilayah tertentu saja. Berikut ini merupakan analisis kepadatan penduduk di Kecamatan Rubaru Tahun 2014-2034, yaitu.

Tabel 25. Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2014

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Klasifikasi kepadatan Penduduk
1	Basoka	18,99	4.151	219	Rendah
2	Mandala	14,79	4.955	335	Rendah
3	Karangangka	8,22	3.557	433	Rendah
4	Pakondang	9,43	4.626	491	Rendah
5	Matanair	6,97	4.513	647	Rendah
6	Tambak Sari	4,63	2.319	501	Rendah
7	Banasare	2,79	2.739	982	Rendah
8	Bunbarat	3,45	2.091	606	Rendah
9	Kalebengan	4,03	2.642	656	Rendah
10	Rubaru	5,37	3.033	565	Rendah
11	Duko	5,81	2.985	514	Rendah
	Total	84,48	37.611	445	Rendah

Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Kepadatan penduduk Kecamatan Rubaru pada tahun 2014 dinilai memiliki klasifikasi kepadatan penduduk yang rendah dikarenakan penduduk Kecamatan Rubaru berada ditingkat 100 jiwa/ha. Klasifikasi yang digunakan untuk analisis kepadatan penduduk di Kecamatan Rubaru adalah sebagai berikut.

- a. tingkat kepadatan tinggi = >200 jiwa/ha
- b. tingkat kepadatan sedang = 101-200 jiwa/ha
- c. tingkat kepadatan rendah = <100 jiwa/ha

Kemudian, perkiraan kepadatan penduduk pada tahun 2019 juga berada ditingkat yang rendah yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 26. Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2019

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Klasifikasi kepadatan Penduduk
1	Basoka	18,99	5.787	305	Rendah
2	Mandala	14,79	6.908	467	Rendah
3	Karangangka	8,22	4.959	603	Rendah
4	Pakondang	9,43	6.449	684	Rendah
5	Matanair	6,97	6.292	903	Rendah
6	Tambak Sari	4,63	3.232	698	Rendah
7	Banasare	2,79	3.819	1369	Rendah
8	Bunbarat	3,45	2.915	845	Rendah
9	Kalebengan	4,03	3.683	914	Rendah
10	Rubaru	5,37	4.228	787	Rendah
11	Duko	5,81	4.161	716	Rendah
Total		84,48	52.434	621	Rendah

Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Analisis kepadatan penduduk dilakukan hingga tahun 2034 untuk melihat tingkat perubahan kepadatan penduduk yang akan mempengaruhi penggunaan lahan sebagai pemukiman. Tujuan dari analisis ini agar pemerintah daerah dapat mengimbangi dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Perkiraan kepadatan penduduk Kecamatan Rubaru tahun 2024-2034, yaitu tetap memiliki klasifikasi kepadatan penduduk yang rendah.

Tabel 27. Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2024

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Klasifikasi kepadatan Penduduk
1	Basoka	18,99	9.148	482	Rendah
2	Mandala	14,79	10.922	738	Rendah
3	Karangnangka	8,22	7.840	954	Rendah
4	Pakondang	9,43	10.195	1.081	Rendah
5	Matanair	6,97	9.947	1.427	Rendah
6	Tambak Sari	4,63	5.110	1.104	Rendah
7	Banasare	2,79	6.037	2.164	Rendah
8	Bunbarat	3,45	4.609	1.336	Rendah
9	Kalebengan	4,03	5.823	1.445	Rendah
10	Rubaru	5,37	6.685	1.245	Rendah
11	Duko	5,81	6.579	1.132	Rendah
Total		84,48	82.896	981	Rendah

Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Tabel 28. Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2029

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Klasifikasi kepadatan Penduduk
1	Basoka	18,99	14.236	750	Rendah
2	Mandala	14,79	16.996	1.149	Rendah
3	Karangnangka	8,22	12.200	1.484	Rendah
4	Pakondang	9,43	15.865	1.682	Rendah
5	Matanair	6,97	15.749	2.221	Rendah
6	Tambak Sari	4,63	7.952	1.717	Rendah
7	Banasare	2,79	9.395	3.367	Rendah
8	Bunbarat	3,45	7.173	2.079	Rendah
9	Kalebengan	4,03	9.061	2.248	Rendah
10	Rubaru	5,37	10.402	1.937	Rendah
11	Duko	5,81	10.237	1/762	Rendah
Total		84,48	128.997	1.527	Rendah

Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014



Tabel 29. Kepadatan Penduduk Kecamatan Rubaru Tahun 2034

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Klasifikasi kepadatan Penduduk
1	Basoka	18,99	21.050	1.108	Rendah
2	Mandala	14,79	25.130	1.699	Rendah
3	Karangnangka	8,22	18.039	2.195	Rendah
4	Pakondang	9,43	23.459	2.488	Rendah
5	Matanair	6,97	22.888	3.284	Rendah
6	Tambak Sari	4,63	11.758	2.540	Rendah
7	Banasare	2,79	13.891	4.979	Rendah
8	Bunbarat	3,45	10.605	3.074	Rendah
9	Kalebengan	4,03	13.398	3.325	Rendah
10	Rubaru	5,37	15.381	2.864	Rendah
11	Duko	5,81	15.137	2.605	Rendah
Total		84,48	190.738	2.258	Rendah

*Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014*

Berdasarkan tabel kepadatan penduduk dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk di kawasan pengembangan pertanian sebagai kawasan agropolitan yang melaksanakan pengembangan budidaya hortikultura Kecamatan Rubaru hingga tahun 2034 akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,5% dari tahun 2014. Sedangkan kepadatan penduduk di Kecamatan Rubaru mengalami peningkatan rata-rata sebesar 47,86%. Namun, hasil analisis tersebut tetap menghasilkan klasifikasi kepadatan penduduk yang rendah. Hal ini berarti tidak akan mempengaruhi jumlah lahan pertanian yang ada di Kecamatan Rubaru dan menjadi suatu keuntungan besar dalam pemanfaatan lahan di Kecamatan Rubaru dalam pengembangan budidaya hortikultura.

Selain itu, pada analisis distribusi penduduk juga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan wilayah terutama bagi wilayah yang masih jarang penduduknya. Distribusi penduduk dan kepadatan di Kecamatan Rubaru mengacu pada kemampuan daya dukung lahan terhadap penyediaan permukiman bagi

pertambahan penduduk serta pengembangan pertanian sebagai kawasan agropolitan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep, salah satunya melalui pengembangan budidaya hortikultura. Oleh karena itu, sejauh ini penambahan jumlah penduduk di Kecamatan Rubaru masih tidak berpengaruh kepada pemanfaatan lahan pertanian dalam pengembangan budidaya hortikultura.

Sejauh ini, tenaga kerja yang dapat dilihat dari jumlah rumah tangga menurut lapangan usaha sektor pertanian pada tahun 2014 mencapai angka 8.492 jiwa yang telah disajikan dalam gambaran umum Kecamatan Rubaru. Hal ini dapat dikatakan sangat mendukung adanya atau terlaksananya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Kondisi penduduk di Kecamatan Rubaru yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani menunjukkan adanya potensi dari segi penduduk di Kecamatan Rubaru. Sejauh ini, petani di Kecamatan Rubaru dinilai sangat ulet oleh Bapak “Sw” mengatakan:

“Yang paling menonjol, saya kan .. apaya...hampir semua penjurur Kabupaten Sumenep, saya pernah berdinias/bertugas, cuman kelebihan daripada petani Rubaru itu keuletannya. Uletnya dalam arti kata walaupun musim kemarau itu pake apa pompa mesin, pake selang-selang itu disiram dek, gituloh, tidak, kalau petani-petani lain kan tergantung pada satu komoditas, tembakau. Kalau disini ndak kan, cabe, timun, jadi dari sisi ekonomi, petani di Rubaru ini tidak akan pernah pupus, apa ya... kekurangan belanja untuk sehari-harilah. Itu uletnya yang saya temukan dari petani Rubaru” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Petani yang dinilai ulet ini, di Kecamatan Rubaru dikelompokkan dalam kelompok tani dengan tujuan agar dapat saling berkoordinasi dalam kelompok maupun PPL yang ada dalam proses kegiatan bertani. Berikut daftar kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru.

Tabel 29. Daftar Kelompok Tani Kecamatan Rubaru 2015

No	Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
				Sawah	Tegal	Pekarangan
1	Basoka	23	475	52,4	360	26,4
2	Mandala	32	709	38	589,2	61,5
3	Karangangka	16	339	38,5	254,3	39,1
4	Pakondang	20	435	41	356,8	49,1
5	Matanair	20	413	32,7	321,5	49,9
6	Tambak Sari	13	277	65	196,5	36
7	Banasare	26	577	57	186	31,5
8	Bunbarat	13	305	50	181,5	25,5
9	Kalebengan	8	135	15	99,5	12,8
10	Rubaru	23	477	57	343,5	36,7
11	Duko	6	170	18	129,5	20,1
<b>Total</b>		<b>200</b>	<b>4.337</b>	<b>464,4</b>	<b>3.018,3</b>	<b>389,6</b>

Sumber: UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru

Adanya kelompok tani dapat memberikan kemudahan jika terdapat suatu permasalahan maupun ingin adanya dukungan pemerintah daerah yang dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian, jika dilihat dari pandangan ketua kelompok tani mengenai petani atau masyarakat yang ada di Kecamatan Rubaru dalam pengembangan budidaya hortikultura, petani atau masyarakat di Kecamatan Rubaru pada umumnya sangat mendukung dengan adanya pengembangan budidaya hortikultura dilihat dari pemupukan yang diberikan oleh petani-petani disana, seperti petani disana lebih banyak menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang dalam menanam hortikultura. Seperti yang dilansir dari pernyataan Bapak “Sy” berikut ini.

Tidak ada keluhanlah dari masyarakat. Disini ya, apa ya, kesadaran masyarakat tinggi sekali, saking senengnya kalo kita punya kotoran sapi, urine sapi, terus kalo mau dituker pupuk kimia itu, itu gak mau, walaupun dituker banyak tetep gak mau. Kesadaran masyarakat itu ya mendukung dalam menanam terong, kacang panjang, timun, ya hortilah” (Hasil wawancara Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa petani di Kecamatan Rubaru dapat dilihat menjadi potensi dalam pengembangan budidaya hortikultura dari segi jumlah tenaga kerja dan kinerja petani dalam kegiatan usaha tani.

#### e. Pasar

Kabupaten Sumenep memiliki pasar utama yaitu pasar Anom yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat, terutama hasil pertanian komoditi hortikultura seperti bawang merah, mentimun, cabe rawit, dan sayuran lainnya yang berasal dari Kecamatan Rubaru. Menurut Bapak “He” mengatakan bahwa hampir 75% pemenuhan hortikultura khususnya bawang merah, cabe, mentimun, terong, kacang panjang dan sayuran lainnya untuk pasar lokal di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep berasal dari Kecamatan Rubaru (Hasil wawancara Jum’at, 29 April 2016 pukul 08.30 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep).

Keadaan pasar di Kabupaten Sumenep dalam penjualan produk pertanian komoditi hortikultura juga mengalami persaingan yang cukup ketat. Seperti halnya bawang merah yang dijual di pasar lokal tidak hanya bawang merah yang berasal dari kecamatan Rubaru, melainkan lebih banyak berasal dari Probolinggo.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak “Sy” yang mengatakan:

“Kebanyakan dari probolinggo, biasanya biru lancor, manjung karena bawangnya besar-besar dan warnanya bagus, kan sumenep ga bisa besar, ukuran paling besar ya kayak tutup botol, itupun ph tanahnya harus 6-7 kalo mau besar, memang kalo untuk rasa bawang merah Sumenep itu menang tapi kalo untuk di pasar kalah soalnya Ibu-ibu biasanya lebih milih yang besar” (Hasil wawancara Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

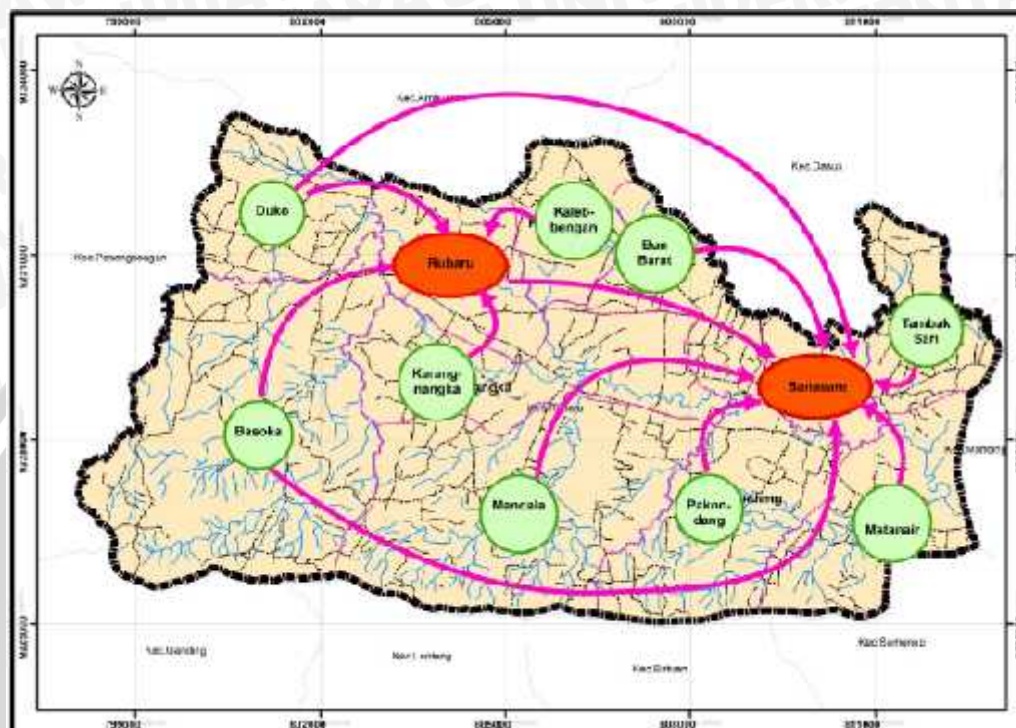
Hal tersebut juga ditekankan oleh Bapak Rs selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Promosi Agribisnis yang mengatakan bahwasanya dalam pasar yang ada di Kabupaten Sumenep juga terdapat produk pertanian komoditi hortikultura seperti bawang merah yang berasal dari daerah lainnya, seperti dari Kabupaten Pamekasan, dan Probolinggo. Kemudian, dengan adanya persaingan yang cukup ketat tersebut, Bapak “Sw” mengambil langkah strategis untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Sebagaimana hasil wawancara peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“begini, itu sangat berlaku hukum pasar, *supply* dan *demand* kan, jadi kayak sekarang biasanya beberapa tahun terakhir ini saya mencoba untuk menanam bawang dan tanam cabe diluar musim, artinya apa, dengan tujuan manakala petani-petani lain tidak berproduksi, Rubaru saya usahakan untuk beproduksi, kayak sekarang bawang merah harganya lumayan kan dek sekitar 35-40ribu di pasaran, sehingga harga di tingkat petani mencapai likuran dek,.. 22,24 ribu, bahkan, tanaman sayuran komoditas-komoditas sayuran kan termasuk fluktuaktif kan, kadang 1 minggu naik 3 hari turun, fluktuasinya tajam lah” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Adanya tindakan tersebut, maka petani di Kecamatan Rubaru memang mencoba melaksanakan penanaman komoditi hortikultura diluar musim agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar yang menjual hortikultura tersebut sekaligus mempertahankan perekonomian petani.

Sebenarnya terdapat juga pasar utama di Kecamatan Rubaru, yaitu pasar Banasare sebagai pusat sayuran yang didatangi para pengepul/tengkulak. Pasar Banasare ini menjadi pasar utama yang menjual hasil pertanian komoditi hortikultura yang dimulai sekitar pukul 02.00-08.00 WIB. Hal ini juga dibuktikan dalam pemetaan yang telah dilakukan untuk pemasaran hasil pertanian di

Kecamatan Rubaru, berikut ini merupakan gambar pemetaan pasar untuk pemasaran hasil pertanian di Kecamatan Rubaru.



Gambar 14. Peta Orientasi Pemasaran Hasil Pertanian  
 Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Pasar Banasare ini merupakan pasar utama yang menjual hasil pertanian dari desa-desa yang ada di Kecamatan Rubaru. selain itu, pasar Banasare yang memang sudah banyak dikenal oleh pengepul-pengepul yang akan menjual lagi hasil pertanian komoditi hortikultura, seperti bawang merah, cabe rawit, mentimun, maupun sayuran lainnya di pasar yang dituju oleh pengepul-pengepul tersebut. Para pengepul/tengkulak berdatangan untuk membeli hasil pertanian komoditi hortikultura dalam jumlah besar dan ada yang dibawa sampai keluar Kabupaten Sumenep. Adapun gambar pasar Banasare sesuai dengan hasil observasi peneliti berikut ini.



Gambar 15. Keadaan Pasar Banasare di Kecamatan Rubaru  
*Sumber: Pengamatan Peneliti, 2016*



Gambar 16. Kegiatan dalam Pasar  
*Sumber: Pengamatan Peneliti, 2016*

Dengan adanya pasar Banasare yang sudah terkenal dan diperhatikan oleh para pengepul/tengkulak sebagai tempat jual beli produk hortikultura, hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi para petani dalam menjual hasil pertanian mereka yang dapat dikatakan mereka tidak perlu jauh-jauh menjual hasil pertanian

mereka atau tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan pemasaran. Namun, dibalik keuntungan tersebut, terdapat kerugian yang dihadapi oleh kelompok tani di Kecamatan Rubaru. Seperti yang diteliti Bapak “Sy” bersama mahasiswa-mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu UGM. Menurut Bapak “Sy” yang mengatakan:

“kita itu mencari apa yang menjadi masalah dalam pemasaran bawang merah. Kita sampai cek pasar dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya, kita mencari kenapa sih bawang merah varietas Rubaru kok murah padahal kalo di Brebes, Bukit Tinggi bawang merah Sumenep itu lebih mahal.

Ketemu masalahnya itu dengan temen-temen UGM itu, ternyata pengepul bawang merah Sumenep itu nyampur itulah, yang besar taruh diluar, yang kecil taruh didalam. Sehingga anggapan konsumen yang ngambil bawang merah Sumenep memiliki pandangan negatif” (Hasil wawancara Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh kelompok tani adalah terkait pemasaran yang dilakukan oleh pengepul membuat para konsumen merasa kecewa akan hasil pertanian komoditi hortikultura khususnya bawang merah Kecamatan Rubaru. Hal tersebut menyebabkan harga dari petani kepada pengepul cukup murah dan membuat petani di Kecamatan Rubaru tidak mendapat untung yang cukup besar. Para petani pun merasa kecewa/tidak dihargai akan jerih payah dalam pengembangan budidaya hortikultura misal bawang merah varietas Rubaru dengan kualitas yang lebih baik yang dihargai sama dengan bawang merah asal daerah lainnya. Padahal, kualitas rasa bawang merah varietas Rubaru dinilai lebih baik sesuai dari pengakuan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep yang menuliskan dalam *websitenya* bahwa bawang merah varietas



Rubaru memiliki keunggulan dari segi rasa yang enak, gurih, renyah, serta aromanya yang harum dan kuat dan sesuai untuk bawang goreng. Selain itu, juga timbul akibat yang membuat nama bawang merah varietas Rubaru menjadi tercemar diantara para konsumen yang ada di wilayah Jawa Timur.

Disisi lain timbulnya permasalahan tersebut, masih terdapat celah dalam hal pemasaran diluar Jawa Timur karena memang diakui permintaan pasar akan bawang merah di luar Jawa Timur lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak “Sy”, yaitu:

“Kalau permintaan luar itu banyak lah, Coba kalo dipisah-pisahkan antara yang besar dan kecil bawangnya itu, pasti bisa mahal. Tapi itu kayaknya bisa di luar Jawa Timur bisa mahal. Kalo Jawa Timur persaingannya sangat ketat.

Di Jatim ada manjung, di Sby sendiri ada bauci, batu ijo, Bali Karet, kalo di Jatim itu pasti milih yang besar-besar.

Tapi kalo sudah diluar Jawa Timur, Jawa Tengahlah, Bukit Tinggi, bisalah. Soalnya ibu-ibu disana sudah mengerti rasanya, ya mungkin SDMnya mengertilah.

Katanya temen-temen UGM kemaren harga bawang merah Sumenep lebih mahal 10.000 dibanding yang lain kayak di Brebes, Kramat Jati, Bukit Tinggi” (Hasil wawancara Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Dari hasil wawancara tersebut, pemasaran untuk daerah Jawa Tengah dan Bukit Tinggi dapat membuat keuntungan yang lebih besar untuk para petani di Kecamatan Rubaru karena masyarakat disana lebih menghargai kualitas produk pertanian komoditi hortikultura dari Kecamatan Rubaru. Hal ini memang membuat para petani merasa lebih diuntungkan, namun disamping itu juga menyebabkan pemenuhan bawang merah di pasar lokal yang ada di Kabupaten Sumenep tidak terpenuhi. Menurut Ibu “Nn” yang tidak mau disebutkan namanya,

mengakui bahwa pemenuhan bawang merah di Kabupaten Sumenep tidak terpenuhi. Seperti yang dikutip dari pernyataan berikut.

“pemenuhan bawang merah di pasar lokal di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep itu sebenarnya bawang merah varietas Rubaru ini tidak memenuhi seluruh pasar, karena para petani dan pengepul lebih memilih menjual bawang merah mereka untuk dijual diluar Kabupaten Sumenep karena memiliki tingkatan harga yang berbeda karena di Kabupaten Sumenep dihargai akan kualitasnya” (Hasil wawancara Kamis, 28 April 2016 pukul 10.30 WIB di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memang hanya salah satu komoditas hortikultura yang menjadi permasalahan dari segi pemasaran. Sedangkan untuk komoditas hortikultura lainnya, misal: mentimun, terong, kacang panjang, tomat, dan sayuran lainnya sejauh ini berjalan apa adanya tanpa adanya keluhan.

## **2. Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) di Kecamatan Rubaru**

### **a. Tata Pemerintahan**

Tata pemerintahan dalam pengembangan budidaya hortikultura, yaitu merupakan peranan pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur kegiatan pengembangan tersebut. Pengembangan budidaya hortikultura yang dilaksanakan di Kecamatan Rubaru. Menurut Ibu “Hr” mengatakan bahwa:

“Tujuan dari adanya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sebagai kawasan agropolitan diharapkan dapat memiliki *multilevel effect* dari sisi ekonomi, seperti dalam hal pemasaran produk-produk hasil pertanian termasuk *off farmnya* atau pasca produksi, tidak hanya *on farmnya* yang dimanfaatkan, misal hasil mentimun, cabe rawit, dan bawang merah” (Hasil wawancara pada tanggal Selasa, 15 Maret 2016 pukul 09.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep)

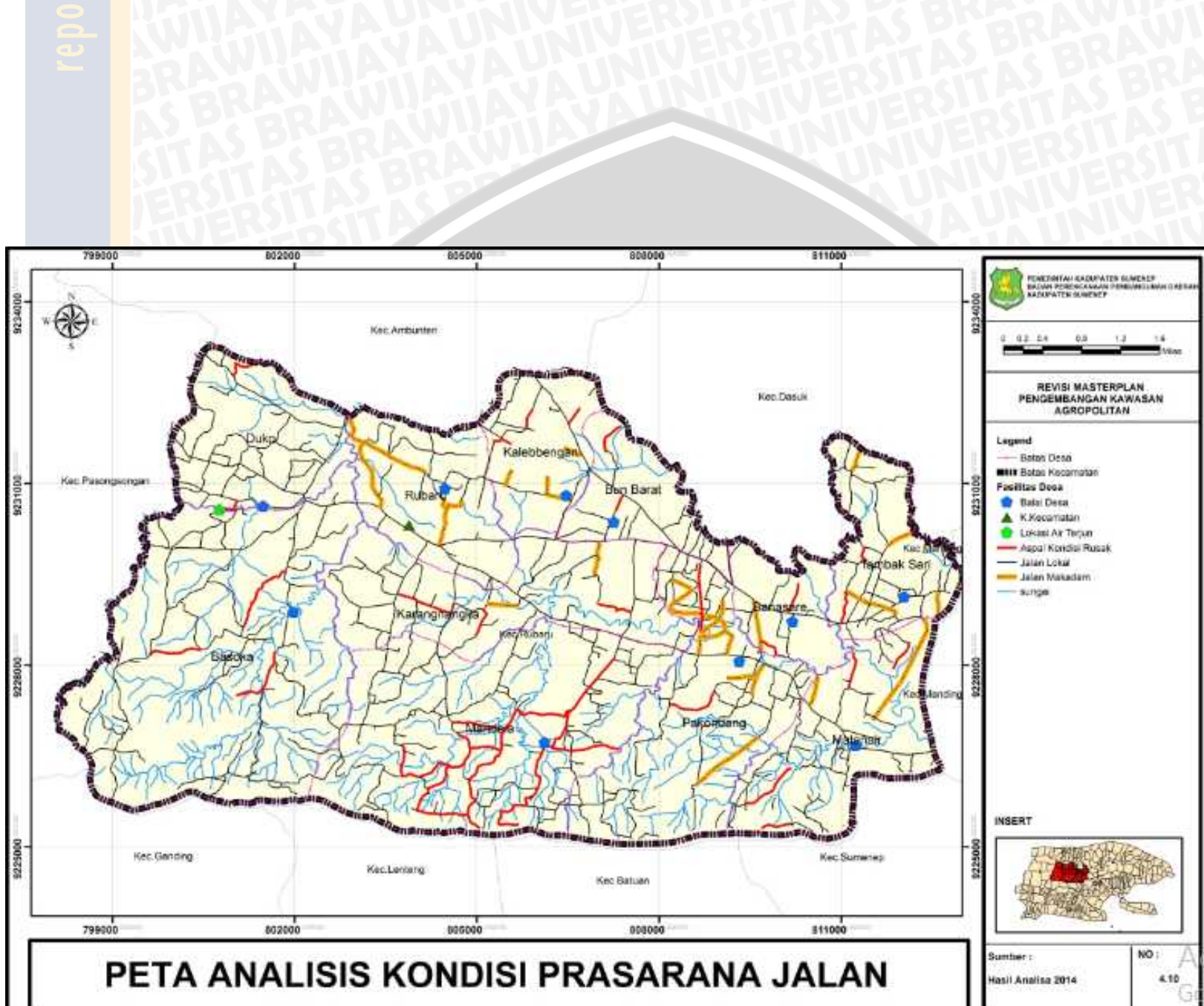
Tujuan tersebut merupakan suatu acuan dalam pengembangan budidaya hortikultura yang dapat meningkatkan perekonomian baik masyarakat maupun

pemerintah. Pelaksanaan dalam pengembangan budidaya hortikultura ini langsung dibawahahi oleh Dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumenep memiliki tugas dalam memfasilitasi proses terlaksananya pengembangan budidaya hortikultura, baik dari segi pelayanan, sarana, prasarana, maupun informasi. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak “Ms”, yaitu:

“Banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, utamanya kita e.. sekarang kan masyarakat untuk berusaha itu mudah, mulai dari modalnya, pengelolaan tanah yang sudah dicukupi. Sudah banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada Rubaru.

Dinas pertanian yang memenuhi bantuan untuk infrastruktur jalan usaha tani (JIDES) dan jalan-jalan yang mengarah pada lokasi sawah. Penyuluhan sudah dilakukan sejak dulu, akan tetapi yang dikembangkan itu terutama jalan usaha tani, JITUTnya, jaringan usaha tani dan JIDESnya yang sudah banyak dilakukan. Selain infrastruktur, ada fasilitas benih, alat penyemprot, roda tiga sebagai alat angkut, kereta dorong, termasuk juga mesin-mesin traktor” (Hasil wawancara pada hari Senin, 21 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, membuktikan adanya kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang memenuhi fasilitas dalam proses pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rubaru merupakan langkah pertama dalam pemberian fasilitas yang mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura. Adapun juga terdapat gambaran mengenai kondisi jalan pada tahun 2014 di Kecamatan Rubaru yang tertuang didalam hasil revisi *masterplan* pengembangan kawasan. Berikut ini merupakan pemetaan dari analisis kondisi prasarana jalan di Kecamatan Rubaru yang mendukung kegiatan pengembangan hortikultura.



Gambar 17. Peta Analisis Kondisi Prasarana Jalan  
 Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Kemudian, terdapat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang melaksanakan tugas secara langsung di lapangan dalam menangani petani atau kelompok tani di desa-desa Kecamatan Rubaru, baik dalam mengawasi program yang dilaksanakan maupun meningkatkan produktivitasnya.

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak “Sw”, yaitu:

“Gini, khususnya di Rubaru, Rubaru ini terkenal dengan sebutan Agropolitan. Sehingga dari dinas pertanian khususnya, ini tiap tahun bahkan kadangkala 1 tahun 2 kali, komoditas-komoditas sayuran seperti halnya bawang merah dan cabe rawit itu tiap tahun dipastikan ada bantuan dana pusat yang nilainya bukan cuma ratusan, milyar, itu untuk Kabupaten Sumenep tapi lebih dominan untuk Rubaru karena faktor SDAny dan lahan, prosentasenya lebih besar dari kecamatan-kecamatan lain karena program pengembangan kawasan. Bantuan cabe rawit 75 ha, bawang merah 65ha, bantuan dari APBN itu berupa uang tapi nyampeknnya ke petani berupa barang, seperti: benih, bibit, sarana produksi lainnya: pupuk, peptisida, sanyo/pompa air” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Selain bantuan berupa fasilitas sarana prasarana dalam pengembangan budidaya hortikultura, terdapat juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan. Sebagaimana yang dilansir dari hasil wawancara dengan Bapak “Sw” yang lebih mengetahui pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, yaitu:

“Dari segi pembangunan SDM, disini ada yang namanya SLGAP (Sekolah Lapang *Good Agriculture Processing*).

Itu setiap tahun setiap ada program seperti itu, itu ada pelatihan, sekolah lapanglah, ada kelompok petani, ada instruktur bahkan ada yang dari BPTP Malang sebagai penyaji. Kelas yang diikuti oleh perwakilan kelompok yang diutus oleh kelompok petani., tidak semua anggota ikut sekolah lapang.

Tiap tahun pasti ada pembelajaran bagaimana teknologi yang bener gituloh... Pelaksanaan pembelajaran ini setiap tahun sekali kalo bersifat bantuan, tapi kalau dari kita penyuluhan-penyuluhan setiap saat ada dek..,

paling tidak setiap setengah bulan kita ada pertemuan rutin dengan kelompok tani, ya PPL-PPL itu yang turun memberikan inovasi motivasi. Kalau yang bersifat program pemberdayaan ya itu, pelatihan-pelatihan kita kirim medali, ada ke nganjuk bagaimana teknik budidaya, termasuk pasca panennya.

Hari ini (21/03) dari Rubaru kita mengirimkan 2 kelompok wanita tani (KWT) untuk pelatihan di pendopo, yaitu yang pertama caranya pengolahan bawang merah, ada satunya lagi keripik singkong” (Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Pembangunan SDM dilakukan jika terdapat suatu program yang diberikan oleh pemerintah. SLGAP yang merupakan suatu program pemberdayaan dengan kegiatan yang terdapat instruktur yang memberikan pengetahuan-pengetahuan atau informasi kepada para petani terkait pertanian mulai dari teknik-teknik budidaya sampai pasca panennya. Sesuai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti dapat melihat bahwa SLGAP yang merupakan program pemberdayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian di Kecamatan Rubaru yang dinilai tidak optimal. Penilaian ini berdasarkan sisi pelaksanaannya yang memang hanya mengikutsertakan beberapa perwakilan kelompok tani saja dan itupun bagi kelompok tani yang berbadan hukum dan memiliki hubungan ‘dekat’ dengan pihak UPT.Pertanian Kecamatan Rubaru. Pemilihan peserta yang didasarkan atas perhatian tertentu atau terkesan ‘pilih kasih’ dari pihak pemerintah ini menimbulkan petani yang kurang mengetahui perkembangan dalam dunia pertanian tidak mengalami perubahan atau tidak ada kesetaraan pengetahuan akan informasi dan inovasi terkini mengenai pertanian/kegiatan usaha tani. Hal ini dapat dilihat dari adanya petani yang mengalami permasalahan, salah satunya yaitu mengenai tanaman yang terserang penyakit/hama. Petani yang mengalami hal tersebut tidak mengetahui langkah penyelesaian yang tepat dan akhirnya

membiarkan begitu saja sesuai dengan pernyataan Bapak “St” mengalami permasalahan tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut tidak optimal dengan tidak tersalurkannya pemberdayaan secara merata kepada seluruh petani yang ada di Kecamatan Rubaru yang dapat menunjang kegiatan usaha tani.

Terdapat juga pelatihan yang diberikan juga berasal dari kabupaten lain, disini pihak UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru mengirimkan perwakilan kelompok tani untuk melakukan pelatihan di daerah tersebut untuk menambah wawasan maupun pengalaman. Sama halnya dengan penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan ini juga hanya pada orang tertentu saja dan ‘orang itu-itu saja’ yang mendapatkan adanya kegiatan tersebut. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah disini atau lebih tepatnya pihak UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru memberikan perhatian khusus hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dan observasi di lapangan kepada semua narasumber dan hasilnya memang mengarah pada salah satu perwakilan kelompok tani di Kecamatan Rubaru lebih paham dan mengerti semua tentang adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan daripada kelompok tani lainnya.

Kemudian, menurut Bapak Sw selaku Kepala UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru, pembangunan SDM juga dilakukan oleh UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru yang mana dilakukan oleh PPL kepada para petani sangat membantu para petani dalam proses kegiatan bertani, seperti halnya dalam hal pengendalian hama. Seperti pernyataan diatas, membuktikan bahwa kinerja PPL sangat responsif kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk memberikan

inovasi, motivasi, maupun informasi terkait pengembangan budidaya hortikultura. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pernyataan dari Bapak “Sy” yang mengatakan

“UPT Pertanian Kecamatan Rubaru dan PPL itu sudah bagus dalam membantu petani sekarang. Seperti kalo dihubungi para petani itu ya karena ada masalah, mereka siap membantu dan kadangkala langsung datang walaupun itu hari minggu (bukan hari kerja). Sekarang petani disini sudah bisa mengetahui bagaimana cara menanggulangi penyakit tanaman maupun hama-hama yang dapat merusak hasil pertanian, seperti lalat buah yang biasanya menyerang cabe” (Hasil wawancara pada hari Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kinerja PPL dan UPT.Pertanian Kecamatan Rubaru dirasakan baik kepada kelompok tani yang berada di Desa Bunbarat ini, seperti kelompok tani “A” dan “B” sesuai dari hasil observasi dan wawancara peneliti. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hanya kepada kelompok tani tertentu saja yang mendapat perhatian dari pihak pemerintah karena menurut Bapak “St” dan Ibu “Si” yang berasal dari desa Mandala dan desa Karangnangka sebagai anggota kelompok tani, mereka tidak merasakan adanya peran dari pihak PPL dalam menyalurkan informasi dan inovasi maupun pengetahuan tentang kegiatan usaha tani.

Berbagai pendapat mengenai kinerja pemerintah ini juga dapat dibuktikan dengan adanya pemberitaan mengenai jumlah PPL di Kecamatan Rubaru. Seperti cuplikan berita berikut ini.

**Newsmadura.com Sumenep**– Anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mendesak dinas pertanian dan tanaman pangan (Disperta) untuk melakukan penambahan tenaga penyuluh pertanian. Sebab dari 328 Desa hanya diberi 167 tenaga penyuluh pertanian, padahal idealnya satu desa ditangani oleh satu penyuluh.

“Seharusnya satu desa itu ditangani oleh satu penyuluh pertanian, bukan malah satu penyuluh menangani 3 hingga 4 Desa. Sehingga penyuluhannya



kurang maksimal dan tidak mungkin mereka bisa mencakup semuanya,” kata Nurus Salam Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sabtu (5/3/2016).  
(sumber: *Newsmadura*, 2016)

Seperti berita diatas, di Kecamatan Rubaru faktor jumlah PPL juga mempengaruhi kinerja dari pemerintah. Menurut Bapak As sebagai Kepala Seksi Penyuluhan, di Kecamatan Rubaru terdapat 5 (lima) orang PPL dan 1 (satu) orang UPT yang menangani pertanian di seluruh desa kawasan kecamatan Rubaru. Adanya perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah petani dengan memiliki lahan yang luas di 11 (sebelas) desa Kecamatan Rubaru dengan jumlah penyuluh pertanian lapang menimbulkan kinerja penyuluh dinilai tidak optimal di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan-penjelasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesetaraan dalam mengetahui informasi maupun inovasi bagi petani dalam kegiatan usaha tani belum tercapai.

Selain itu, terdapat juga permasalahan dari adanya peran pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura, yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak “Sy”, yaitu:

“Kalo upaya pemerintah baguslah, tapi kekurangannya ya pengawalannya itu, misal ya kalo dapat bantuan benih itu, kan sebenarnya harus di awasi, apakah benihnya benar-benar dengan dimanfaatkan. Ya tapi gak ada pengawalan, ya penggunaannya kurang maksimal lah, ada yang dijual. Ya gitulah...” (Hasil wawancara pada hari Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

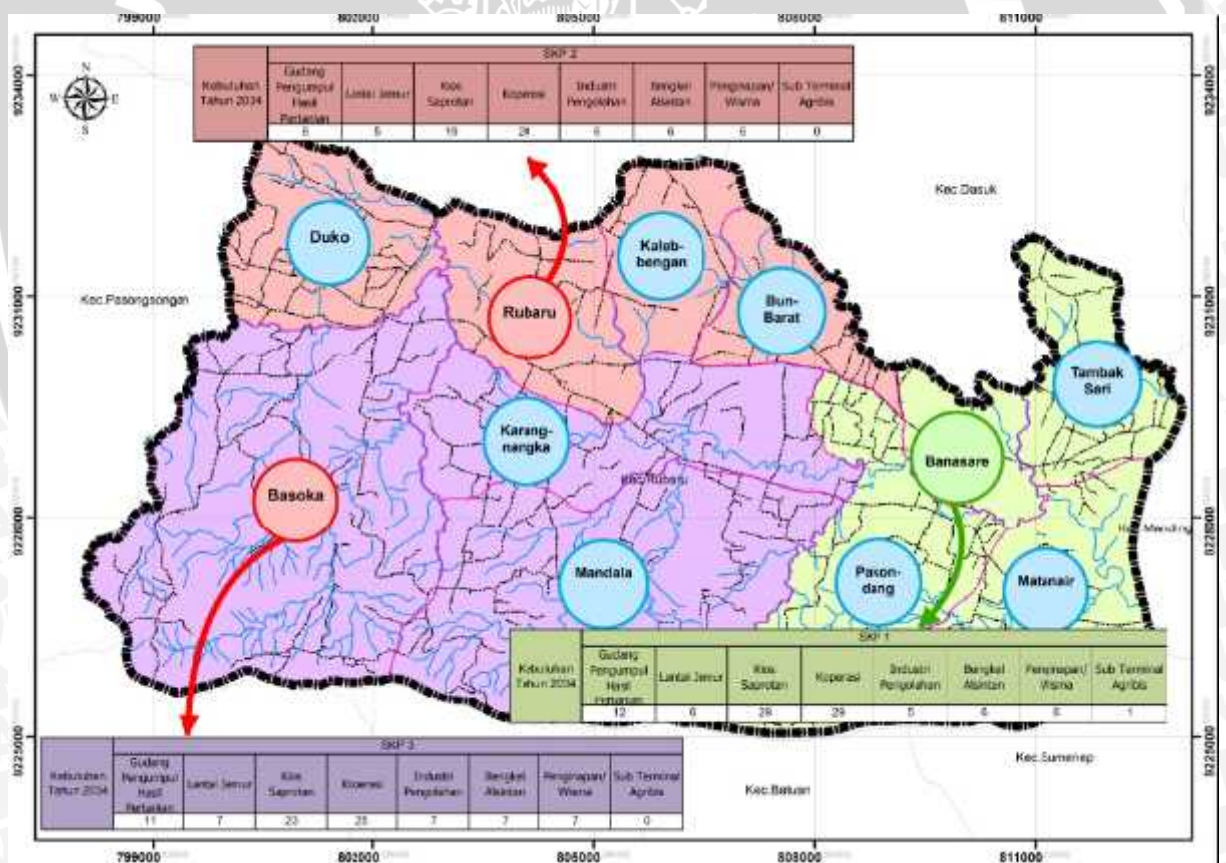
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai dinas terkait dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru memiliki kelemahan dalam prosesnya, yaitu:

1. Pelaksanaan dalam pengelolaan SDA dan SDM kurang optimal

2. jumlah PPL yang memiliki perbandingan yang tidak seimbang dengan jumlah petani atau kelompok tani yang terdapat di 11 desa Kecamatan Rubaru.
3. tidak ada koordinasi dengan dinas lainnya dalam pengelolaan SDA maupun SDM

#### b. Proses Manajemen

Proses manajemen dalam pengembangan budidaya hortikultura tidak terlepas dari adanya usaha yang menunjang dalam pencapaian tujuan secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok tani itu sendiri di Kecamatan Rubaru. Berikut merupakan pemetaan dari sarana penunjang.



Gambar 18. Peta Analisis Sarana Penunjang Pengembangan  
 Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Berdasarkan hasil kajian dalam revisi *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan (2014), telah dilakukan pemetaan dalam menunjang kegiatan pengembangan seperti gambar diatas. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya yang mendukung dalam pengembangan budidaya hortikultura. Berikut ini merupakan pemetaan dari setiap desa yang ditunjang dengan sarana pendukung kegiatan pengembangan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru yang ditunjang dapat dilihat dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir, yaitu.

#### 1) **Subsistem Agribisnis Hulu**

Subsistem agribisnis ini meliputi sarana produksi (pupuk, obat-obatan, benih/bibit) dan alat dan mesin pertanian (alsintan). Salah satu upaya dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura, yaitu mengenai usaha penyediaan bibit tanaman dapat dilihat dari perkembangan industri pembibitan/perbenihan di Kecamatan Rubaru. Sejauh ini penyediaan bibit yang diproduksi sendiri hanya untuk konsumsi sendiri dan itupun masih belum terdapat di seluruh desa. Di kecamatan Rubaru terdapat kelompok tani dan masyarakat yang memproduksi benih/bibit, yaitu di Desa Matanair, banasare, Rubaru, dan Bunbarat.

Berikut merupakan kondisi subsistem agribisnis hulu yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, yaitu adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Kondisi Subsistem Agribisnis Hulu Kecamatan Rubaru

No	Subsistem Agribisnis Hulu	Rencana Pengembangan	Ket
1	Industri perbenihan/pembibitan	a. Pemberian informasi benih terbaru dengan kualitas dan harga yang terjangkau dari PPL kepada petani	<b>Terlaksana</b> Hanya segelintir petani yang mengetahui karena penyebaran informasi tersebut hanya kepada beberapa ketua kelompok tani saja dan kurang terealisasi dengan baik.
		b. penyediaan benih tanaman pada Koperasi Unit Desa (KUD)	<b>Belum terlaksana</b>
		c. pengoptimalan fungsi dan penambahan kios pertanian dalam penyediaan benih/bibit tanaman	<b>Terlaksana</b> Namun, sampai saat ini belum optimal karena hanya tersedia di desa-desa tertentu saja.
		d. peningkatan kemampuan petani dalam memproduksi benih/bibit lokal berkualitas melalui kegiatan pelatihan dan studi banding sesuai dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan	<b>Terlaksana</b> Terdapat perwakilan kelompok tani yang melakukan studi banding sampai keluar kota/kabupaten sesuai dengan program yang ada.
		e. peningkatan produksi benih/bibit lokal melalui perkuatan Kebun Bibit Desa (KBD), sehingga mampu untuk memenuhi bibit secara mandiri serta mampu untuk menjual bibit keluar daerah	<b>Belum Terlaksana</b>
		f. mendirikan balai benih dan bibit di Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru	<b>Belum Terlaksana</b>
2	Industri Agrokimia (pupuk, peptisida)	a. peningkatan kemampuan petani melalui kegiatan pelatihan dan studi banding dalam memproduksi pupuk organik berkualitas sesuai dengan ketersediaan bahan baku lokal	<b>Terlaksana</b> Terdapat perwakilan kelompok tani yang melakukan studi banding sampai ke Tulungagung, Lumajang, Malang, Batu, dan Probolinggo.
		b. peningkatan produksi pupuk organik, sehingga mampu untuk memenuhi pupuk secara mandiri serta mampu untuk menjual pupuk keluar daerah	<b>Terlaksana</b> Namun, sejauh ini belum mampu menjual pupuk untuk keluar daerah.

No	Subsistem Agribisnis Hulu	Rencana Pengembangan	Ket
3	Industri mesin dan peralatan pertanian	a. pengadaan alat-alat pertanian modern yang mempermudah dalam proses pengolahan tanah dan tanaman	<b>Terlaksana</b> Namun tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian modern dari pemerintah.
		b. mengoptimalkan industri peralatan pertanian tradisional melalui peningkatan skill pengrajin alat pertanian tradisional melalui kegiatan pelatihan dan studi banding serta memberikan bantuan peralatan dan permodalan untuk pengrajin	<b>Terlaksana</b> Sejauh ini, industri alat pertanian tradisional seperti cangkul dan sabit, antara lain khususnya berada di Desa Mandala dan Rubaru.
4	Kios dan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian	a. Optimalisasi kios dan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian yang telah ada	<b>Terlaksana</b> Terdapat gudang dan toko sarana produksi pertanian yang berada di Desa karangnangka, Banasare, Duko, dan Basoka
		b. pembangunan kios dan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian yang baru dalam rangka pemerataan pelayanan penyediaan sarana produksi pertanian kepada petani	<b>Belum Terlaksana</b>
		c. pembangunan fasilitas penunjang lainnya	<b>Belum Terlaksana</b>

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, salah satu desa yang memproduksi bibit atau benih sendiri, yaitu berada di Desa Bunbarat.



Gambar 19. Kebun Bibit Desa, Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru

Sumber: Pengamatan Peneliti, 2016

Kemudian, ketersediaan sarana produksi seperti pupuk kimia dengan jenis urea, SP 36, ZA, ponska maupun pupuk organik dan peptisida juga tersedia di kios-kios maupun toko. Terdapat 10 (sepuluh) kios resmi pupuk bersubsidi di Kecamatan Rubaru guna memenuhi kebutuhan pupuk untuk para petani. Pupuk bersubsidi ini berfungsi untuk meringankan biaya produksi dalam kegiatan usaha tani bagi petani yang ada di Kecamatan Rubaru. adapun daftar kios resmi yang menyediakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Rubaru, yaitu adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Daftar Kios Resmi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Rubaru 2015

No	Nama Kios	Alamat Kios	Desa Cakupan
1	UD Al-Barokah	Desa Pakondang	Desa Karangnangka
2	Toko Andika Wangi Toko Rukun Makmur	Desa Banasare Desa Banasare	Desa Banasare Desa Matanair
3	Toko Bazoka	Desa Basoka	Desa Basoka
4	Toko H. Masyhuri	Desa Rubaru	Desa Rubaru Desa Basoka
5	Toko Hadid Wijaya Fitri	Desa Bunbarat	Desa Bunbarat Desa Kalebengan
6	UD Makmur	Desa Tambak Sari	Desa Tambaksari
7	Toko Makmur Abadi	Desa Banasare	Desa Pakondang
8	Toko Barokah	Desa Banasare	Desa Mandala
9	UD Melati	Desa Duko	Desa Duko

Sumber: UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru, 2015

Menurut keterangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, pendistribusian pupuk bersubsidi kepada Kecamatan Rubaru berdasarkan atas kebutuhan kelompok tani.

Namun, dibalik itu semua terdapat suatu pemberitaan, yaitu:

“Kabupaten Sumenep tahun ini, hanya mendapat jatah pupuk bersubsidi sebanyak 26.000 ton, dari pengajuan 43.000 ton. Sehingga kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam tahun 2016, sudah terbayang. “Pada tahun ini Disperta Sumenep mengusulkan pupuk bersubsidi sebanyak 43.000 ton, kepada pemerintah pusat. Tapi yang disetujui hanya 26.000 ton,” kata Qurratul Aini, Kabid Sumber Daya dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Disperta) Kabupaten Sumenep, Sabtu (23/1/2016). Padahal, kuota pupuk bersubsidi yang diajukan Disperta Sumenep, sudah sesuai usulan kelompok tani, yang tertuang dalam Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Untuk diketahui, sejak empat tahun terakhir kuota pupuk di lingkungan Pemerintah yang berada diujung timur pulau Madura tidak sesuai dengan

kebutuhan petani. Tahun 2014 Pemerintah Daerah mengusulkan sebanyak 40.000 ton pupuk namun yang disetujui sebanyak 21.719 ton. Jumlah tersebut ada pengurangan dari tahun sebelumnya sebanyak sekitar 3.285 ton dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebanyak 25.000 ton. Peristiwa yang sama kembali terjadi pada tahun 2015, yang diajukan sebanyak 41 hektare namun yang disetujui hanya 24.000 ton dengan luas areal 25.185 hektare. Kemudian pada tahun 2016 Sumenep hanya mendapatkan jatah Pupuk Bersubsidi jenis Urea sebanyak 26.000 ton dari yang diusulkan sebanyak 43.000 ton.  
(Sumber: *newsmadura*, 2016)

Berita diatas menunjukkan bahwa sebenarnya pendistribusian pupuk bersubsidi tidak memenuhi semua kebutuhan kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru, tergantung pada pemberian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Seperti penyediaan pupuk bersubsidi untuk tahun 2016 yangmana hanya mendapat 50% saja, disitu kabupaten Sumenep berperan dalam mempertanggungjawabkan tugasnya dalam pemenuhan pupuk bagi petani khususnya di Kecamatan Rubaru. Sesuai dari hasil observasi dan wawancara peneliti, memang Dinas Pertanian Tanaman Pangan khususnya UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru lebih mengarahkan petani untuk lebih menggunakan pupuk organik dalam proses kegiatan tani mereka. Namun, hal ini masih dalam proses perubahan bagi petani karena rata-rata petani di Kecamatan Rubaru masih belum bisa terlepas dari adanya pupuk kimia dalam proses kegiatan usaha tani mereka, belum bisa untuk menggunakan pupuk organik seutuhnya. Hampir seluruh petani di Kecamatan Rubaru menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik dengan perbandingan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan untuk tanaman yang mereka tanam.

Selain itu, dari hasil observasi dan wawancara peneliti, juga masih dapat dilihat permasalahan yang timbul dalam pengadaan alat dan mesin pertanian, yaitu:

anggota dari kelompok tani yang mendapatkan bantuan fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern tidak merasakan dan tidak menikmati, bahkan ada yang tidak mengetahui adanya bantuan alat dan mesin pertanian untuk kegiatan usaha tani mereka. Anggota kelompok tani di Kecamatan Rubaru kebanyakan masih menggunakan alat pertanian yang tradisional dalam melaksanakan kegiatan usaha tani mereka, seperti menggunakan cangkul, arit, alat pengangkut dari kayu, alat pikul untuk membawa air, dan sapi untuk membajak. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari hasil wawancara pada hari Sabtu, 30 April 2016 pukul 09.47 WIB dengan anggota kelompok tani, yaitu Bapak “St” dan Ibu “Si” yang tidak begitu mengetahui adanya bantuan fasilitas berupa alat dan mesin pertanian modern yang berikan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut juga disertai dengan pernyataan dari Bapak “St” berikut ini.

*“sobung, perak katoa se olle odong-odong tape e juel”* (hasil wawancara pada hari Sabtu, 30 April 2016 pukul 09.47 WIB di tempat peristirahatan diantara bentangan sawah)

Artinya beliau sebagai anggota kelompok tani mengetahui bahwa ketua dari kelompok tani “A” mendapatkan bantuan fasilitas berupa motor viar yang sebenarnya dapat digunakan sebagai alat angkut hasil produksi pertanian, namun dijual, tidak digunakan secara bersama untuk kepentingan dalam kelompok. Penyelewengan yang terjadi ini terjadi karena kurangnya pengawalan pada saat pendistribusian dan pengawasan selanjutnya dalam kegiatan usaha tani. Sehingga, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam proses manajemen pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dari segi subsistem agribisnis hulu



masih belum terlaksana dengan maksimal dengan dibuktikan terdapatnya permasalahan berikut ini.

- a. terbatasnya atau tidak tersedianya sarana dan prasana yang mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura, seperti: alat panen, alat dan mesin pertanian.
- b. terbatasnya SDM yang menerima fasilitas, baik itu sarana prasarana maupun pembelajaran yang mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura.
- c. ketidaktegasan pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.
- d. tidak ada pengawalan maupun pengawasan dalam pendistribusian dan penggunaan sarana dan prasarana.

## 2) **Subsistem Agribisnis Hilir**

Subsistem agribisnis hilir meliputi kegiatan industri makanan dan industri minuman yang berbasis komoditi pertanian, industri biofarma dan industri agrowisata. Adapun prasarana dan sarana penunjang subsistem agribisnis hilir dapat berupa tempat penjemuran hasil pertanian, gudang penyimpanan yang dilengkapi sarana pengawetan/pendinginan dan packing house. Kondisi subsistem agribisnis hilir di Kecamatan Rubaru sesuai dengan tabel dibawah ini menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan rencana pengembangan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep tercapai/terlaksana.

Di Kecamatan Rubaru saat ini sudah ada industri makanan dan minuman berbasis komoditi pertanian khususnya hortikultura, yaitu seperti: Bawang goreng, sirup tomat, kopi laos walaupun tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Berikut ini

merupakan kondisi tahapan dalam subsistem agribisnis hilir yang dapat mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Tabel 33. Kondisi Subsistem Agribisnis Hilir Kecamatan Rubaru 2015

No	Subsistem Agribisnis Hilir	Rencana Pengembangan	Ket
1	Industri makanan dan minuman berbasis komoditi pertanian	a. melakukan pengkajian dan penelitian melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain yang berkompeten untuk pengembangan hasil olahan komoditas unggulan Kecamatan Rubaru	<b>Terlaksana</b>
		b. Memberikan pelatihan serta studi banding kepada masyarakat petani, untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah dan memasarkan produk makanan dan minuman berbahan baku komoditi pertanian yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani	<b>Terlaksana</b> Namun tidak semua petani mendapatkan pelatihan, hanya beberapa kelompok wanita tani saja yang mendapatkan
		c. memberikan bantuan permodalan dan peralatan dalam pengolahan hasil pertanian untuk menambah nilai tambah bagi petani	<b>Terlaksana</b> Namun untuk bantuan permodalan berupa uang tidak ada, yang ada hanya peralatan dan dinilai kurang memadai dan terbatas
		d. mempromosikan dan menjalin kerjasama dengan investor untuk pengembangan pengolahan hasil pertanian baik dalam skala menengah dan besar, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian baru	<b>Belum Terlaksana</b>
		e. menjalankan strategi pemasaran hasil pertanian yang tepat melalui pembentukan jaringan pemasaran, baik didalam perkotaan Sumenep serta di luar Kabupaten	<b>Belum Terlaksana</b>
2	Industri Biofarma	Melakukan pengkajian dan penelitian melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga yang berkompeten untuk pengembangan jamu/herbal	<b>Terlaksana</b> Namun, saat ini belum ada industri biofarma
3	Industri agrowisata	a. mengoptimalkan potensi yang dapat dikembangkan sebagai agrowisata, misal: kebun kelengkeng di Desa Rubaru serta keberadaan air terjun di desa Duko yang dapat menjadi kesatuan paket wisata	<b>Belum Terlaksana</b>
		b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agrowisata	<b>Belum Terlaksana</b>
		c. mempromosikan potensi agrowisata yang ada di Kecamatan Rubaru	<b>Belum Terlaksana</b>

No	Subsistem Agribisnis Hilir	Rencana Pengembangan	Ket
4	Gudang penyimpanan hasil pertanian	a. optimalisasi kios dan gudang penyimpanan hasil pertanian yang telah ada	<b>Terlaksana</b> Di Kecamatan Rubaru saat ini sudah ada gudang penyimpanan hasil pertanian, yaitu hanya berada di Desa Karangnangka, Pakondang, Matanair, Banasare, Rubaru, dan Duko
		b. pembangunan kios dan gudang penyimpanan hasil pertanian yang baru, dalam rangka menjaga kualitas hasil pertanian masyarakat petani	<b>Terlaksana</b>
5	Sarana pengolahan hasil pertanian	Pengembangan packing house (untuk tempat sortasi dan pengepakan) sebagai fasilitas penunjang dari gudang penyimpanan hasil pertanian yang bersifat <i>integrated</i>	<b>Belum Terlaksana</b> Di Kecamatan Rubaru saat ini belum ada packing house untuk tempat sortasi dan pengepakan

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Tahapan dalam subsistem agribisnis hilir ini, menunjukkan bahwa dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura dilakukan pemanfaatan terhadap hasil pertanian komoditi hortikultura menjadi suatu olahan yang memiliki nilai jual. Sebagaimana dari hasil observasi dan wawancara didapat pernyataan dari Bapak “Sy” yang mengatakan:

“disini ya... sudah ada olahan dari hasil pertanian khususnya hortikultura yang dikerjakan kelompok wanita tani (KWT), seperti bawang goreng, sirup tomat, kopi laos, dodol temuireng, cuman disini itu yang kekurangannya dari segi pemasaran terus itu bungkusnya juga. Seperti bawang goreng, kan.. sebenarnya bawang goreng enakya disajikan renyah, cuman kalo dibungkus wadah biasa atau sekedar bungkus plastik secara sederhana kan kadang cuma bertahan paling lama 5 harilah renyahnya itu. Terus pemasarannya itu ya, kan kita nyoba jual di gerai oleh-oleh Sumenep yang depannya pasar itu, nah masalahnya adalah mereka itu gak mau bayar pas kita naruh barang disana, mereka maunya kalo udah habis baru mau kita, jadinya kalo gitu kan KWT gak bisa produksi lagi karna gak ada pemasukan. Selain itu, juga takutlah yang mau minjem modal takut rugi” (Hasil wawancara pada hari Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy).

Kekecewaan yang dirasakan kelompok tani maupun kelompok wanita tani dapat dilihat dari hasil wawancara diatas. Dalam hal pemasaran atau penjualan produk hasil olahan pertanian menurut hasil observasi, kelompok tani hanya menjual produk hasil olahan pertanian tersebut hanya dikawasan Kecamatan Rubaru dengan sistem jika ada yang melakukan pemesanan baru diproduksi atau dibuat. Kemudian, disini juga terlihat belum adanya sentuhan pemerintah, seperti Disperindag turut campur terhadap penjualan produk hasil olahan pertanian tersebut sesuai dengan harapan kelompok tani. Berikut merupakan inovasi dalam mengolah hasil pertanian, yaitu:



Gambar 20. Hasil Olahan Pertanian Kecamatan Rubaru  
 Sumber: Pengamatan Peneliti 2016

Keterangan:

Tabel 34. Daftar Produk Hasil Olahan Pertanian Kecamatan Rubaru

No	Nama Kelompok	Desa	Produk
1	KWT Sare Taman	Matanair	Kopi Laos
2	KWT Melati	Bunbarat	Bawang goreng

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Sehingga, dengan adanya usaha yang dilakukan oleh kelompok tani dalam mengolah hasil pertanian ini sudah baik namun belum optimal karena kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan

produk pertanian hasil olahan pertanian, baik dari segi permodalan dan bantuan maupun pemasaran, serta dukungan lainnya yang dibutuhkan.

### 3) Subsistem Agribisnis Usaha Tani

Subsistem agribisnis usaha tani meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang berupa penyediaan air baku untuk meningkatkan produksi. Berikut merupakan kondisi subsistem agribisnis usaha tani di Kecamatan Rubaru, yaitu.

Tabel 35. Kondisi Subsistem Agribisnis Usaha Tani Kecamatan Rubaru

No	Subsistem Agribisnis Usaha Tani	Rencana Pengembangan	Ket
1	Pengolahan tanah	a. pengenalan teknologi pengolahan tanah dan pemupukan yang efektif dan efisien, serta memperhatikan daya dukung lingkungan disekitarnya	<b>Terlaksana</b> Hanya pada beberapa kelompok tani saja
		b. mengoptimalkan peran PPL dalam memberikan penyuluhan terkait pengolahan tanah dan pemupukan serta produksi pertanian secara umum	<b>Terlaksana</b> Namun, belum optimal karena jumlah PPL yang kurang memadai untuk petani di Kecamatan Rubaru
2	Sistem Irigasi	a. pengembangan jaringan irigasi air tanah (JIAT), mengingat di wilayah perencanaan air permukaan sungai dengan debit yang besar terbatas	<b>Terlaksana</b> Namun, belum optimal karena tidak semua kelompok tani/ petani memiliki pompa air.
		b. pembentukan kelompok petani yang berhak mengoperasikan, memakai serta memiliki kewajiban untuk memelihara ( <i>operational and maintenance</i> ) JIAT yang telah dikembangkan	<b>Terlaksana</b>
3	Ketersediaan air bersih	Pengembangan sistem perpipaan untuk optimalisasi pelayanan air bersih	<b>Belum Terlaksana</b> Air bersih di wilayah perencanaan bersumber dari sumur

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Sebagian besar rencana pengembangan subsistem agribisnis usaha tani di Kecamatan Rubaru seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terlaksana namun tidak optimal. Seperti dalam penjelasan di sub

fokus tata pemerintahan yang menerangkan mengenai perbandingan tidak seimbang antara jumlah PPL dengan kelompok petani maupun petani. Ketidakseimbangan jumlah tersebut menimbulkan tindakan PPL dalam pengenalan teknologi maupun sampai mengembangkan jaringan irigasi hanya terbatas pada kelompok tani tertentu saja yang berbadan hukum, dan bahkan tidak sama sekali kepada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Selain faktor dari adanya peran PPL, faktor pemenuhan teknologi dalam kegiatan usaha tani yang tidak merata atau terbatas kepada beberapa kelompok tani saja menjadi hambatan dalam pengenalan teknologi pertanian maupun pengembangan jaringan irigasi.

Sistem Irigasi yang ada saat ini di Kecamatan Rubaru, kebanyakan adalah sistem irigasi konvensional, yaitu menyiram tanaman dengan mengambil air dari sumur dan ada pula yang ditampung dengan terpal yang bersifat non permanen.



Gambar 21. Tempat Penampungan Air Non Permanen untuk Pengairan  
*Sumber: Pengamatan Peneliti, 2016*

Tempat penampungan seperti gambar diatas merupakan tempat penampungan air untuk menyirami tanaman petani secara konvensional. Dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, sejauh ini masing-masing kelompok tani menggunakan sumur untuk menyirami tanaman yang dipanen. Kebanyakan

petani juga menggunakan tadah hujan untuk memenuhi air ke tanaman yang mereka tanam seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas. Petani yang memiliki sebidang tanah yang terletak jauh dari sumber air akan membuat tempat penampungan seperti gambar diatas. Sehingga, pada subsistem agribisnis usaha tani ini masih terdapat masalah yang timbul, yaitu: sistem pengairan yang belum baik, sebagian besar lahan hortikultura masih tergantung hujan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya fasilitas sarana pompa dan kondisi Kecamatan Rubaru yang berada di dataran tinggi yang dinilai susah akan air.

#### 4) Subsistem Agribisnis Usaha Penunjang

Berikut merupakan kondisi subsistem agribisnis usaha penunjang di Kecamatan Rubaru, yaitu.

Tabel 36. Kondisi Subsistem Agribisnis Usaha Penunjang Kecamatan Rubaru

No	Subsistem Agribisnis Usaha Penunjang	Rencana Pengembangan	Ket
1	Sarana Pelayanan Umum	a. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan penunjang untuk mendukung kegiatan pertanian	<b>Terlaksana</b>
		b. Pendirian Bank atau lembaga keuangan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan petani	<b>Terlaksana</b> Namun, masih dalam skala kecil, yaitu hanya ada pada Gapoktan berupa uang kas yang hanya bisa membantu kelompok tani yang tergabung
		c. Pengembangan warnet tani dalam rangka peningkatan wawasan petani dalam dunia pertanian dan pemasaran hasil pertanian	<b>Belum Terlaksana</b>

No.	Subsistem Agribisnis Usaha Penunjang	Rencana Pengembangan	Ket
2	Sarana Kelembagaan	Revitalisasi dan optimalisasi peran dan fungsi kelompok tani yang ada pada saat ini	<b>Terlaksana</b> Sarana kelembagaan di wilayah perencanaan sudah ada di wilayah perencanaan dengan adanya pengoptimalisasian kinerja kelompok tani di Kecamatan Rubaru sekitar 200 kelompok Tani yang dianggap layak dalam pengembangan budidaya hortikultura.
3	Kebijakan Pemerintah	a. Dukungan pemerintah dalam mencari investor baik yang berskala nasional maupun investor asing khususnya untuk pengembangan potensi pertanian dan agribisnis, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah	<b>Terlaksana</b> Hanya sebatas dukungan yang selalu ada walaupun sampai saat ini belum terealisasi dan belum ada kebijakan yang menangani
		b. Membuka peluang jaringan pemasaran baru, khususnya jaringan pemasaran regional, nasional, dan internasional	<b>Terlaksana</b> Hanya memberikan peluang tanpa adanya usaha dengan kebijakan khusus ataupun strategi pemasaran
		c. Mengeluarkan kebijakan mewajibkan SKPD dan menghimbau perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sumenep untuk menggunakan produk makanan dan minuman hasil olahan dari komoditas unggulan, seperti: untuk rapat dan acara dinas	<b>Terlaksana</b> Telah tersedia beberapa olahan produk pertanian dari seluruh kecamatan Kabupaten Sumenep, ada juga produk dari Rubaru yang dijual di “Gerai Sumenep” yang berada di pusat kota. Namun, bukti kebijakan ini, peneliti tidak mendapatkan
4	Kegiatan Pelatihan	a. pelatihan peningkatan kapasitas petani melalui sistem pertanian terpadu	<b>Terlaksana</b> Namun, realisasinya belum optimal dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura.
		b. Pelatihan pada masyarakat terkait dengan pengembangan industri kecil atau pengolahan hasil pertanian	<b>Terlaksana</b> Namun, realisasinya tidak terjadi

Sumber: Olahan Penulis, 2016



Subsistem usaha penunjang dapat berupa sarana dan prasarana yang disediakan, seperti: sarana utilitas umum (jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telepon, dan internet), sarana pelayanan umum (pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, alat perkantoran, peribadatan, rekreasi, olahraga, dan ruang terbuka hijau), dan sarana kelembagaan (badan pengelola agropolitan, kantor perbankan, koperasi, unit-unit usaha). Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pelayanan umum di Kecamatan rubaru sudah tersedia, seperti mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bertani dan terdapatnya lembaga keuangan yang ada di dalam Gapoktan yang dapat membantu dari segi permodalan berupa peminjaman. Lembaga keuangan ini hanya berlaku kepada kelompok tani yang berbadan hukum dan juga pada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) ini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, prasarana dan sarana yang disediakan di Kecamatan Rubaru dalam pengembangan budidaya hortikultura hampir secara keseluruhan sudah terlaksana dan memang sudah dirasakan oleh kelompok tani di Kecamatan Rubaru.



Gambar 22. Sarana Kelembagaan Kecamatan Rubaru  
Sumber: PengamatanPeneliti, 2016

Seperti gambar diatas yang menunjukkan dibentuknya gabungan kelompok tani sebagai salah satu kelembagaan yang membantu kelompok tani di Kecamatan Rubaru dalam melaksanakan pengembangan budidaya hortikultura. Namun, pemenuhan sarana penunjang ini hanya diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum saja, mulai dari pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan usaha tani sampai pelatihan peningkatan kapasitas petani. Sehingga, dalam subsistem agribisnis usaha penunjang masih terdapat permasalahan yang menjadi faktor penghambat, yaitu:

- a. kelembagaan petani atau kelompok tani yang belum berkembang dengan baik dalam pertanggungjawaban kepada anggota kelompoknya atau kurang adanya koordinasi dalam kelompok,
- b. anggota kelompok tani maupun masyarakat petani tidak merasakan adanya bantuan fasilitas maupun pemberdayaan yang ada,
- c. tidak adanya kebijakan khusus dalam mengatur lebih jauh pengembangan budidaya hortikultura
- d. tidak adanya strategi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam pemasaran atau promosi produk hortikultura yang dapat menarik investor maupun ekspansi bisnis.
- e. Upaya untuk meningkatkan kesadaran kelompok tani dalam kegiatan pengembangan belum optimal.

##### **5) Subsistem Pemasaran**

Berikut merupakan kondisi subsistem agribisnis pemasaran di Kecamatan Rubaru, yaitu.

Tabel 37. Kondisi Subsistem Agribisnis Pemasaran Kecamatan Rubaru

No	Subsistem Pemasaran	Rencana Pengembangan	Ket
1	Sarana penjualan hasil pertanian	a. Optimalisasi pasar tradisional yang ada di Kecamatan Rubaru	<b>Terlaksana</b> Di Kecamatan Rubaru terdapat sarana penjualan hasil pertanian, yaitu pasar Banasare sebagai pasar utama dalam menjual hasil pertanian hortikultura
		b. Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (Pasar Banasare)	<b>Terlaksana</b>
2	Tempat parkir dan bongkar muat barang	Pengembangan tempat parkir dan bongkar muat barang secara terintegrasi dengan sarana utama, seperti pasar dan Sub Terminal Agribisnis (Pasar Banasare)	<b>Belum Terlaksana</b> Saat ini tidak ada sarana berupa tempat parkir dan bongkar muat barang di Kecamatan Rubaru
3	Prasarana jalan dan jembatan	a. Perbaikan terhadap jalan aspal yang kondisinya rusak	<b>Terlaksana</b> Sejauh ini, sebagian besar prasarana jalan sudah baik, perbaikan jalan rusak
		b. Peningkatan perkerasan jalan makadam menjadi jalan aspal	<b>Terlaksana</b> Sebagian besar perubahan dari makadam menjadi jalan aspal sudah dilakukan

Sumber: Olahan Penulis 2016

Prasarana dan sarana dapat berupa pasar tradisional yang terdiri dari kios-kios, los-los, tempat parkir, dan tempat bongkar muat barang, prasarana dan sarana Sub Terminal Agribisnis (STA), jalan antar desa-kota, serta jembatan. Berdasarkan hasil observasi yang disajikan dalam bentuk tabel menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana dalam subsistem pemasaran dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Walaupun masih terdapat rencana pengembangan yang belum terlaksana.

Sarana dan prasarana hasil pertanian di Kecamatan Rubaru, yaitu terdapatnya pasar Banasare yang memang sudah terkenal dan dikenal oleh para tengkulak/pegepul dengan kondisi pasar yang dapat terlihat digambar 13 dan 14.

Dalam hal prasana jalan dan jembatan, peneliti tidak mendapatkan data untuk mengetahui seberapa besar tingkat perubahan dan perbaikan jalan dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura. Namun, pada saat observasi, memanglah bahwa sepanjang jalan dari kecamatan Rubaru menuju kota Sumenep terlihat jalan aspal dan tidak berlubang yang dapat mendukung proses pemasaran.

Penjelasan mengenai proses manajemen dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dinilai dari segi subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis hilir, subsistem agribisnis usaha tani, subsistem agribisnis usaha penunjang, dan subsistem pemasaran dapat dinilai bahwa dalam proses manajemen pemerintah Kabupaten Sumenep ini masih tidak optimal dengan memiliki beberapa kelemahan atau faktor penghambat.

### c. **Kelompok Sasaran**

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, tidak luput dari adanya peran-peran dari aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat adalah pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu peran dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep yang membawahi PPL dan UPT. Pertanian di Kecamatan Rubaru, serta Pemerintah Kecamatan Rubaru. Hal ini juga tidak lepas dari adanya peran kelompok tani sendiri dalam pengembangan budidaya hortikultura guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan dari adanya pengembangan tersebut.

Kelompok tani di Kecamatan Rubaru sebenarnya menjadi kelompok sasaran dalam pengembangan budidaya hortikultura. Kecamatan Rubaru terdiri dari 11 Desa yang memiliki 200 kelompok tani dengan jumlah petani sebanyak

4337 orang. Jumlah kelompok tani tersebut merupakan kelompok tani yang dianggap layak sesuai laporan dari pihak UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru. Kelompok tani dalam pengembangan budidaya hortikultura dijadikan sebagai aktor yang menjalankan kegiatan pengembangan sebagai program pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, petani yang dapat dikatakan sebagai SDM dalam dunia pertanian di Kecamatan Rubaru, sebagian besar petani memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal tersebut sebenarnya bukan suatu alasan yang dapat mencegah suatu perubahan menjadi lebih baik, tetapi memang susah untuk diajak melakukan perubahan dalam kegiatan usaha tani yang ada di Kecamatan Rubaru. Seperti dalam menggunakan teknologi modern dalam kegiatan usaha tani, kebanyakan petani di Kecamatan Rubaru memang tidak mau menggunakan alat dan mesin pertanian yang modern dikarenakan penggunaan alat pertanian tradisional dianggap lebih nyaman. Selain itu, juga terdapat alasan bahwa petani tidak dapat mengoperasikan alat dan mesin pertanian modern.

Kemudian, dalam pengembangan budidaya hortikultura ini terdapat kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan maupun informasi. Sebagaimana hasil dari peneliti melakukan wawancara dan observasi di Kecamatan Rubaru, yaitu didapat pernyataan dari Bapak “Sw” yang mengatakan:

“kalau dari kita penyuluhan-penyuluhan setiap saat ada dek..., paling tidak setiap setengah bulan kita ada pertemuan rutin dengan kelompok tani, ya PPL-PPL itu yang turun memberikan inovasi motivasi. kelompok tani, itu kan gini dek masing-masing desa ada yang namanya gapoktandes ada pertemuannya setiap bulan, terus di kecamatan itu ada gapoktancan yang pertemuannya kita adakan secara rutin per tanggal 15 di Kecamatan. Jadi, materi-materi inovasi, program pembangunan dan lainnya yang kita sampaikan kepada ketua gapoktandes secara berkala akan disampaikan kepada kelompok tani di desa masing-masing” (*Hasil wawancara Senin,*

28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru berupaya untuk membantu kelompok tani atau para petani dalam kegiatan pengembangan. Penyuluhan yang diberikan hanya kepada sebagian petani yang menjadi perwakilan dalam kelompoknya dalam menerima informasi maupun inovasi, seperti: cara perawatan, pemupukan, teknik budidaya, maupun pengendalian hama. Penyuluhan yang dilakukan kepada perwakilan petani tersebut diharapkan dapat terealisasi dengan baik kepada petani lainnya yang tergabung dalam kelompok. Namun, secara empiris ditemukan suatu fenomena bahwa terdapat petani yang mengabaikan begitu saja karena mereka memang susah untuk diajak lebih berkembang di kegiatan usaha tani tersebut. Hal ini seperti yang dikutip dari pernyataan Bapak "A" yang menyatakan:

"karakter masyarakat petani, masyarakat desa secara umum, termasuk saya dan sampean itu untuk melakukan perubahan sangat sulit. Iya kan? Iya ndak? Iya itu sebenarnya merupakan tantangan dan tanggung jawab bagi PPL untuk mengajak petani dengan perkembangan ilmu atau teknik yang lebih baik dalam budidaya tanaman, perawatan, sampai pengendalian hama dan penyakit supaya dari segi perekonomian mereka menjadi lebih baik" (Hasil wawancara Selasa, 29 Maret 2016 pukul 10.45 WIB di Kediaman Bapak Zn).

Sehingga, dapat dikatakan bahwa terdapat kelemahan dari kegiatan pengembangan budidaya hortikultura, yaitu berupa kurangnya partisipasi masyarakat petani maupun kelompok tani dalam mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura, serta kurangnya keinginan untuk berubah dan belajar dalam penggunaan teknologi pertanian maupun teknologi lainnya yang lebih modern.

Dalam kegiatan pengembangan budidaya hortikultura, kelompok sasaran diharuskan memiliki pola komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya kegiatan penyuluhan dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru menandakan bahwa pola komunikasi antara PPL dengan kelompok tani dibangun secara perlahan untuk bekerjasama dalam pengembangan budidaya hortikultura. Pola komunikasi antara PPL dan kelompok tani melalui pertemuan-pertemuan rutin di Kecamatan Rubaru dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi para petani dalam kegiatan bertani, seperti: ketika ada hama/penyakit yang menyerang tanaman para petani. Hal ini juga didukung dengan adanya pernyataan dari Bapak “Zn” yang berpendapat bahwa

“pihak UPT.Pertanian disini sudah bagus. PPLnya selalu ada setiap kita butuhkan, bisa lewat telpon terus langsung kesini” (*Hasil wawancara Selasa, 29 Maret 2016 pukul 10.45 WIB di Kediaman Bapak Zn*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelompok sasaran sebagai pelaku utama dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, yaitu kelompok tani mendapat pelayanan yang baik dari pihak UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru yang bertugas dilapangan, serta memiliki pola komunikasi yang lancar.

Namun, dibalik itu semua, peran dari adanya PPL dan UPT.Pertanian Kecamatan Rubaru hanya berlaku kepada beberapa ketua kelompok tani saja. Bagi kelompok tani yang dianggap tidak aktif dalam menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah ini tidak mendapat perlakuan yang sama dengan kelompok tani yang aktif. Menurut Bapak “Wr” yang mengatakan:

“Sebenarnya saya dulu tergabung dalam kelompok tani mbak. Tapi karna kelompok tani saya itu tidak aktif.. ya bubar gitu aja. Terus ya.. biasanya itu yang dapat bantuan itu untuk kelompok tani yang pro ma kepala desa. Kalau masalah penyuluh ya, pas kalau di sawah ada masalah kayak ada hama atau penyakit yang nyerang tanaman, kalau mau manggil penyuluh itu, kita susah mbak soalnya ya petani biasa terus kurang dikenal lagi... kadang kita juga harus siap *fee* berapa buat ngundang penyuluh. Gitu mbak...” (*Hasil wawancara pada hari Sabtu, 30 April 2016 pukul 11.00 WIB di pasar desa Rubaru*)

Penjelasan tersebut sudah menandakan bahwa pola komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan petani di Kecamatan Rubaru hanya sebatas kepada petani atau kelompok tani tertentu saja. Bahkan kebanyakan petani yang juga sebagai anggota kelompok tani maupun petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah terutama PPL dan UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru dalam kegiatan usaha tani mereka. Dengan adanya ketimpangan dalam pemberian perhatian baik dari segi pelayanan, fasilitas, maupun informasi dan inovasi dapat menimbulkan koordinasi yang seharusnya terjalin demi mencapai tujuan adanya pengembangan budidaya hortikultura menjadi tidak terkoordinasikan dengan baik.

Selain itu, terdapat juga koordinasi yang seharusnya terjalin dengan baik dengan pihak Pemerintah Kecamatan Rubaru itu sendiri selaku pemegang kekuasaan dalam kecamatan tersebut. Menurut Bapak “Tn” mengatakan bahwa sebenarnya pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep dan UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru dengan pihak kecamatan tidak ada koordinasi yang baik, artinya berjalan sendiri-sendiri (hasil wawancara pada Rabu, 23 Maret 2016 pukul 08.35 WIB di kantor Kecamatan Rubaru). Penjelasan tersebut juga disetujui oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru jika disinggung



dengan pernyataan bahwa tidak ada campur tangan dari pengembangan budidaya hortikultura baik dari segi pemberdayaan, fasilitas, dukungan maupun pengakuan kinerja terhadap para petani di Kecamatan Rubaru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara aktor dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dinilai masih kurang baik atau belum terkoordinasikan dengan baik.

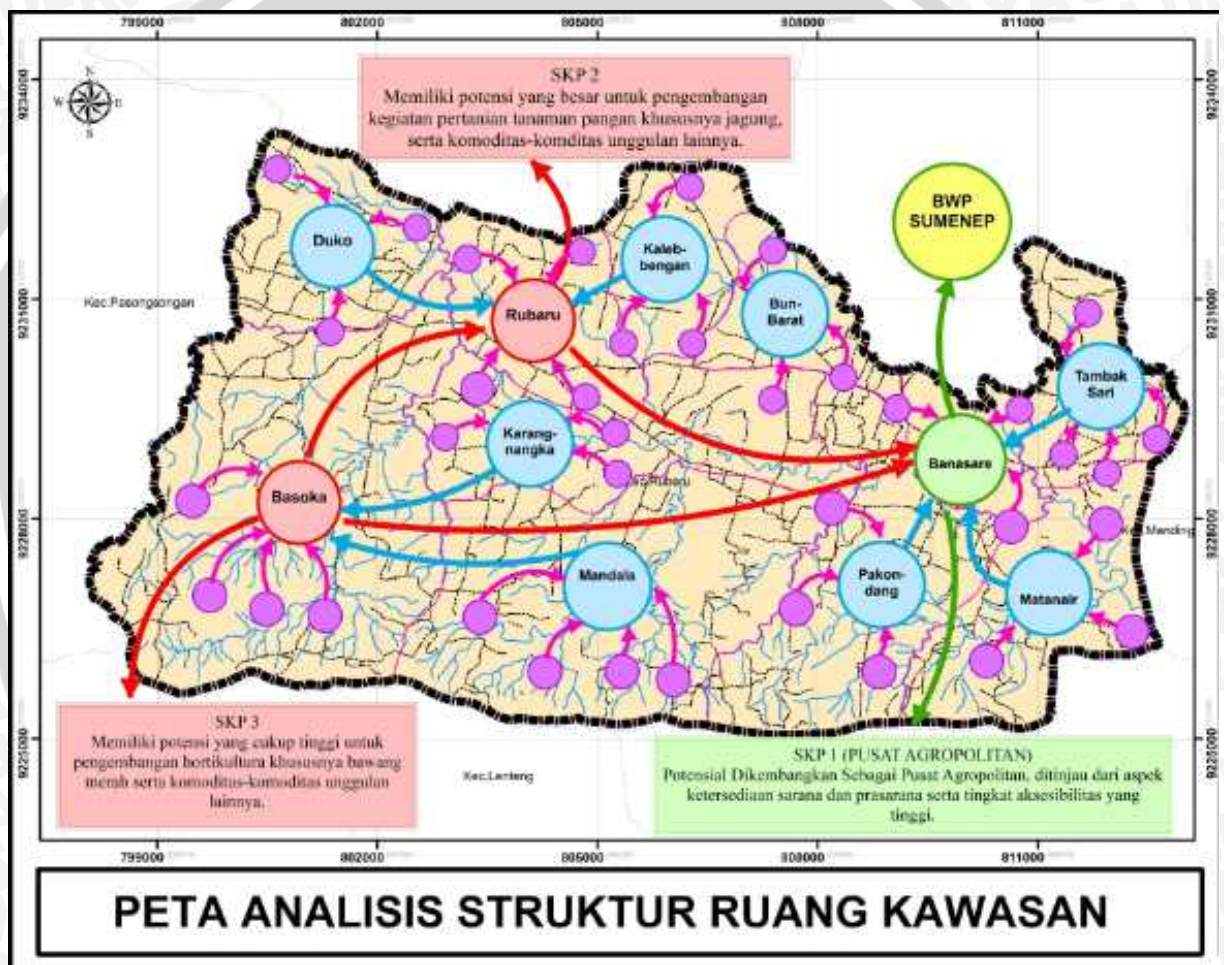
#### d. Faktor Lokasi

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dilakukan berdasarkan potensi SDA yang dimiliki. Selain itu, penetapan lokasi tersebut sebenarnya dalam rangka untuk pengembangan pertanian sebagai kawasan agropolitan. Pemilihan Kecamatan Rubaru dikarenakan hasil pertaniannya, baik tanaman pangan maupun hortikulturnya dinilai lebih dominan daripada kecamatan lain. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hr yang mengatakan:

“Sebenarnya sih Rubaru itu merupakan kawasan agropolitan yang sudah dirintis dan diperdakan dalam RTRW kab.Sumenep dari tahun 2008, terus sudah di SK kan juga oleh Bapak Gubernur. Jadinya khususnya untuk pengembangan hortikultura dilaksanakan di Kec. Rubaru” (*Hasil wawancara pada tanggal Selasa, 15 Maret 2016 pukul 09.00 WIB, di Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep*).

Pernyataan mengenai pengembangan budidaya hortikultura, saat ini dibuktikan dengan adanya Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 pasal 6 huruf b dan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2). Sedangkan penjelasan mengenai pemilihan Kecamatan Rubaru lebih dijelaskan dalam masterplan RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033.

Selain itu, pemilihan lokasi ini juga dilakukan pemetaan pada setiap desa yang dinilai potensinya. Pemetaan ini dilihat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tinggi, serta potensi yang tinggi dalam pengembangan hortikultura maupun komoditas-komoditas lainnya. Berikut ini merupakan pemetaan analisis struktur ruang kawasan.



Gambar 23. Peta Analisis Struktur Ruang Kawasan  
Sumber: Hasil Analisis dalam Revisi Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Rubaru, 2014

Kemudian, dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak “Sw” yang mengatakan

“Ini pertama dari sisi SDA karena tanah termasuk topografinya sangat cocok. Yang kedua SDMnya, ya itu yang saya bilang tadi, petani disini ulet. Ketika saya masuk-masuk desa yang ada di Rubaru daripada di kecamatan lainnya, di Rubaru, keadaan sosial ekonomilah agak bagus, ya contohnya jual timun” (*Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru*).

Kondisi lahan yang menjadi potensi dalam pengembangan budidaya hortikultura tentunya juga menjadi alasan dalam pemilihan lokasi pengembangan. Hal lain juga disampaikan oleh Bapak “Ms” yang mengatakan bahwa iklim juga berpengaruh, seperti jawaban percakapan dengan peneliti, yaitu sebagai berikut.

“Kondisi iklim yang cocok disana, selain itu kondisi masyarakat itu sudah gimana ya, ya itu udah usahanya. Jadinya mau dikembangkan horti-horti disana sudah cocok, kalo di kecamatan lain belum tentu” (*Hasil wawancara Senin, 21 Maret 2016 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan*).

Berdasarkan kedua jawaban dari pihak UPT.Pertanian maupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan, selain faktor SDA, ternyata faktor SDM juga mendukung terjadinya pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

#### **e. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan**

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dilaksanakan secara umum berdasarkan pengembangan kawasan agropolitan di kecamatan Rubaru sesuai dengan perda No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033. Adapun dalam pengembangan kawasan agropolitan memiliki strategi untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan sentra-sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agribisnis, dan agrowisata;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan;
3. Mengembangkan produk usaha pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan pariwisata;

4. Mengembangkan budidaya pertanian;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana; dan
6. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa pengembangan budidaya pertanian khususnya pengembangan budidaya hortikultura yang dilakukan di Kecamatan Rubaru merupakan salah satu strategi dalam pengembangan kawasan agropolitan. Secara garis besar, kebijakan ini masih secara umum untuk pengembangan kawasan agropolitan, masih belum dan kebijakan yang hanya fokus pada pengembangan budidaya hortikultura.

Menurut Bapak “Ms” mengatakan bahwa pengembangan budidaya hortikultura yang dilakukan di Kecamatan Rubaru sesuai dengan rencana atas dasar keinginan Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang ingin meningkatkan produksi hortikultura sesuai SOP budidaya hortikultura supaya menghasilkan dengan kualitas yang baik. SOP budidaya hortikultura yang masing-masing tanaman dalam lingkup hortikultura ini memiliki SOP yang berbeda-beda dan peneliti di lapangan tidak mendapatkan SOP tersebut. Sehingga, dalam pengembangan budidaya hortikultura yang dilaksanakan di Kecamatan Rubaru sejauh ini masih berdasarkan atas rencana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep tanpa adanya kebijakan khusus yang mendasari.

Kemudian, kebijakan yang seharusnya ada dan mendukung pelaksanaan pengembangan ini terhadap kemudahan perijinan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas ternyata tidak nihil. Seperti halnya tidak adanya asosiasi petani dalam penjualan produk hasil pertanian sesuai keinginan petani. Hal ini yang disebabkan

karena perijinan yang tak kunjung selesai dibuktikan dengan adanya komentar dari Bapak “Sy”, yaitu:

“coba saja ya perijinan asosiasi petani itu diijinkan.. kan enak petani bisa jual sendiri produk pertanian keluar daerah sendiri. Saya udah nyoba itu ngurus buat perijinan asosiasi tapi sampai saat ini belum ada hasilnya” (*Hasil wawancara pada hari Jumat, 01 April 2016 pukul 09.30 WIB di Kediaman Bapak Sy*).

Selain itu, menurut Bapak “Rs” dalam pengembangan budidaya hortikultura selama ini masih tidak ada investor atau kerjasama dengan swasta untuk dapat meningkatkan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Berbeda pernyataan dengan Bapak Sy sebagai Ketua Kelompok Tani “Sumber Anyar” sekaligus penangkar bawang merah yang mengatakan bahwa sebenarnya ada kerjasama beberapa kelompok tani di Kecamatan Rubaru dengan PT.Indofood untuk memasok cabe. Hal ini menandakan bahwa kurang adanya koordinasi atau pola komunikasi antara pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

#### **f. Pembangunan Berkelanjutan**

Perencanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru yang berdasarkan atas kebijakan dalam pengembangan kawasan agropolitan dinilai sudah direncanakan dengan basis pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan revisi masterplan pengembangan kawasan agropolitan Kecamatan Rubaru, perencanaan pembangunan tersebut direncanakan dengan analisis-analisis yang memandang jauh kedepan, seperti adanya analisis kependudukan, analisis kesesuaian lahan, analisis kebutuhan sarana dan prasarana sampai tahun 2034 untuk Kecamatan Rubaru.

Pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan budidaya hortikultura yang meliputi 3 unsur yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan ini yang saling berkaitan. Sesuai dari hasil penelitian, pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan budidaya hortikultura tidak begitu dipahami oleh Bapak “Ms” selaku pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Namun, menurut Bapak “Sw” dari ketiga unsur pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sejauh ini masih dipandang belum terealisasi dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak “Sw”, yaitu:

“Bahkan setiap tahun cuman sampai sekarang belum terealisasi, ada dari Bappeda provinsi gandeng konsultan, ngukur jalan, termasuk sarana prasarana, pasar itu sampai sekarang belum terealisasi. Tanya-tanya segala macam, tentang potensi,.. ya informasinya mau membangun pabrik skala mini. Tapi itu sudah direncanakan” (*Hasil wawancara Senin, 28 Maret 2016 pukul 10.00 WIB di Kantor UPT Pertanian Kecamatan Rubaru*).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dari pembangunan pertanian secara berkelanjutan sudah direncanakan, seperti dilihat dari unsur ekonomi yang mana ingin meningkatkan perekonomian melalui usaha seperti rencana yang telah dipaparkan dari hasil wawancara diatas namun belum terealisasi, sehingga perencanaan pengembangan budidaya hortikultura secara berkelanjutan ini tidak mempengaruhi atau belum ada pengaruh baik dari ekonomi, sosial, maupun lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

## **A. Analisis Data Pembahasan**

### **1. Potensi dalam Pengembangan Budidaya Hortikultura di Kecamatan Rubaru**

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dilakukan karena sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut Yuwono (2011) pembangunan pertanian dapat juga dikatakan sebagai pembangunan ekonomi di sektor pertanian karena pertanian merupakan salah satu dalam kehidupan ekonomi dan pengertian pertanian sendiri mengandung tekanan unsur ekonomi. Kemudian, menurut Hanani dkk (2003) komoditas hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar didalam negeri dan pasar internasional yang terus meningkat. Secara eksplisit pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dapat diartikan samahalnya dengan melakukan pembangunan ekonomi terutama pembangunan ekonomi masyarakat lokal.

Pembangunan ekonomi masyarakat lokal dapat dikatakan juga sebagai pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan konsep LERD. Menurut Bappenas (2008), konsep dasar LERD adalah sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi sumber daya alam, posisi geografis, kelembagaan publik, kewiraswastaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi, dan lain-lain. Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dilaksanakan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki seperti yang dikemukakan oleh Hanani (2003) yang dipaparkan sebelumnya. Berikut ini

merupakan indikator berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian RI Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 yang menunjukkan adanya potensi sebagai faktor pendukung dilakukannya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep, yaitu.

#### **a. Keanekaragaman Hortikultura**

Keanekaragaman hortikultura yang dimiliki Indonesia memanglah tidak dapat dipungkiri. Menurut UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Hortikultura dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Di Indonesia berdasarkan Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.9/2009 terdapat komoditas hortikultura yang perlu ditangani meliputi 323 jenis komoditas yang terdiri dari 60 jenis buah, 80 jenis sayuram, 117 jenis florikultura (tanaman hias), dan 66 jenis tanaman obat.

Kecamatan Rubaru merupakan suatu kecamatan yang memiliki potensi pertanian khususnya untuk hortikultura. Kecamatan Rubaru memiliki keanekaragaman hortikultura yang sudah diuji kecocokan dengan lahan disana seperti yang tertera dalam pemetaan analisis komoditi unggulan (gambar 11, hal 114). Berdasarkan kajian Simposium Nasional 2010 yang dikutip oleh Rachmawati (2010:32) menjelaskan bahwa bahwa dalam ketentuan keberhasilan pengembangan hortikultura sesuai konsep LERD, yaitu salah satunya adalah mengenali potensi sumberdaya lokal suatu wilayah. Potensi hortikultura Kecamatan Rubaru sudah



dikenal dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang menangani bidang pertanian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya budidaya di Kecamatan Rubaru yang sudah berlangsung selama sekitar 2-3 tahun. Sesuai hasil penelitian, selama ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan lebih memprioritaskan sayuran untuk dilakukannya budidaya bersama petani di Kecamatan Rubaru, seperti: bawang merah, mentimun, kacang panjang, terong, cabe besar, dan cabe rawit.

Selain itu, pelaksanaan budidaya hortikultura juga dapat memenuhi fungsi dari hortikultura. Menurut Zulkarnain (2010) hortikultura memiliki fungsi utama yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Fungsi penyediaan pangan, yakni terutama sekali dalam kaitannya dengan penyediaan vitamin, mineral, serat, dan senyawa lain untuk pemenuhan gizi.

Hortikultura merupakan tanaman yang dapat dikatakan sebagai bahan pangan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah kita ketahui memiliki sumber vitamin untuk memenuhi gizi didalam tubuh manusia.

Fungsi penyedia pangan merupakan suatu kelebihan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Hortikultura yang ditanam di Kecamatan Rubaru, yaitu:

Tabel 38. Kandungan Gizi Hortikultura

	<b>Komoditas</b>	<b>Kandungan</b>
<b>A</b>	<b>Buah-buahan</b>	
1	Durian	Sumber energi, berserat tinggi, kaya antioksidan, kaya mineral, kalium, dan asam amino esensial
2	Mangga	Vitamin A,B, E, berserat tinggi, kalium, dan mineral
3	Pisang	Air, gula, protein, lemak, vitamin A, B, D, dan mineral

	Komoditas	Kandungan
<b>B</b>	<b>Sayuran</b>	
1	Bawang Merah	Vitamin C, Kalium serat, asam folfat, kalsium dan zat besi
2	Buncis	Vitamin C, A, K, dan B, serta mineral dan serat
3	Cabe Besar	Vitamin A, B, C, dan E, serta mineral
4	Cabe Rawit	Vitamin C, B6, A, E, dan K, serta zat besi, tembaga, dan kalium
5	Kacang Panjang	Sumber protein, Vitamin B kompleks, serat tinggi, dan mineral
6	Kangkung	Zat besi, vitamin A, B1, C, dan berserat tinggi
7	Ketimun	Vitamin A, B, dan C, serta mineral dan kandungan air yang tinggi
8	Terong	Vitamin C, B6, Kalium, zat besi, dan magnesium
9	Tomat	Vitamin A, C, K, folat dan Kalium
<b>C</b>	<b>Biofarmaka</b>	
1	Laos	Minyak atsiri, flavonoida saponin, dan tanin, serta zat aktif galangan, eugenol, basonin, dan galangol sebagai bahan dasar obat

Sumber: Olahan Penulis, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Rubaru sesuai hasil penelitian sebenarnya tidak begitu memperhatikan pola makan yang bernutrisi atau kesadaran akan nutrisi itu masih kurang. Mereka masih belum memahami akan nutrisi itu sendiri maupun senyawa dalam pemenuhan gizi yang bagus untuk tubuh manusia. Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dilaksanakan semata-mata sebatas ingin memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi penyediaan pangan belum terlaksana dengan baik.

2. Fungsi ekonomi, yakni pada umumnya komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi petani, pedagang, kalangan industri, dan lain-lain.

Fungsi ekonomi merupakan tujuan utama dalam pengembangan budidaya hortikultura bagi masyarakat petani di Kecamatan Rubaru. Sesuai dari hasil

penelitian, dari adanya pengembangan budidaya hortikultura dijadikan sebagai sumber pendapatan utama dan dapat meningkatkan pendapatan bagi petani di Kecamatan Rubaru. Sumber pendapatan ini dapat dilihat dari permintaan pasar akan produk pertanian komoditi hortikultura dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sebenarnya tingkat pendapatan petani di Kecamatan Rubaru tidak dapat diukur karena harga pasaran untuk produk pertanian di pasar sering mengalami fluktuasi sehingga mengakibatkan juga kepada jumlah pendapatan petani disetiap waktu.

3. Fungsi kesehatan, yakni ditunjukkan oleh manfaat komoditas biofarmaka untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit tidak menular.

Fungsi kesehatan sejauh ini masih tidak dapat ditunjukkan dari adanya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Sejauh ini, belum ada pemanfaatan akan hasil tanaman obat di Kecamatan Rubaru karena petani sangat jarang menanam tanaman obat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga belum memfasilitasi maupun mendukung untuk dilakukannya budidaya tanaman obat

4. Fungsi sosial budaya, yakni ditunjukkan oleh peran komoditas hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan atau kenyamanan lingkungan, serta peranannya dalam berbagai upacara, kepariwisataan, dan lain-lain .

Peran hortikultura di Kecamatan masih belum mampu untuk memenuhi fungsi sosial budaya. Tanpa adanya instruksi pemerintah dalam memanfaatkan lingkungan menjadi agrowisata ataupun membuat lingkungan menjadi indah dan nyaman menimbulkan fungsi ini belum terlaksana.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hortikultura di Kecamatan Rubaru sebagai potensi atau faktor pendukung dalam pelaksanaan pengembangan budidaya. Namun, pada prinsipnya potensi hortikultura ini belum mampu untuk memenuhi semua fungsi dari hortikultura itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya potensi keanekaragaman hortikultura ini di Kecamatan Rubaru perlu adanya pengembangan lebih lanjut guna dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sesuai dengan konsep LERD.

#### **b. Lahan Pertanian**

Lahan merupakan sumberdaya utama dalam pembangunan hortikultura (Dirjen Hortikultura, 2012). Ketersediaan lahan pertanian di Kecamatan Rubaru tidak dapat dipungkiri sangat luas dan sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian. Potensi lahan pertanian ini juga dapat mendukung terlaksananya pengembangan budidaya hortikultura disamping memang memiliki SDA yang melimpah terutama hortikultura. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa lahan di Kecamatan Rubaru sebagian besar memang digunakan sebagai lahan pertanian seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum kecamatan Rubaru. Lahan pertanian yang mencapai 88,76% dari luas seluruh wilayah ini dimiliki oleh masyarakat petani di Kecamatan Rubaru.

Pada umumnya kepemilikan lahan pertanian di Kecamatan Rubaru dimiliki masyarakat lokal sendiri, sehingga mereka membuat suatu pola pengusahaan dengan skala usaha kecil dalam pemanfaatan lahan tersebut. Masyarakat petani di Kecamatan Rubaru memilih untuk melakukan pola pengusahaan secara tumpang tindih atau tumpangsari, artinya memanfaatkan lahan

untuk menanam komoditi pangan maupun hortikultura sesuai dengan musimnya. Di Kecamatan Rubaru masih belum ada pengklasifikasian terhadap penggunaan lahan khusus hortikultura saja. Penggunaan lahan hortikultura yang relatif terbatas ini akan menjadi faktor penghambat dalam memproduksi hasil pertanian dengan jumlah yang banyak dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura.

Selain itu, dari tidak adanya pengklasifikasian penggunaan lahan di Kecamatan Rubaru menimbulkan sistem penanaman yang tidak serentak atau berbeda-beda di setiap desa dan juga menjadi faktor penghambat dalam menarik perhatian investor maupun ekspansi bisnis yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Ketersediaan lahan hortikultura yang saat ini memang lebih memanfaatkan lahan pekarangan maupun tegal yang dimiliki oleh masyarakat petani dengan produktivitas yang tidak tetap. Menurut Dirjen Hortikultura (2012) mengatakan bahwa dalam pembangunan hortikultura, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membenahan politik pertanahan, yaitu berupa reformasi agraria, pengaturan kembali hak penguasaan tanah agar tidak terjadi kesenjangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah serta menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis hortikultura di pedesaan. Di kecamatan Rubaru langkah pertama ini tidak begitu dikhawatirkan karena untuk penguasaan dan kepemilikan lahan memang sudah dimiliki oleh masyarakat lokal dengan notabene sebagai petani atau pelaku usaha dan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat lokal dengan pemanfaatan lahan yang ada, sejauh ini masih dirintis. Namun, secara kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumenep

dalam penggunaan lahan pertanian masih belum ada tindakan lebih jauh untuk mendukung adanya pengembangan budidaya hortikultura.

Selanjutnya, langkah setelah pengaturan kembali masalah tanah adalah membuka peluang dan mendorong petani untuk melakukan budidaya produk-produk unggulan (Dirjen Hortikultura, 2012). Dalam konteks pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru yang dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan selayaknya dapat memberikan kesejahteraan yang signifikan, langkah tersebut sudah dalam proses. Pemanfaatan lahan pertanian khusus komoditi hortikultura ini sudah ditujukan untuk melakukan budidaya produk unggulan seperti bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit. Terdapat juga mentimun, kacang panjang dan sawi yang memang sudah dilakukan karena memang cocok untuk ditanam di lahan pertanian Kecamatan Rubaru. Pemanfaatan lahan ini sesuai dengan salah satu aspek dari 4 (empat) aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan pertanian seperti yang dikemukakan oleh Soekartawi (1995), yaitu pemanfaatan sumber daya tanpa merusak lingkungan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penyediaan maupun penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Rubaru sampai saat ini belum adanya pengklasifikasian lahan terhadap komoditi hortikultura yang didukung dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep, tetapi secara teknis pemanfaatan lahan pertaniannya sudah dirintis untuk mendukung pelaksanaan pengembangan budidaya tanaman hortikultura walaupun belum optimal.

### c. Teknologi

Teknologi pertanian Indonesia berkembang dengan pesat dari produksi hulu hingga pengolahan di hilir. Teknologi pertanian ini dapat digunakan dalam industri pertanian modern guna mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Menurut Dirjen Hortikultura (2012), ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pemacu pertumbuhan baik dibidang yang berkenaan dengan produksi, penanganan pascapanen maupun pemasaran dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Penggunaan teknologi di Kecamatan Rubaru ini bisa dilihat dari alat dan mesin pertanian yang mendukung kegiatan usaha tani dari masyarakat petani. Sejauh ini, dalam pengembangan budidaya hortikultura, masyarakat petani disana masih banyak yang menggunakan alat dan mesin pertanian yang tradisional. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat dan mesin pertanian yang diberikan oleh pemerintah hanya kepada kelompok tani yang memenuhi syarat.

Pemenuhan teknologi yang diberikan hanya kepada beberapa kelompok tani saja dinilai tidak begitu optimal dalam penggunaannya guna mencapai tujuan pengembangan budidaya hortikultura. Alat dan mesin pertanian yang diberikan kepada kelompok tani hanya berjumlah 1 unit di setiap jenisnya, yang tidak seimbang dengan jumlah anggota kelompok tani sebanyak 20 orang di masing-masing kelompok. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki tujuan sebagai motor penggerak untuk mendorong produktivitas dan efisiensi guna menghasilkan terobosan atau lompatan kemajuan hortikultura (Dirjen, 2012). Namun, dikarenakan terbatasnya jumlah teknologi berupa alat dan mesin pertanian di

Kecamatan Rubaru yang dapat dikatakan tidak memenuhi untuk kegiatan usaha tani dalam pengembangan budidaya hortikultura, menunjukkan bahwa teknologi di Kecamatan Rubaru belum dapat dikatakan sebagai motor penggerak untuk kemajuan hortikultura.

Kemudian, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (2012) merumuskan bahwa teknologi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan diversifikasi produk, meliputi: (i) teknologi biologis (benih, varietas, karakteristik produk) yang sesuai dengan permintaan pasar, (ii) teknologi pengolahan di sektor hilir untuk berbagai skala usaha, (iii) teknologi pengepakan, kemasan, dan distribusi, serta penyimpanan untuk menjamin produk tetap dalam kondisi segar ke konsumen akhir, dan (iv) teknologi informasi untuk pemasaran dan distribusinya. Teknologi ini harus diperhatikan guna mewujudkan tujuan dilaksanakannya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Berikut merupakan ulasan mengenai kondisi teknologi di Kecamatan Rubaru, yaitu.

- a. Teknologi biologis (benih, varietas, karakteristik produk) yang sesuai dengan permintaan pasar.

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sangat bergantung pada ketersediaan benih yang bermutu. Hortikultura yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat, rata-rata dalam penanamannya sudah menggunakan benih/bibit yang bersertifikat. Seperti halnya terdapat benih bawang merah varietas Rubaru yang sudah diakui merepresentasikan keunggulan benih bermutu varietas unggul Rubaru.



Sebagian besar petani yang ada di Kecamatan Rubaru sudah menggunakan benih varietas Rubaru dalam penanaman bawang merah, walaupun ketersediaan benih bawang merah varietas Rubaru ini juga terbatas atau relatif rendah dalam hal jumlahnya maupun pelaku usaha yang menggunakan. Untuk tanaman lain seperti buah-buahan, terdapat fasilitas benih dari pemerintah berupa benih kedondong. Untuk tanaman lainnya masih tergolong menggunakan benih/bibit yang bersertifikat maupun biasa. Sehingga, dapat disimpulkan sejauh ini teknologi biologis Kecamatan Rubaru sudah ada yang memiliki varietas tersendiri, yaitu bawang merah yang sesuai dengan permintaan pasar karena hasil produksi pertaniannya berkualitas walaupun pemenuhan akan teknologi biologis ini masih jauh dari sempurna atau belum optimal.

b. Teknologi pengolahan di sektor hilir untuk berbagai skala usaha.

Penggunaan teknologi di sektor hilir pada umumnya masih sederhana dan berskala rumah tangga. Teknologi hilir ini sudah dijelaskan lebih rinci pada fokus proses manajemen bagian subsistem agribisnis hilir. Sesuai dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa terbatasnya pemenuhan sarana prasarana dalam teknologi hilir dari pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi faktor penghambat dalam terjadinya proses pengolahan hasil produksi pertanian di Kecamatan Rubaru. Sehingga, dapat dikatakan bahwa teknologi pengolahan di sektor hilir dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru belum terpenuhi.

- c. Teknologi pengepakan, kemasan, dan distribusi, serta penyimpanan untuk menjamin produk tetap dalam kondisi segar ke konsumen akhir.

Sejauh ini, teknologi tersebut masih belum tersedia di Kecamatan Rubaru, baik itu merupakan suatu bantuan atau dari pihak petaninya sendiri. Hal ini juga menunjukkan sebagai faktor penghambat dalam melakukan pemasaran yang lebih menarik perhatian konsumen.

- d. Teknologi informasi untuk pemasaran dan distribusinya.

Sesuai dari hasil penelitian, teknologi informasi untuk pemasaran dan didistribusinya belum tersedia dengan baik. Teknologi informasinya untuk melakukan promosi akan hasil pertanian komoditi hortikultura ini dinilai tidak efektif ditandai dengan adanya ketidaktahuan masyarakat Kabupaten Sumenep mengenai Kecamatan Rubaru yang memiliki bawang merah varietas Rubaru dan sebagai penghasil hortikultura lainnya.

Berdasarkan ulasan mengenai kondisi teknologi yang digunakan di Kecamatan Rubaru dapat dilihat bahwa sejauh ini pemerintah Kabupaten Sumenep belum memenuhi teknologi-teknologi yang harus diperhatikan guna dapat mewujudkan tujuan dari adanya pengembangan budidaya hortikultura. Hal ini belum bisa menggambarkan pemanfaatan teknologi yang senantiasa berubah sebagai aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan pertanian (Soekartawi, 1995). Selain itu pemanfaatan teknologi yang belum optimal juga merupakan suatu ancaman yang dapat menghambat dalam pengembangan budidaya hortikultura.

#### d. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja dari sektor pertanian di Kecamatan Rubaru menunjukkan angka paling tinggi diantara sektor lainnya, yaitu 8.492 jiwa seperti yang tertera dalam gambaran umum Kecamatan Rubaru. Hanani dkk (2003) mengemukakan bahwa dalam pembangunan pertanian terdapat alasan yang mendasari, yaitu besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pada umumnya, tenaga kerja sektor pertanian di Kecamatan Rubaru merupakan masyarakat lokal Kecamatan Rubaru. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja sektor pertanian Kecamatan Rubaru sudah menjadi alasan dan mendukung terjadinya pengembangan budidaya hortikultura.

Kemudian, hampir 90% pelaku usaha hortikultura di Kecamatan Rubaru menggunakan tenaga kerja yang masih memiliki hubungan persaudaraan atau dalam lingkup keluarga yang dibayar harian atau bulanan. Tenaga kerja ini dilibatkan hampir untuk semua jenis tahapan dalam kegiatan usaha tani. Menurut Rachmawati (2010), pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada sumberdaya lokal sebagai upaya peningkatan pendapat masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha (kecil dan menengah utamanya) karena lebih mengandalkan pada bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga dipandang tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Sejauh ini dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan tenaga kerja atau sumber daya lokal di Kecamatan Rubaru melalui pengembangan budidaya hortikultura guna meningkatkan pendapatan masyarakat lokal belum berkembang. Sesuai dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kecamatan Rubaru

belum mampu untuk menangani serangan penyakit atau hama dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih modern dalam kegiatan usaha tani pun tidak dapat terlaksana dengan baik.

Tenaga kerja yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yaitu petani yang berasal dari masyarakat lokal Kecamatan Rubaru ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura. Menurut Said (2012), pelaku usaha lokal merupakan salah satu aktor yang memiliki peran dalam melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah. Pengelolaan yang dilakukan sebagai suatu upaya dalam meningkatkan nilai jual sumberdaya yang ada ataupun mendistribusikan sumberdaya alam yang ada pada luar wilayah sentra produksi. Dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, sejauh ini memanglah pelaku usaha lokal sudah berupaya dalam pengelolaan sumber daya alam dengan melakukan kegiatan usaha tani guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep. Namun, sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada penyajian data yang pada intinya tenaga kerja di Kecamatan Rubaru masih belum berkembang. Sebagian besar petani di Kecamatan Rubaru masih dinilai belum ada kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan akan produksi, produktivitas, dan pendapatan. Hal ini masih belum mencerminkan pengembangan budidaya hortikultura sesuai dengan pernyataan Solahuddin (1999) bahwa pembangunan pertanian merupakan rangkaian upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat petani khususnya memberdayakan petani agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri.

#### e. Pasar

Menurut Mosher (1987), syarat pokok dalam mensukseskan pembangunan pertanian, yaitu salah satunya adalah adanya pasar atau pemasaran hasil pertanian. Dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya pasar yang mendukung dalam pemasaran hasil pertanian komoditi hortikultura, yaitu pasar Banasare di Kecamatan Rubaru dan pasar Anom di Kabupaten Sumenep. Sesuai dari hasil penelitian, pasar Banasare yang terletak di Kecamatan Rubaru merupakan pasar utama yang menjual hasil pertanian komoditi hortikultura kepada para konsumen/tengkulak/pengepul yang datang. Sebagian besar tengkulak/pengepul ini membawa hasil pertanian komoditi hortikultura keluar dari Kabupaten Sumenep, seperti: Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya. Permintaan pasar dalam jumlah besar untuk tanaman hortikultura ini memang lebih banyak diminati diluar Kabupaten Sumenep. Pengembangan budidaya hortikultura ini dilaksanakan pada dasarnya karena mempertimbangkan permintaan pasar yang berkonsentrasi pada komoditi yang berdaya saing tinggi, seperti hortikultura dengan memaksimalkan sumber daya alam terutama lahan yang mendukung. Sehingga, pengembangan budidaya hortikultura ini dapat mengubah kondisi masyarakat petani terutama di Kecamatan Rubaru menjadi lebih baik, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun sosial budaya.

Pada awalnya manusia melakukan budidaya pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan diri-sendiri, namun seiring berkembangnya pengetahuan dan kebutuhan terhadap barang-barang lain yang tidak dapat dipenuhi sendiri,

kemudian berkembangnya sistem pertukaran barang antar individu atau kelompok orang (Yuwono, 2011). Namun, budidaya pertanian komoditi hortikultura yang dilakukan di kecamatan Rubaru pada awalnya bukanlah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan diri-sendiri dikarenakan sebagian besar masyarakat petani di Kecamatan Rubaru lebih memilih untuk menjual produk pertanian khusus komoditi hortikultura ini. Secara empiris, masyarakat petani di Kecamatan Rubaru tidak akan menjual produk pertanian berupa padi yang diolah menjadi beras karena untuk konsumsi pribadi, bahkan toko-toko disana sebagian besar tidak menjual beras. Masyarakat petani disana lebih memilih menjual produk pertanian komoditi hortikultura untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, adanya pasar ini memberikan dampak terhadap besarnya pendapatan yang diterima oleh petani untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Menurut Hanani dkk (2003), upaya memenuhi kebutuhan pasar adalah dengan memerlukan usaha peningkatan produksi hortikultura yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas melalui penggunaan Iptek, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta agar dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar, para kelompok tani maupun masyarakat petani sebagai pelaku usaha maupun sumber daya manusia lokal sudah menggunakan teknologi seadanya sesuai yang dijelaskan pada fokus teknologi dan memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan pertanian, kondisi geografis, keanekaragaman hortikultura. Para petani di Kecamatan Rubaru ini melaksanakan budidaya hortikultura unuk dapat meningkatkan produksi hasil

pertanian komoditi hortikultura sesuai arahan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan guna dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik di pasar lokal di Kabupaten Sumenep maupun pasar regional.

Namun, seperti pengakuan dari salah satu staf produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep bahwa pemenuhan produk hortikultura seperti bawang merah varietas Rubaru di pasar lokal Kabupaten Sumenep malah tidak tercapai. Hal ini dikarenakan petani lebih memilih menjual hasil produksi hortikultura kepada tengkulak yang akan menjualnya keluar Kabupaten Sumenep supaya mendapat harga yang lebih pantas karena kualitasnya dan membeli dengan jumlah yang besar. Selain itu, terdapat persaingan ketat antara bawang merah varietas Rubaru dengan bawang merah yang berasal dari Kabupaten Pamekasan dan Probolinggo di dalam pasar lokal Kabupaten Sumenep dengan perolehan nilai bawang merah dari Probolinggo dengan Pamekasan lebih diminati karena bentuknya yang besar daripada bawang merah varietas Rubaru. Hal tersebut merupakan kelemahan dari sistem kinerja pemerintah dalam mengajak partisipasi masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Kabupaten Sumenep terlebih dahulu. Selain itu, juga menunjukkan bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam pengadaan barang kurang maksimal seperti pernyataan dari Zauhar (1996:33), “administrasi publik merupakan proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik atau dengan rumusan spesifik seperti melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan.”

## 2. Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) di Kecamatan Rubaru

Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pada daerah yang berhak menetapkan kebijakan daerah, seperti: dalam mengelola daerah masing-masing melalui penyelenggaraan pemerintahan dan menentukan kebijakan pembangunan demi mensejahterakan masyarakat daerah sejauh ini telah merencanakan pembangunan ekonomi melalui pengembangan pertanian. Seperti Kartasmita (1996:9) yang berpendapat bahwa administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/ pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah merencanakan pengembangan pertanian di seluruh Kecamatan yang memang memiliki potensi pertanian, terutama Kecamatan Rubaru.

Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pembangunan pertanian berdasarkan adanya Perda Kabupaten Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Dalam perda tersebut telah mengatur kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi pengembangan kawasan agropolitan (pasal 6 huruf b) dan lebih dijelaskan lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b dengan strategi meliputi: a) mengembangkan pusat-pusat agropolitan, b) meningkatkan kualitas kelembagaan,



c) mengembangkan produk usaha pertanian, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata, d) mengembangkan budidaya pertanian, e) mengembangkan sarana dan prasarana, dan f) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pengembangan pertanian ini dilakukan atas dasar potensi daerah yang dimiliki seperti Kecamatan Rubaru dengan menggunakan acuan dari perda tersebut.

Pengembangan pertanian ini dilakukan di Kecamatan Rubaru dengan strategi pengembangan budidaya hortikultura yang memiliki tujuan agar dapat memiliki *multilevel effect* dari sisi ekonomi, seperti dalam hal pemasaran produk-produk hasil pertanian, baik *off farm* atau pasca produksi maupun *on farm* yang dimanfaatkan. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (1983: 4), yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekaligus perubahan sosial dapat dicapai melalui konsep administrasi pembangunan yang diartikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sehingga, pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru diarahkan pemerintah Kabupaten Sumenep dengan tujuan tersebut.

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru merupakan suatu strategi dalam meningkatkan perekonomian. Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan dengan strategi khusus agar dapat mencapai tujuan tersebut. Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang

diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut (Kusdi, 2009: 87). Kemudian, dalam pengembangan pertanian yang ingin dilakukan sebaiknya mengikuti pernyataan Hanani dkk (2003) bahwa terlebih dahulu memerhatikan kelestarian lingkungan, dukungan kelembagaan agribisnis, teknologi strategis berbasis lokal, pendayagunaan dan perlindungan sumberdaya hayati, sistem informasi pertanian yang tangguh, faktor penunjang keberhasilan pengembangan pertanian agar dapat melaksanakan strategi dengan tepat pada daerah strategis pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru akan dipaparkan berikut ini sesuai dengan konsep LERD agar dapat mewujudkan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada.

#### **a. Tata Pemerintahan**

Menurut Said (2012), Tata pemerintahan atau Pemerintah daerah merupakan salah satu aktor penting dalam konsep LERD yang memiliki kewajiban melakukan pembangunan, seperti sebagai pelaksana konsep LERD, aktif dalam penyediaan pembangunan fisik, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengkoordinir pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah, dan menyesuaikan dengan regulasi/kebijakan yang tepat sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Konsep LERD itu sendiri adalah sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi sumber daya alam, posisi geografis, kelembagaan publik, kewiraswastaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi dan lain-lain” (Bappenas, 2008). Sehingga, tata pemerintahan ini dimaksudkan supaya pemerintah melakukan kewajibannya dalam pembangunan yang diawali dengan memanfaatkan SDA dan SDM sesuai

dengan potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dilakukannya proses pembangunan yang diinginkan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan pembangunan dibidang pertanian. sesuai dengan pendapat dari Febrianto (2013) bahwa pertanian merupakan satu-satunya industri besar yang berfungsi ekonomi dan sekaligus berfungsi sosial yang dapat menjadi faktor pembangunan daerah khususnya pedesaan, karena hanya pertanian yang merupakan kegiatan ekonomi besar dan luas yang berpangkalan di pedesaan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya potensi SDA yang dimiliki di Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Rubaru. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang bertanggung jawab adanya pembangunan pertanian telah melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya hortikultura. Sesuai dari hasil penelitian telah melakukan tindakan berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Hal tersebut merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam pengembangan budidaya hortikultura

Pembangunan yang dianggap sebagai sebuah gerakan yang mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisir, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryono, 2010). Hal tersebut selaras dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, yaitu dengan strategi pembangunan yang diawali melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan

SDM sampai pemanfaatan terhadap SDA yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengajak partisipasi masyarakat lokal di dalam program pembangunan ini. Pada dasarnya pembangunan tersebut juga mengikuti pernyataan menurut Blakely (2003) bahwa terdapat 4 (empat) program tindakan terbuka untuk organisasi atau instansi dalam mengambil inisiatif pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, yaitu bertindak sebagai *entrepreneur*, *coordinator*, *fasilitator*, dan *stimulator*. Sehingga, pemerintah Kabupaten Sumenep menjalankan fungsi tersebut dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Selama ini pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pengembangan budidaya hortikultura telah melakukan usaha yang direncanakan khusus untuk Kecamatan Rubaru, yaitu dengan pembangunan infrastruktur demi mendukung pengembangan budidaya hortikultura mulai dari jalan usaha tani yang mendukung kegiatan usaha tani masyarakat petani yang ada di Kecamatan Rubaru. Menurut Blakely (2003) pemerintah memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, yaitu salah satunya sebagai fasilitator. Peran ini ditunjukkan dengan penyediaan prasarana hortikultura seperti pembangunan infrastruktur sebagai pendukung dalam kegiatan pengembangan. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti yang melintasi jalan-jalan yang ada di Kecamatan Rubaru dengan nyaman karena jalan yang diaspal dan hampir tidak ada yang berlubang, walaupun masih terdapat jalan makadam. Namun, pembangunan infrastruktur ini mulai dari pembangunan jalan usaha tani sampai jalan-jalan yang menuju sawah tidak dapat diketahui berapa besar tingkat perubahan dan perbaikan yang terjadi di Kecamatan Rubaru dikarenakan peneliti tidak mendapatkan datanya, sehingga tidak teridentifikasi. Oleh karena itu,

dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan belum dapat terverifikasi.

Kemudian, dalam pembangunan SDM yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Rubaru seperti yang telah disajikan di penyajian data dan sesuai dari hasil penelitian. Dilihat dari sudut pandang fungsi pemerintah sebagai stimulator (Blakely, 2003) dapat dinilai sudah terlaksana, yaitu pemerintah telah melakukan motivasi atau dorongan agar petani mengetahui, menginginkan, dan mampu dalam melaksanakan pengembangan budidaya hortikultura dengan baik seperti yang diharapkan. Namun, peran pemerintah sebagai stimulator belum sampai pada dorongan untuk melakukan wirausaha, hanya sebatas dorongan untuk melakukan pengembangan budidaya hortikultura dalam skala kecil. Selain itu, pembangunan SDM ini hanyalah sebatas pada orang-orang tertentu saja karena pelaksanaan penyuluhan melalui pembelajaran mengenai kegiatan usaha tani hanya diberikan kelompok tani yang berbadan hukum, sekaligus hanya pada perwakilan kelompok tani. Pemberian penyuluhan melalui pembelajaran dapat dikatakan tidak merata dan tidak optimal dikarenakan sebagian besar seluruh anggota kelompok tani sesuai dari hasil dari penelitian tidak mengetahui adanya penyuluhan terkait pembelajaran kegiatan usaha tani maupun informasi-informasi yang lebih terkini dunia pertanian. Selain itu, jumlah PPL sebanyak 5 (lima) orang yang artinya memiliki perbandingan yang tidak seimbang dengan jumlah petani atau kelompok tani yang terdapat di 11 desa Kecamatan Rubaru juga menjadi kelemahan dari pelaksanaan

pembangunan SDM untuk mewujudkan tujuan pengembangan budidaya hortikultura.

Pembangunan SDM juga ada yang berasal dari pemerintah pusat, yaitu seperti program SLGAP. Seperti dari hasil penelitian yang didapat bahwa pembangunan SDM berupa program dari pemerintah pusat terbatas pada waktu dan peserta. Program yang hanya berlangsung beberapa saat saja dan peserta yang mengikuti merupakan peserta yang berasal dan kelompok tani berbadan hukum dan dipilih oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Sehingga, masih terdapat adanya ketidaksetaraan dalam pemberian informasi baik dari segi informasi, teknologi pertanian, maupun inovasi kepada kelompok tani dan masyarakat petani yang ada di Kecamatan Rubaru.

Tata pemerintahan dalam pengembangan budidaya hortikultura ini belum dilaksanakan berdasarkan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sejauh ini sesuai dari hasil penelitian belum ada regulasi yang dirumuskan dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, hanya sebatas pada regulasi RTRW yang menentukan lokasi pengembangan. Seharusnya dalam pengembangan budidaya hortikultura ini dapat didorong dengan adanya fungsi pemerintah, yaitu pemerintah sebagai regulator. Seperti yang dikemukakan oleh Djamin dalam Islamy (2003) bahwa peran pemerintah dengan fungsi pengaturan yaitu pemerintah berperan menentukan kebijakan pembangunan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan dan pengawasan. Belum adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura ini mengakibatkan peran pemerintah

Kabupaten Sumenep menjadi tidak terkendali dan timbul permasalahan dalam proses pengembangan tersebut. Seperti permasalahan tidak adanya pengawasan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam pendistribusian fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani dan tidak adanya pengawasan lebih lanjut pada proses kegiatan pengembangan budidaya hortikultura dan pada penggunaan teknologi yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tata pemerintahan berupa peran pemerintah dalam pengembangan budidaya hortikultura belum dapat menggambarkan pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan potensi SDA dan SDM Kecamatan Rubaru sesuai dengan konsep LERD. Sebagaimana menurut Rachmawati (2010), konsep LERD yaitu pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada sumberdaya lokal atau setempat sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha (kecil dan menengah utamanya) karena lebih mengandalkan pada bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga dipandang tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Selain itu, menurut Blakely (2003) terdapat 4 (empat) program tindakan terbuka untuk organisasi atau instansi dalam mengambil inisiatif pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, yaitu bertindak sebagai *entrepreneur*, *coordinator*, *fasilitator*, dan *stimulator* yang dinilai tidak berjalan ditandai dengan peran sebagai *entrepreneur* dan *coordinator* tidak ikut andil dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, serta *fasilitator* dan *stimulator* yang tidak dilaksanakan secara optimal dalam kegiatan pengembangan tersebut.

## **b. Proses Manajemen**

Proses manajemen merupakan usaha yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menunjang dalam pencapaian tujuan secara sistematis. Dalam manajemen terdapat input, proses, dan output yang ketiga langkah tersebut memiliki fokus masing-masing yang harus dipahami oleh semua aktor yang bersangkutan dalam konsep LERD (Said, 2012). Pemerintah daerah sebagai salah satu aktor yang memiliki bagian besar dalam peran dan fungsi yang menunjang pencapaian tujuan kegiatan pengembangan. Seperti menurut UU No. 12 Tahun 1992 bahwa pemerintah daerah berperan dalam budidaya tanaman, yaitu mulai dari perencanaan budidaya tanaman, penyelenggaraan budidaya tanaman, sarana produksi, mengatur tata ruang dan tata guna dalam budidaya tanaman, pengusahaan hasil budidaya tanaman, pembinaan dan melibatkan peranserta masyarakat. Hal itu selaras dengan proses manajemen dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dapat dilihat dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir.

### **1) Subsistem Agribisnis Hulu**

Sesuai dari hasil penelitian, tahap subsistem agribisnis hulu merupakan usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menunjang pengembangan budidaya hortikultura melalui pemenuhan sarana produksi (pupuk, obat-obatan, benih/bibit) dan alat dan mesin pertanian (alsintan). Seperti menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman yang menjelaskan bahwa sistem budidaya tanaman merupakan sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi,



dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sistem pengembangan budidaya tanaman yang membutuhkan teknologi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam menunjang dalam pencapaian tujuan secara sistematis yang diawali dengan tahap subsistem agribisnis hulu sebagian besar sudah terlaksana walaupun hasilnya belum optimal. Pada tahap subsistem agribisnis hulu ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan telah memfasilitasi teknologi dalam mendukung kegiatan, seperti yang dijelaskan pada fokus teknologi bahwa teknologi yang digunakan berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Sumenep walaupun teknologi yang diterima ini berupa alsintan masih terbatas, baik terbatas dari segi penerima maupun terbatas dari segi alsintan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan hortikultura.

Terbatasnya dan/atau tidak tersedianya sarana dan prasana yang mendukung kegiatan pengembangan budidaya hortikultura, seperti: alat panen, alat dan mesin pertanian (alsintan), pengangkutan/transportasi ini menimbulkan tidak semua petani mendapatkan. Hal ini dikarenakan dalam pemberian fasilitas terhadap petani untuk kegiatan pengembangan dibutuhkan dana yang cukup besar, baik itu bersumber dari dana APBN maupun dana APBD. Penyediaan fasilitas ini tergantung pada dana yang dialokasikan kepada kegiatan pengembangan. Sehingga, untuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan tersebut tidaklah pasti dan sampai saat ini masih bertahap.

Kemudian, dalam penerapan teknologi yang digunakan ini seperti dari segi alsintan, masih banyak petani yang menggunakan alsintan tradisional daripada menggunakan yang modern. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya penerima yang menerima alsintan dan yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut hanya kelompok tani yang berbadan hukum saja. Sesuai dari hasil penelitian, bagi suatu kelompok yang menerima alsintan modern, secara empiris penggunaannya hanya perwakilan saja, anggota kelompok tani tidak merasakan adanya alsintan modern. Berdasarkan terjadinya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengawasan dari pemerintah daerah setelah fasilitas diberikan kepada beberapa kelompok tani.

Selain itu, kurangnya keinginan untuk berubah dalam penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik dan kurangnya SDM yang terampil dalam pengelolaan dan pengoperasian sarana dan prasana hortikultura juga menjadi penyebab dari tidak menggunakannya alsintan modern yang menandakan bahwa penggunaan teknologi budidaya sampai pasca panen yang tidak berkembang, serta penanganan serangan penyakit atau hama pun dapat dikatakan belum baik. Dalam tahap subsistem agribisnis hulu ini dapat dikatakan bahwa memang baik dari pemerintah yang kurang dapat memfasilitasi secara optimal dan tidak dilakukannya pengawasan pada penggunaan fasilitas tersebut maupun petani/SDM yang kurang berkembang menyebabkan proses manajamen dalam tahap ini tidak terlaksana dengan baik.

## 2) Subsistem Agribisnis Hilir

Selanjutnya, tahap subsistem agribisnis hilir yang merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam menunjang kegiatan industri

makanan dan industri minuman yang berbasis komoditi pertanian, industri biofarma, dan industri pariwisata masih belum berkembang. Pada tahap ini sesuai dari hasil penelitian, memang kelompok wanita tani sudah berusaha dalam memanfaatkan hasil produk pertanian komoditi hortikultura menjadi suatu olahan. Pada dasarnya pemanfaatan hasil produk pertanian komoditi hortikultura menjadi olahan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Seperti pernyataan dalam Simposium Nasional 2010 yang dikutip oleh Rachmawati (2010:32) bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan LERD yang dapat dilihat untuk pengembangan budidaya hortikultura, yaitu pengembangan variasi produk dan mempercantik tampilan produk supaya produk bernilai lebih. Pemanfaatan hasil produk pertanian komoditi hortikultura menjadi olahan yang dilakukan di Kecamatan Rubaru menunjukkan bahwa adanya pengembangan variasi produk hortikultura berupa barang mentah menjadi olahan yang dapat menambah nilai lebih dipasaran yang dilakukan oleh kelompok tani yang merupakan salah satu aktor dalam LERD ini. Namun, dalam pelaksanaan pengembangan variasi produk hortikultura menjadi olahan yang bernilai lebih sesuai dari hasil penelitian tidaklah berkembang. Hal ini dikarenakan tidak adanya (kurangnya) dukungan pemerintah dalam pengelolaan produk pertanian (hasil olahan pertanian, baik dari segi permodalan dan bantuan maupun pemasaran, serta koordinasi antara dinas-dinas pemerintahan Kabupaten Sumenep dalam pengembangan budidaya hortikultura.

Selain itu, untuk industri biofarma, dan industri pariwisata sampai saat ini hanya tahap rencana saja dan belum terlaksana. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidaksiapan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengelola SDA yang ada dan

tidak menggambarkan proses manajemen yang baik dalam menunjang pengembangan budidaya hortikultura sesuai konsep LERD. Seperti yang telah disampaikan oleh Blakely (1989) yang mengatakan bahwa upaya pengembangan ekonomi lokal perlu adanya ketegasan/komitmen dari pemerintah daerah dan juga masyarakat lokal yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki kerjasama dengan pihak swasta/pelaku usaha ataupun dengan pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas pembangunan ditingkat daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak/belum ada ketegasan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam pengembangan budidaya hortikultura yang dapat menghambat kegiatan pengembangan tersebut.

### 3) Subsistem Agribisnis Usaha Tani

Tahap subsistem agribisnis usaha tani merupakan penyediaan prasarana dan sarana yang berupa penyediaan air baku untuk meningkatkan produksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengairannya belum baik, sebagian besar lahan hortikultura masih tergantung hujan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumenep merencanakan pengembangan jaringan irigasi air tanah (JIAT), mengingat di wilayah perencanaan air permukaan sungai dengan debit yang besar terbatas. Namun, secara empiris, penggunaan air tanah yang memerlukan pompa air ini hanya bisa dilakukan bagi beberapa kelompok tani saja yang mendapatkan bantuan berupa pompa air. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sebagian petani di Kecamatan Rubaru mengalami permasalahan dalam sistem pengairannya.

Tahap ini juga melakukan pengenalan teknologi untuk lahan pertanian yang mendukung kegiatan pengembangan. Pengenalan teknologi seperti pengolahan tanah dengan menggunakan handtraktor sudah dilakukan oleh PPL dalam kegiatan pengembangan. Namun pengenalan teknologi ini hanya pada beberapa perwakilan kelompok tani saja yang mengikuti acara penyuluhan pada pertemuan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, pengenalan teknologi ini juga terkendala dengan terbatasnya handtraktor yang diberikan kepada kelompok tani di Kecamatan Rubaru. Kelompok tani tertentu saja yang mendapatkan handtraktor guna pengolahan tanah, sehingga pengenalan teknologi ini tidak bisa secara merata diberikan dan diterima oleh petani. Selain itu, peran PPL sebagai penyuluh dalam memberikan pengenalan terhadap teknologi-teknologi dalam dunia pertanian dinilai belum optimal karena jumlah PPL yang kurang memadai untuk dibagi dalam 11 desa di Kecamatan Rubaru yang memiliki 8.492 petani yang menyebabkan pengenalan ini tidak berjalan dengan lancar. Berdasarkan hal diatas menunjukkan bahwa proses manajemen dalam kegiatan pengembangan melalui tahap subsistem agribisnis usaha tani belum menggambarkan kegiatan pengembangan yang baik dan benar, masih perlu adanya perbaikan untuk mensukseskan kegiatan pengembangan budidaya hortikultura sesuai konsep LERD.

#### 4) Subsistem Agribisnis Usaha Penunjang

Tahap subsistem agribisnis usaha penunjang merupakan tahap dalam penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan, seperti: sarana utilitas umum (jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telepon, dan internet), sarana pelayanan umum (pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, alat

perkantoran, peribadatan, rekreasi, olahraga, dan ruang terbuka hijau), dan sarana kelembagaan (badan pengelola agropolitan, kantor perbankan, koperasi, unit-unit usaha). Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap subsistem agribisnis usaha penunjang ini hanya direncanakan pada beberapa hal saja untuk Kecamatan Rubaru, seperti.

1. Sarana pelayanan umum, yaitu berupa pengembangan warnet, pendirian bank atau lembaga keuangan.

Pengembangan warnet yang direncanakan agar dapat menunjang kegiatan usaha tani dalam mendapatkan wawasan mengenai dunia pertanian. Sejauh ini di Kecamatan Rubaru belum terlaksana dan hanya sebatas pada tahap rencana. Kemudian pendirian bank atau lembaga keuangan untuk membantu permodalan petani dalam kegiatan usaha tani pengembangan budidaya hortikultura sudah terlaksana walaupun masih dalam skala kecil yang mana hanya ada pada Gabungan kelompok tani berupa uang kas yang hanya bisa membantu keuangan kelompok tani yang tergabung.

2. Sarana kelembagaan, yaitu revitalisasi dan optimalisasi peran serta fungsi kelompok tani.

Sejauh ini, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan petani atau kelompok tani masih belum berkembang dengan baik dalam pertanggungjawaban kepada anggota kelompoknya atau dapat juga dikatakan kurang adanya koordinasi dalam kelompok, baik itu dalam menyalurkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep maupun

fasilitas alat dan mesin pertanian yang diberikan sampai penerapan teknologinya pun belum terealisasi dengan baik.

3. Kebijakan pemerintah, berupa dukungan pemerintah dalam mencari investor dan membuka peluang pemasaran

Dalam pengembangan budidaya hortikultura seharusnya terdapat landasan hukum untuk menjadi acuan dalam bertindak. Di Kecamatan Rubaru sesuai dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dalam mengatur pengembangan budidaya hortikultura sehingga pada prosesnya tidak terdapat strategi pemasaran atau promosi produk hortikultura yang dapat menarik investor maupun ekspansi bisnis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani maupun memberi kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya.

4. Kegiatan Pelatihan, yaitu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PPL sebagai penyuluh pertanian lapang kepada anggota kelompok tani maupun masyarakat petani dimaksudkan dengan tujuan agar petani di Kecamatan Rubaru menjadi petani yang cerdas dan inovatif. Peneliti di lapangan menemukan suatu permasalahan bahwa dalam kegiatan pelatihan yang diberikan oleh PPL ini tidak dirasakan para anggota kelompok tani, apalagi masyarakat petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah PPL dengan jumlah petani yang tersebar di

11 desa di Kecamatan Rubaru menjadi salah satu alasan kuat mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Dalam tahap subsistem agribisnis usaha penunjang ini, dapat dikatakan bahwa pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan juga melakukan kegiatan seperti pernyataan Soemarno (2004) secara garis besar melakukan kegiatan, meliputi persiapan lahan dan petani, pelatihan usaha tani, penyediaan agroinput, alat pertanian, dan penyelenggaraan penyuluhan, terutama dilaksanakan melalui proyek yang ada di kabupaten terpilih. Walaupun tidak terlaksana secara optimal dan masih timbul permasalahan.

#### 5) Subsistem Pemasaran

Sarana pemasaran hasil pertanian berupa pasar di Kecamatan Rubaru dapat dilihat dari adanya pasar Banasare yang menjadi pasar utama komoditi hortikultura. Pasar ini merupakan tempat jual beli yang dikenal oleh para pengepul/tengkulak/konsumen dalam jumlah yang besar. Kondisi pasar Banasare yang terlihat pada gambar 15 dan 16 dapat menunjukkan bahwa pasar Banasare merupakan pasar tradisional yang memprihatinkan. Kondisi secara fisik yang memprihantikan menandakan bahwa sarana yang mendukung dalam pengoptimalan pasar belum terlaksana, seperti belum adanya tempat parkir dan bongkar muat barang secara khusus. Tempat parkir dan bongkar muat di sekitar pasar Banasare secara empiris hanyalah menggunakan bahu jalan dan tempat parkir sekedarnya, tidak ada secara khusus.

Untuk sarana jalan dan jembatan yang membantu pemasaran, berdasarkan hasil penelitian bahwa telah dijelaskan juga pada fokus tata pemerintahan bahwa



pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah melakukan pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk mendukung pemasaran. Sarana jalan yang ada di Kecamatan Rubaru sejauh ini terlihat dapat mendukung prosep pemasaran yang membuat nyaman para konsumen/tengkulak/pegepul yang menuju ke pasar tersebut. Dalam hal prasana jalan dan jembatan, peneliti tidak mendapatkan data untuk mengetahui seberapa besar tingkat perubahan dan perbaikan jalan dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura. Namun, pada saat observasi, memanglah bahwa sepanjang jalan dari kecamatan Rubaru menuju kota Sumenep terlihat jalan aspal dan tidak berlubang yang dapat mendukung proses pemasaran.

Berdasarkan kelima tahapan dalam proses manajemen untuk mendukung tercapainya tujuan dalam pengembangan budidaya hortikultura dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten Sumenep sebagai aktor yang menunjang segala fasilitas baik sarana maupun prasarana kegiatan pengembangan masih kurang melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan atau diadakan. Sedangkan kelompok tani dalam mendukung kegiatan pengembangan dengan cara berpartisipasi masih dapat dikatakan sudah baik walaupun masih terdapat kekurangan dalam penggunaan fasilitas yang diberikan.

### **c. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dapat dikatakan sebagai obyek kebijakan. Namun, ada saat tertentu dimana kelompok sasaran juga berperan sebagai subyek sebuah kebijakan. Menurut Said (2012), Kelompok saasaran menjadi penentu kesuksesan LERD, karena kelompok ini menjadi pelaksana akhir dari program atau kebijakan yang ada bersama dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Kelompok sasaran

dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, adalah kelompok tani dan masyarakat petani. Kelompok tani dan masyarakat petani disini sebenarnya diartikan beda karena kelompok tani merupakan kelompok yang terdiri beberapa orang petani sebagai anggota kelompok dengan memiliki badan hukum sesuai ketentuan pemerintah Kabupaten Sumenep. Kelompok tani disini menjadi pelaksana dalam kegiatan pengembangan dengan pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan segala fasilitas yang menunjang. Sedangkan masyarakat petani merupakan segelintir petani yang bekerja tanpa ada naungan dari kelompok tani yang berhubungan langsung dengan pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat petani disini juga tetap melaksanakan kegiatan pengembangan, namun tanpa adanya fasilitas yang diberikan. Kelompok tani maupun masyarakat petani sebenarnya merupakan SDM lokal dalam pengembangan budidaya hortikultura. Seperti yang dikemukakan dalam Said (2012) bahwa kelompok sasaran menjadi penentu dalam kesuksesan konsep LERD dimana LERD lebih menitikberatkan pada usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah.

Kelompok sasaran di Kecamatan Rubaru dalam kegiatan pengembangan budidaya hortikultura sesuai dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani dan masyarakat petani ikut serta dalam kegiatan pengembangan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala UPT. Kecamatan Rubaru bahwasanya petani di Kecamatan Rubaru memiliki sifat yang tekun/ulet dalam kegiatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang timbul, yaitu sebagian

besar petani disana masih tidak dapat menggunakan teknologi pertanian dan/atau teknologi pertanian yang digunakan tidak berkembang pada kegiatan usaha tani, penanganan serangan penyakit atau hama yang belum baik, kurangnya SDM yang terampil dalam pengelolaan dan pengoperasian sarana dan prasarana hortikultura. Hal tersebut dikarenakan tugas PPL yang memberikan informasi maupun pengetahuan hanya sebatas pada perwakilan kelompok tani tertentu saja, tidak secara menyeluruh, yang menimbulkan anggota kelompok tani yang tidak dapat merasakan adanya tugas dari PPL dalam kegiatan usaha tani. Permasalahan ini sangat bertentangan dengan pernyataan Said (2012) bahwa kelompok sasaran harus memiliki pola komunikasi yang baik dengan pemerintah agar program yang dibuat kemudian proses pelaksanaan hingga evaluasi dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga setiap kali muncul permasalahan akan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Pola komunikasi yang terjalin harus secara timbal balik, baik itu dari kelompok sasaran kepada pemerintah maupun pemerintah kepada kelompok sasaran. Permasalahan yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa pola komunikasi antara pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap kelompok tani atau para petani kurang memadai dalam kegiatan pengembangan tersebut. Kelompok tani di Kecamatan Rubaru berjumlah 200 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 20 orang memiliki perbandingan yang sangat tidak seimbang dengan jumlah PPL sebanyak 5 orang yang melaksanakan tugas lapang untuk 11 desa di Kecamatan Rubaru. Ketidakmaksimalan dalam pemberian informasi

maupun pengetahuan kepada para petani menimbulkan permasalahan tersebut tidak akan terselesaikan.

Kemudian, dalam kegiatan pengembangan budidaya hortikultura yang dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat yang sesuai dalam konsep LERD diperlukan juga peran pemerintah Kabupaten Sumenep yang bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Rubaru. Pemerintah Kecamatan Rubaru yang memiliki kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang membawahi UPT.Kecamatan Rubaru. Namun, secara empiris berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan keterlibatan pemerintah Kecamatan Rubaru belum nampak pada kegiatan pengembangan tersebut. Hal ini sesuai dari pernyataan dari pegawai kecamatan Rubaru yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa sebenarnya pihak Kecamatan Rubaru sudah berusaha untuk bekerjasama dengan pihak UPT.Kecamatan Rubaru, akan tetapi pihak UPT ini tidak melibatkan kecamatan Rubaru dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tersebut. Sedangkan menurut para petani, selama ini pihak Kecamatan Rubaru memang tidak pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan, baik itu dari segi pemberian pemberdayaan maupun perhatian lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara Dnas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep dengan pemerintah Kecamatan Rubaru tidak ada.

Permasalahan mengenai koordinasi baik dari pihak kelompok tani/masyarakat petani, pemerintah Kecamatan Rubaru maupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan belum lah selaras dengan konsep LERD. Seperti yang

dikemukakan oleh Blakely (1989:78) bahwa terdapat dua syarat utama yang harus diamati dalam proses pembangunan ekonomi lokal, yaitu pertama, proses harus dimulai oleh penyelenggara atau kelompok lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau setidaknya koordinasi pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi. Kedua, daerah pembangunan ekonomi atau zona perhatian harus ditentukan terlebih dahulu. Syarat yang pertama ini belum bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya tanaman hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Kemudian, untuk keterlibatan dunia usaha dalam mensukseskan konsep LERD melalui pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru sejauh ini belum ada. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep belum merencanakan kegiatan pengembangan tersebut untuk mengarah kepada bisnis yang secara luas dan besar yang dapat menarik investor maupun perhatian ekspansi bisnis. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya baik itu terdapatnya permasalahan internal dalam hubungan antar pemerintah kabupaten dengan kecamatan serta antara petani dengan pemerintah kabupaten /Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep dan pemerintah Kecamatan Rubaru maupun tidak adanya keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan pengembangan budidaya tanaman hortikultura menunjukkan belum terlaksananya kegiatan pengembangan tersebut dalam konsep LERD.

#### **d. Faktor Lokasi**

Salah satu pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan

Rubaru. Pengembangan budidaya hortikultura dilakukan karena memang Kecamatan Rubaru memiliki potensi dari segi SDA maupun SDMnya seperti dijelaskan pada fokus potensi di Kecamatan Rubaru. Selain itu, pemilihan lokasi pengembangan ini didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep yang bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur mulai dari analisis kesesuaian lahan, analisis kependudukan, analisis LQ komoditas hortikultura sampai pada pemetaan lahan di kawasan kecamatan Rubaru sebagai lokasi pengembangan.

Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Rubaru sesuai dari hasil penelitian memang tidak dapat dipungkiri sangatlah mendukung kegiatan pengembangan tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa dari segi kondisi geografi, SDA dan SDM mendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan. Seperti yang dikemukakan oleh Blakely (1989) bahwa salah satu syarat dalam proses pembangunan ekonomi lokal, yaitu daerah pembangunan ekonomi atau zona perhatian harus ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan zonasi untuk kegiatan pengembangan hortikultura di Kecamatan Rubaru yang sesuai dengan konsep tersebut.

Pemilihan lokasi untuk pembangunan ekonomi lokal di Kecamatan Rubaru melalui pengembangan budidaya hortikultura direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dengan perencanaan yang jelas. Perencanaan ini dapat dinilai berdasarkan konsep LERD menurut Said (2012) yang salah satu

*logical framework* atau pendekatan perencanaan dengan indikator, yaitu faktor lokasi. Faktor lokasi dalam *logical framework* LERD dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

1. Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, infrastruktur pendukung pengelolaan SDA, potensi SDA yang menjadi komoditi ekonomi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja terampil, jumlah lembaga keuangan lokal.

Adanya Potensi SDA yang menjadi komoditi ekonomi merupakan alasan utama dalam pemilihan lokasi. Kegiatan pengembangan yang dilakukan di Kecamatan Rubaru karena Rubaru memiliki potensi komoditi hortikultura yang telah dijelaskan pada fokus potensi keanekaragaman hortikultura. Selain adanya potensi yang dimiliki, pemilihan lokasi ini juga membutuhkan akses yang mudah menuju ke lokasi pengembangan.

Kemudahan akses dalam mendukung pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu mulai dari kegiatan usaha tani sampai proses pemasaran. Dalam kegiatan usaha tani, telah diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumenep telah memperbaiki jalan-jalan/infrastruktur dalam mendukung kegiatan produksi. Kemudian, seperti dalam pemasaran, pengepul/tengkulak yang datang ke pasar Banasare di Kecamatan Rubaru sejauh ini tidak mengalami kendala diperjalanan karena jalannya yang diaspal dan hampir tidak ada lubang. Selama ini proses pemasaran yang dilakukan dalam kota sejauh ini masih terbilang mudah. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Sumenep memiliki

kecamatan yang terpisah dari daratan, artinya kecamatan wilayah kepulauan. Akses menuju kecamatan-kecamatan yang terpisah dari daratan ini difasilitasi dengan adanya pelabuhan Kalianget yang dapat mengantarkan hasil pertanian komoditi hortikultura dengan jarak dari Kecamatan Rubaru menuju pelabuhan laut di Kecamatan Kalianget sekitar 25 km dengan perkiraan waktu selama 44 menit. Kemudian, di kabupaten Sumenep juga terdapat bandara trunojoyo, namun untuk pengoperasian dalam pengiriman hasil pertanian belum pernah terjadi. Akses dari Kecamatan Rubaru menuju bandara trunojoyo menempuh jarak 19 km dengan estimasi waktu 34 menit.

Sejauh ini sarana transportasi yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya hortikultura adalah pada saat pemasaran dan pasca panen. Dalam pemasaran produk pertanian, baik itu menuju pasar Banasare di Kecamatan Rubaru maupun pasar Anom di kota Sumenep, serta keluar dari Kabupaten Sumenep menggunakan transportasi pribadi, baik itu para petani maupun para pengepul/tengkulak. Sedangkan sarana transportasi pasca panen, hampir keseluruhan petani menggunakan transportasi pribadi karena hanya beberapa kelompok tani yang mendapatkan kendaraan viar untuk membantu dalam proses pasca panen.

Kemudian, pada bagian infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, infrastruktur pendukung pengelolaan SDA, ketersediaan air bersih, tenaga kerja terampil, dan jumlah lembaga keuangan lokal juga sudah dilakukan perbaikan walaupun tidak optimal dalam mendukung kegiatan pengembangan seperti dijelaskan pada fokus proses manajemen.



2. Faktor lokasi tidak terukur untuk dunia usaha yakni peluang kerjasama dan lembaga penelitian.

Kecamatan Rubaru yang menjadi lokasi pengembangan budidaya hortikultura, sejauh ini belum dapat membuka dan mendapat peluang kerjasama. Hal ini dikarenakan para petani di Kecamatan Rubaru masih memproduksi komoditi hortikultura dalam skala kecil saja, para petani disana tidak melaksanakan sistem penanaman secara serentak sehingga jika untuk memenuhi pesanan produksi hortikultura dalam jumlah besar semisal untuk perusahaan tidak akan mampu atau tidak akan tercapai.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan pengembangan tersebut, berdasarkan hasil penelitian, beberapa perwakilan kelompok tani sudah bekerjasama dengan lembaga penelitian seperti BPTP Jawa Timur dalam menuntaskan hama, membuat pupuk, cara penanaman yang baik, serta dalam pengolahan hasil pertanian khususnya komoditi hortikultura. Walaupun pelaksanaan ini tidak secara terus menerus, hanya beberapa kali saja dan untuk beberapa perwakilan kelompok tani saja.

3. Faktor lokasi tidak terukur individual meliputi kualitas pemukiman, lingkungan, pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum, etos kerja SDM.

Faktor lokasi tidak terukur individual yang meliputi kualitas pemukiman bagi para petani di Kecamatan Rubaru relatif baik, rata-rata petani di Kecamatan Rubaru memiliki rumah dengan gaya bangunan adat Madura. Hal ini dibuktikan dengan adanya data BPS Kabupaten Sumenep dalam angka 2015 yang menunjukkan jumlah rumah bertingkat 9; rumah tembok 13.865; dan

gedek 181. Lingkungan disana pun masih asri dengan dibuktikan jarak antar rumah yang tidak dekat, dan dikelilingi oleh tanah persawahan, hutan, tegal maupun pekarangan. Selain itu, udaranya pun terasa segar dikarenakan kendaraan yang melintasi jalanan sana tidaklah banyak, bahkan jarang.

Pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang ada di Kecamatan Rubaru sudah tersedia. Seperti puskesmas yang hampir disetiap desa terdapat 1 puskesmas dan ada puskesmas pembantu berjumlah 50, serta poskesdes 10, posyandu 56, praktek mantri kesehatan 16, praktek bidan 16 di Kecamatan Rubaru (BPS Kabupaten Sumenep dalam angka 2015). Untuk fasilitas sosial dan umum seperti masjid atau musholla, kantor polisi, pos pemadam kebakaran, sekolah juga sudah tersedia dengan jarak yang masih terjangkau.

Kemudian, kecamatan Rubaru yang berada diwilayah pedesaan masih menyimpan etos kerja SDM yang begitu baik. Etos kerja ini dibuktikan dengan adanya persaingan sehat dalam menjual produk pertanian para petani dan menghargai waktu dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lokasi tidak terukur individual mampu mendukung terjadinya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Ketiga aspek dari faktor lokasi menunjukkan bahwa Kecamatan Rubaru memang layak untuk dijadikan sebagai lokasi pengembangan ekonomi melalui pengembangan budidaya hortikultura walaupun belum dapat menarik perhatian bisnis maupun peluang kerjasama.

### e. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan

Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru secara garis besar berpedoman pada perda No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep. Secara garis besar, kebijakan ini masih secara umum untuk pengembangan kawasan agropolitan, masih belum dan kebijakan yang hanya fokus pada pengembangan budidaya hortikultura. Sesuai hasil penelitian, pengembangan budidaya hortikultura dilaksanakan berdasarkan rencana atas dasar keinginan Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang ingin meningkatkan produksi hortikultura sesuai SOP budidaya hortikultura supaya menghasilkan dengan kualitas yang baik. Menurut Said (2012), salah satu indikator dalam perencanaan pengembangan berdasarkan konsep LERD, yaitu keterkaitan dan fokus kebijakan yang melibatkan 3 (tiga) unsur. Tiga unsur dalam keterkaitan dan fokus kebijakan, yaitu adalah sebagai berikut.

- 1) Perluasan ekonomi, yakni meliputi kebijakan investasi, promosi persaingan usaha, peran perusahaan daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, dan pengembangan keahlian.

Sesuai dari hasil penelitian, dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura tidak terlihat adanya kebijakan yang mengatur investasi, promosi persaingan usaha, peran perusahaan daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, maupun pengembangan keahlian yang mendukung kegiatan pengembangan tersebut di Kecamatan Rubaru.

- 2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas, meliputi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan swasta dan kebijakan pengurangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru secara jelas memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, untuk kebijakan secara legal seperti peraturan yang mengatur pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan swasta dan pengurangan kemiskinan sejauh ini belum ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura. Hanya sebatas kebijakan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep yang menetapkan perlunya pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan komunitas dalam mendukung pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dilakukan tanpa adanya kebijakan secara legal.

- 3) Pembangian wilayah, meliputi kebijakan kawasan industri, pusat pertumbuhan, pengembangan ekonomi, kerjasama antar daerah, tata ruang LERD, jaringan usaha antar sentra dan sistem industri berkelanjutan.

Kecamatan Rubaru yang menjadi lokasi dalam pengembangan budidaya hortikultura merupakan suatu keputusan yang diatur dalam perda No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033 sebagai wilayah

pengembangan untuk kawasan agropolitan. Kemudian, untuk kebijakan kerjasama antar daerah, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan maupun tata ruang LERD sejauh ini masih belum diatur oleh pemerintah daerah dalam mendukung pengembangann budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru.

Tiga unsur dari indikator keterkaitan dan fokus kebijakan dalam pengembangan budidaya hortikultura dapat dikatakan tidak terlaksana dengan baik. Sehingga, dapat dsimpulkan bahwa dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru belum dilaksanakan sesuai dengan adanya konsep LERD.

#### **f. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu indikator dalam kajian LERD. Dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sudah merencanakan kegiatan pengembangan ini dengan memandang jauh kedepan, seperti melakukan analisis kependudukan, kesesuaian lahan, kebutuhan sarana dan prasana bahkan rencana pengembangan yang telah disajikan pada penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebenarnya tidak begitu paham akan pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan budidaya hortikultura. Namun, berbeda dengan pihak UPT.Pertanian selaku petugas lapang yang menyatakan bahwa Bappeda sudah memiliki rencana kedepan dalam membangun ekonomi secara berkelanjutan dengan membuka dan mengijinkan industri kecil di wilayah pengembangan. Hal tersebut menandakan bahwa koordinasi antara dinas masih

kurang terjalin dengan baik dan ketegasan pemerintah dalam melaksanakan rencana terbukti tidak konsekuen.

Secara singkat, menurut Said (2012), pembangunan berkelanjutan melibatkan 3 unsur yang meliputi unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut, yaitu (Asdak, 2012:40-42):

- 1) Ekonomi, yaitu sebagai upaya mempertahankan/menjaga kapital agar tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan. Keseluruhan kapital yang dimaksud yaitu berupa sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial.
- 2) Sosial, yaitu sebagai upaya yang lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas daripada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Seperti adanya kombinasi dari hubungan sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan hukum, disiplin dan moralitas yang akan menciptakan tercapainya keberlanjutan sistem sosial dengan bantuan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan secara sistematis.
- 3) Lingkungan, yaitu sebagai upaya yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia di Bumi yang ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Manusia dalam beraktivitas harus mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga menuntut manusia harus mampu belajar untuk hidup selaran dan tidak “melawan” Hukum lingkungan.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep ini masih belum dapat menggambarkan pengembangan berbasis pembangunan berkelanjutan sesuai

dengan konsep LERD. Padahal kawasan pengembangan ini memiliki potensi yang dapat mencapai tujuan sesuai dengan konsep LERD yang mencakupi ketiga unsur dari pembangunan berkelanjutan secara aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru tidak berbasis pada pembangunan berkelanjutan sesuai dari konsep LERD dikarenakan tidak ada upaya dalam melaksanakan ketiga unsur tersebut.

Dalam pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, memang tidak semua langkah-langkah dalam LERD dilaksanakan dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Seyogyanya, pada pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru dapat dilaksanakan sesuai konsep LERD. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa masukan strategi sebagai saran guna dapat mengembangkan secara optimal dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru. Strategi tersebut merupakan opsi-opsi pengembangan dengan mengacu pada teori *local economic resources development* (LERD) dalam mencapai sasaran-sasaran ekonomi dan juga visi-misi kabupaten Sumenep. Adapun masukan strategi dalam pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru tertera dalam bagan matriks hasil penelitian berikut ini.

**Pengembangan Budidaya Hortikultura berbasis LERD di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep**

**Potensi dalam pengembangan budidaya hortikultura**

**Sebagai Kekuatan :**

- a. Kenakeragaman hortikultura yang melimpah
- b. Lahan pertanian yang mendukung dari segi luas dan tekstur tanah.
- c. Ketersediaan tenaga kerja yang banyak
- d. Tersedianya Pasar

**Sebagai Kelemahan :**

- a. Penggunaan lahan pertanian yang tumpang tindih antara hortikultura dengan komoditas yang lain
- b. Penggunaan Teknologi konvensional/tradisional
- c. Pasar yang kurang mendukung

**Sebagai Peluang :**

- a. Perkembangan teknologi pertanian, teknologi pengolahan hasil, teknologi informasi yang semakin maju
- b. Pasar yang berkembang luas

**Identifikasi Penerapan konsep LERD dalam Pengembangan Budidaya Hortikultura**

**Tata Pemerintahan**

- a. Pelaksanaan dalam pengelolaan SDA kurang berkoordinasi dengan petani.
- b. Pelaksanaan dalam pembangunan SDM kurang merata.
- c. Tidak ada koordinasi dengan dinas lainnya dalam pengelolaan SDA maupun SDM.
- d. Kurangnya pemenuhan produk pertanian komoditi hortikultura di pasar lokal kawasan Kabupaten Sumenep

**Proses Manajemen**

- a. Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana.
- b. Tidak ada pengawalan atau pengawasan terhadap pendistribusian dan penggunaan sarana & prasarana
- c. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pengolahan produk pertanian.
- d. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengembangkan budidaya hortikultura.
- e. upaya untuk meningkatkan kesadaran kelompok petani dan masyarakat petani dalam kegiatan pengembangan masih belum optimal.

**Kelompok Sasaran**

- a. Kualitas SDM yang dimiliki untuk mendukung pengembangan budidaya hortikultura masih relatif rendah.
- b. Pola komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan petani, pemerintah kabupaten, petani dengan pemerintah kabupaten, dan petani dalam kelompok masih belum terkoordinasikan dengan baik.

**Faktor Lokasi**

- a. Akses menuju lokasi pengembangan didukung dengan infrastruktur yang baik.
- b. Lokasi pengembangan berada di wilayah pedesaan.
- c. Lokasi pengembangan belum memiliki dan mendapatkan peluang kerjasama

**Keterkaitan dan Fokus Kebijakan**

- a. Tidak ada kebijakan khusus dalam pengembangan budidaya hortikultura.

**Pembangunan Berkelanjutan**

- a. Tidak ada kerjasama dengan pihak bisnis dan pertumbuhan investasi

**Perumusan Strategi berbasis LERD**

- 1. Menyusun rencana dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk mendukung kegiatan pengembangan;
- 2. Menyusun rencana pembangunan SDM secara merata dengan menggunakan konsep LERD;
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian komoditi hortikultura.

- 1. Meningkatkan aspek keuangan melalui komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan budidaya hortikultura.
- 2. Menerapkan sistem pengawasan dan pengawalan dalam kegiatan pengembangan
- 3. Menerapkan teknologi yang tepat guna dalam pengembangan budidaya hortikultura
- 4. Meningkatkan program promosi hasil pertanian komoditi hortikultura, baik hasil pasca panen maupun pengolahannya.

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura;
- 2. Memperkuat pola komunikasi antara SDM dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura.
- 3. Mengajak SDM untuk berpartisipasi pada kegiatan pengembangan budidaya hortikultura
- 4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara petani dengan pemerintah daerah

- 1. Meningkatkan dan memperluas akses peluang kerjasama dalam rangka mendukung pengembangan budidaya hortikultura
- 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan
- 3. Membangun pusat sentra agribisnis untuk pengembangan budidaya hortikultura

- 1. Menyusun kebijakan secara tertulis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dari segala aspek;

- 1. Menyediakan *roadmap* pengembangan budidaya hortikultura untuk kemudahan iklim investasi.
- 2. Mengadakan kerjasama dengan pihak bisnis untuk mendukung dengan pengembangan budidaya hortikultura

Gambar 24. Bagan Matriks Hasil Penelitian



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi serta sesuai data yang telah disajikan dan dibahas oleh peneliti tentang “Pengembangan Budidaya hortikultura berbasis *Local Economic Resources Development* (LERD) di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman hortikultura di Kecamatan Rubaru, pemanfaatan lahan pertanian yang sudah dirintis, serta adanya pasar yang mendukung dalam pemasaran hasil pertanian komoditi hortikultura, yaitu pasar Banasare di Kecamatan Rubaru dan pasar Anom di Kabupaten Sumenep. Kemudian, Masih terdapat beberapa permasalahan pada potensi dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yaitu meliputi: belum adanya pengklasifikasian lahan terhadap komoditi hortikultura yang didukung dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, tenaga kerja di Kecamatan Rubaru masih belum berkembang, serta pelayanan

pemerintah kepada masyarakat dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana kurang maksimal.

2. Pengembangan budidaya hortikultura berbasis LERD di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep meliputi indikator dari perspektif LERD, yaitu tata pemerintahan, proses manajemen, kelompok sasaran, faktor lokasi, keterkaitan dan fokus kebijakan, serta pembangunan berkelanjutan. Pada Pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang dianalisis dengan menggunakan konsep LERD masih terdapat beberapa permasalahan yakni: belum adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura, tidak adanya pengawasan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam pendistribusian fasilitas yang diberikan kepada kelompok tani, tidak adanya pengawasan lebih lanjut pada proses kegiatan pengembangan budidaya hortikultura dan pada penggunaan teknologi yang diberikan, serta tidak adanya keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan pengembangan budidaya tanaman hortikultura. Sehingga, pada pengembangan tersebut belum mencerminkan pelaksanaan pengembangan yang berbasis LERD karena pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaannya belum memanfaatkan secara optimal dari segi SDA dan SDM lokal guna mensejahterakan masyarakat lokal dibuktikan dengan pengembangan yang sudah terlaksana beberapa tahun ini tidak terlihat dapat memberikan kesempatan kerja maupun peningkatan pendapatan petani.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sesuai dengan fenomena di lapangan, maka peneliti mencoba memberikan masukan sebagai saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam kegiatan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan lebih memperhatikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDM terlebih dahulu sesuai dengan konsep LERD. Mengingat bahwa kedua hal tersebut mempunyai andil yang besar terhadap proses pelaksanaan pengembangan hortikultura guna meningkatkan perekonomian masyarakat lokal terutama di Kecamatan Rubaru. Selain itu, juga dapat menguntungkan di masa yang akan datang apabila dapat dikembangkan dengan baik. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan berusaha memberikan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan dan pengembangan dan pemerintah Kabupaten Sumenep dapat menjalankan perannya sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan.
2. Pengembangan budidaya hortikultura akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antar aktor yang terlibat dalam pengembangan. Kerjasama dan koordinasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pengembangan budidaya hortikultura merupakan cara yang baik untuk mendukung terwujudnya tujuan pengembangan. Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan

masyarakat petani dapat diwujudkan dengan pendekatan pemerintah daerah dalam mengayomi, membimbing maupun memonitoring dalam pelaksanaan pengembangan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru, serta pemberian dukungan secara moril maupun materil. Kemudian untuk koordinasi dan kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan pemerintah daerah tidak mendahulukan kepentingan sendiri, dan pihak swasta diharapkan juga dapat memberikan dukungan dengan baik yang dapat mendorong kegiatan pengembangan. Selain itu, bagi pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam kegiatan pengembangan budidaya hortikultura kepada masyarakat petani harus adanya transparansi agar dapat memupuk rasa kepercayaan dan tanggungjawab. Sehingga, pengembangan budidaya hortikultura dapat terlaksana didasarkan pada situasi faktual atas permasalahan, kebutuhan, dan harapan masyarakat petani yang benar-benar penting untuk dibenahi dan dikembangkan.

3. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebaiknya menyusun suatu kebijakan secara legal, seperti peraturan dalam pengembangan budidaya hortikultura agar aktor yang terlibat dalam pengembangan khususnya pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya secara transparan dan optimal, serta bertanggungjawab dan bagi masyarakat petani agar dapat memanfaatkan dan mengelola SDA yang ada dengan optimal dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, diperlukannya inisiatif pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan pengembangan budidaya hortikultura yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis : Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Bappeda Kota Batu. 2007. *Materi Lokakarya: Local Economic Resources Development (LERD)*. Un-published
- Blakely, Edward J and Ted K.Bradshaw. 2003. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice. Third Edition*. New Delhi: VISTAAR Publications
- Blakely, Edward J. 1989. *Planning Local Economic Development: theory and Practice*. Sage Publications, Inc
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Edisi ketiga. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. 2012. *Cetak Biru Pengembangan Hortikultura Tahun 2011-2025*. Jakarta
- FAO. 1995. *Planning For Sustainable Use of Land Resources: Toward a new Approach*. Rome: FAO Land and Water Bulletin
- Febrian, Billal M dan Dewi Sawitri Tjokropandojo. 2014. *SDM Manusia dan Kinerja Petani sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Kasus: Desa Tegallea, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur*, diakses pada tanggal 10 November 2015 pukul 09.46 WIB melalui <http://sappk.itb.ac.id/jpwk1/wp-content/uploads/2014/04/V1N2517-526.pdf>
- Febrianto, Arie. 2013. *Pengantar Agroindustri*. UB Distance Learning
- Hanani, Nuhfil dkk. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- HIS. 2006. *Concept of Local Economic Development*. Rotterdam: Course Material of LED
- Ilham, Muchammad Abu. 2015. *Strategi Pengembangan Pertanian Padi Berbasis Local Economic Resources Development (LERD) (Studi pada Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Un-published

- Islamy, M. Irfan. 2003. *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: UB Program Pascasarjana
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Pratiknya di Indonesia*. LP3ES
- Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK ITB. 2009. “*Local Economic Resources Development, Niigata 1-13 Juni 2009*”, diakses pada tanggal 01 November 2015 pukul 09.00 WIB melalui <http://www.sappk.itb.ac.id>
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019*, diakses pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.00 WIB melalui [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)
- Kusdi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Master Plan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033
- Mosher. A.T. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Diterjemahkan oleh S.Krisnandhi dan Bahrin Samad. Jakarta: CV. Yasaguna
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Nastiti, Imaniar. 2010. “*Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Resources Development)*”, diakses pada tanggal 11 November 2015 pukul 08.00 WIB dari <http://slideshare.net/Bulbulkoala/k5-pengembangan-ekonomi-lokal-new>
- Nirwansyah, Anang Widhi. 2012. “*Konsep Lerd or Led*”, diakses pada tanggal 09 November 2015 pukul 08.15 WIB melalui <http://www.scribd.com/doc/76989671/Konsep-Lerd-or-Led>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033
- Rachmawati, Rini. 2010. *Pokok-pokok Pikiran Menuju Kesuksesan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Kabupaten Purworejo*, diakses pada tanggal 10 November 2015 pukul 09.10 WIB dari [http://dppm.uui.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UII\\_04.\\_3038\\_Makalah\\_Rini\\_R\\_Simposium\\_Purworejo\\_11\\_Juli\\_2010.pdf](http://dppm.uui.ac.id/dokumen/dikti/files/DPPM-UII_04._3038_Makalah_Rini_R_Simposium_Purworejo_11_Juli_2010.pdf)
- Rangkuti, Freddy. 2010. *Analisis SWOT membedah kasus Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Riggs, Fred W. (ed). 1994. *Administrasi Pembangunan (Sistem Administrasi dan Birokrasi)*. Diterjemahkan oleh Luqman Hakim. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Said, Abdullah. 2012. *Konsep Local Economic Resources Development (LERD)*. Makalah disampaikan dalam program substantif LERD. 34 halaman. Malang: RCCP FIA Universitas Brawijaya
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemarno,MS. 2004. *Kumpulan Makalah Ilmiah: Pengembangan Ekonomi Wilayah Jawa Timur, Sinergi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Alam, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia*. Malang: UB Program Pascasarjana.
- Soetrisno, Loekman. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
- Solahuddin, Soleh. 1999. *Kinerja Pembangunan Pertanian (Kabinet Reformasi Pembangunan)*. Departemen Pertanian RI
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia.
- Yuwono, Triwibowo dkk. 2011. *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Zauhar Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: IKIP
- Zauhar, Soesilo. 2012. *Reformasi Administrasi (Konsep, Dimensi, dan Strategi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

## Lampiran 1. Daftar Nama Kelompok Tani Kecamatan Rubaru 2016

### 1. Desa Rubaru

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
1	KWT. TENDA BIRU	RUBARU	2011	IDA ROYANI	20	2,5	13,5	2,0
2	ADI RASA	RUBARU	2013	AHMAD	20	2,5	14,0	1,5
3	BARU SEMI	RUBARU	2008	MOH JAHRI	22	2,5	14,5	1,5
4	BARU BANGKIT	RUBARU	2014	MOH. HASIP	20	3,0	14,0	1,5
5	AL - IKHLAS	RUBARU	2008	HAIDI	20	2,5	14,0	1,5
6	SUMBER BARU	RUBARU	2012	MAT LAWI	21	2,5	14,0	1,5
7	AL - HIKMAH	RUBARU	2010	PUNAWI	21	2,0	13,5	1,5
8	MERPATI	RUBARU	2009	SUWARNO	22	3,0	14,0	1,5
9	IDAMAN HATI	RUBARU	2011	WIWIK HERAWATI	20	2,0	13,0	1,2
10	USAHA MULYA	RUBARU	2003	MOH IDRIS	22	3,0	16,0	2,0
11	DARUS SALAM	RUBARU	2007	H. ABDULLAH NUR	21	2,0	18,0	1,0
12	KARUNIA ILAHI	RUBARU	2012	SUDJAK	20	4,0	18,0	2,0
13	BARU MUNCUL	RUBARU	2010	SUTAWIR	20	2,0	14,0	1,5
14	PANCOR JAYA	RUBARU	2009	MOH JATEM	23	2,0	13,0	1,5
15	TUNAS HARAPAN	RUBARU	2008	MOHAMMAD ZAINI	21	2,0	13,0	1,0
16	SUKA TANI	RUBARU	2011	ERSAT	20	2,0	13,0	1,5
17	NABIL	RUBARU	2013	MASSURI	20	3,0	14,0	2,0
18	KEMBAR JAYA	RUBARU	2013	SAHRAJI	20	2,0	13,0	1,5
19	BERDIKARI	RUBARU	2013	ABD. HAYYI	20	2,0	13,0	1,5
20	AMANAH	RUBARU	2013	HAMID	22	2,0	16,0	2,0
21	BARU JAYA	RUBARU	2013	MOHAMMAD ERFAN	21	3,0	16,0	2,0
22	TUNAS JAYA	RUBARU	2013	MOH. NASIRUDDIN	20	3,0	26,0	2,0
23	NURUL MUTTAQIM	RUBARU	2003	A. WAIDI	21	2,5	16,0	1,5
JUMLAH					477	57	343,5	36,7



## 2. Desa Mandala

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
24	JANOR KUNING	MANDALA	2013	KUDDUS	20	2,5	14,0	3,5
25	IVOMA PERMAI	MANDALA	2003	ILYASIN	21	2,8	21,0	2,5
26	MANDALA PUTRA	MANDALA	2011	ABDUR RA'UF	22	3,5	18,0	2,2
27	SARI REJEKI	MANDALA	2009	BURIDIN	22	0,0	22,5	2,2
28	KWT BUNGA CEMPAKA	MANDALA	2011	MAHDANI	24	2,0	18,5	1,5
29	KARANG ABADI	MANDALA	2013	SIMON	24	0,0	19,5	2,0
30	HARAPAN JAYA	MANDALA	2003	RAHMAN	24	3,2	18,0	2,1
31	KWT BCL	MANDALA	2012	MARYATUN	25	3,0	14,0	2,3
32	LA-TANZA	MANDALA	2011	AHMADI	25	0,0	20,2	1,2
33	NAILUL AMWAL	MANDALA	2007	AHYAR H. AFFAN	26	0,0	18,5	2,4
34	KWT THOLABUL MAL	MANDALA	2007	LISMAWATI	23	0,0	23,5	1,5
35	SUMBER BARU	MANDALA	2008	ABU RAHMAN	20	0,0	16,0	1,2
36	MASA DEPAN II	MANDALA	2001	ACH. SYAFIT	20	0,0	26,5	2,3
37	KARANG JATI	MANDALA	2005	ABU HASAN	20	0,0	18,5	2,6
38	KWT MELATI	MANDALA	2005	SALAMI	20	2,8	19,0	2,0
39	AL-HIDAYAH	MANDALA	2007	MUDARRA	20	0,0	18,0	2,0
40	ZAM ZAM TZANI	MANDALA	2007	H. SIDIK	26	2,5	26,0	2,5
41	AL-JIHAD	MANDALA	2007	H. ABD. ADIM	21	0,0	15,5	2,0
42	KWT TERATAI	MANDALA	2012	MASWIYA	21	0,0	17,5	1,5
43	KWT TUNAS MEKAR	MANDALA	2010	SUSMIYATI	21	0,0	15,0	2,0
44	TUNAS MUDA	MANDALA	2007	HARI	20	0,0	14,5	2,0
45	KWT LESTARI	MANDALA	2012	MASDIYA	21	0,0	16,5	1,5
46	KWT BUNGA HARAPAN	MANDALA	2012	RISKIYA	23	0,0	17,0	2,0
47	JAYA MULYA	MANDALA	2009	ATROMO	22	2,0	18,0	2,0
48	CAHAYA	MANDALA	2013	MOH. DAYAT	22	2,0	14,0	2,0
49	SUMBER BUNGA	MANDALA	2007	HEDAR	24	2,2	21,5	1,5
50	KWT BUNGA MAWAR	MANDALA	2012	MARBIATUN	20	2,5	22,0	1,5
51	CAKRAWALA	MANDALA	2012	MASPU, S. Th.I	25	0,0	23,5	2,0
52	AL-IKHLAS	MANDALA	1999	H. ABDULLAH	24	2,0	17,0	2,0
53	KWT MAWAR INDAH	MANDALA	2000	SRI SUSANTINA	22	1,5	15,0	1,0
54	KWT PRIMADONA	MANDALA	2013	QORI'AH	21	1,5	14,5	1,0
55	ANUGERAH	MANDALA	2013	ZAINUDDIN	20	2,0	16,0	1,5
<b>JUMLAH</b>					<b>709</b>	<b>38</b>	<b>589,2</b>	<b>61,5</b>

### 3. Desa Pakondang

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
56	KWT KEMUNING ASRI	PAKONDANG	2012	NUR HASANAH	25	2,0	14,3	2,4
57	TUNAS HARAPAN	PAKONDANG	2012	MOH. HAMZAH	26	2,0	18,0	2,5
58	PATAPAN	PAKONDANG	2007	ASMURI	25	2,0	21,0	3,0
59	AL-KARHOMAH	PAKONDANG	2009	MOH. HASAN BAKRI	23	2,0	16,0	2,0
60	AL-MARZUKI	PAKONDANG	1999	MOH. ERSAD	21	2,0	22,0	3,0
61	SUBUR MULYA	PAKONDANG	2012	SLAMET READY	25	2,0	23,5	2,2
62	AN- NAJAH	PAKONDANG	2003	MANSYUR	25	2,0	16,0	2,0
63	SATREA	PAKONDANG	2012	BAISUQI	22	2,0	17,5	3,0
64	KWT CAHAYA TANI	PAKONDANG	2012	KHOTIMAHTUL HASANAH	21	2,0	16,0	2,0
65	SEJAHTERA	PAKONDANG	2004	DA'EM	27	2,0	19,5	1,5
66	SUMBER HASIL	PAKONDANG	2008	MOH. JUCHA	23	3,0	18,0	3,5
67	KWT AL-BADRI	PAKONDANG	2010	NURSAHEMAH	20	2,0	24,0	3,0
68	HASIL BUMI	PAKONDANG	2008	ACH. SUGIANTO	20	2,0	18,0	3,0
69	NURUL IMAN	PAKONDANG	2000	MOH. NUR	22	2,5	17,5	3,5
70	AL-QODIRI	PAKONDANG	2010	K. SUDAHRI	20	2,0	16,5	3,0
71	AL-ICHWAN	PAKONDANG	2007	ABU SAIRI	23	2,0	18,5	2,4
72	KWT MATAHARI	PAKONDANG	2013	ERVINA RATNASARI	23	2,0	16,0	3,6
73	KWT MELATI	PAKONDANG	2012	SRI HIDAYATI	23	1,5	14,0	2,0
74	BALANG KONDANG	PAKONDANG	1994	Drs. THALABUDDIN M. KH	26	2,0	14,5	1,5
75	SETIA MANDIRI	PAKONDANG	2008	MAT SALEH	20	2,0	16,0	1,0
JUMLAH					435	41	356,8	49,1

#### 4. Desa Matanair

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
76	HARAPAN JAYA	MATANAIR	2013	HENDRI	21	1,7	15,0	2,5
77	KWT. SAKANCAAN	MATANAIR	2014	HOZAIMATUN	20	1,5	13,0	2,5
78	KHOBBUL WATHON	MATANAIR	2001	MOHAMMAD GANI	22	3,0	17,0	2,5
79	KWT AL-MASTRURIYAH	MATANAIR	2012	KISRAWIYAH	20	1,5	14,0	2,0
80	SUMBER HASIL	MATANAIR	2003	AMZA	21	1,5	17,0	1,9
81	BARAKAS	MATANAIR	2010	ABD. RAZAK	21	2,0	17,0	1,5
82	SUMBER URIP	MATANAIR	2008	AHRUPAT	21	2,0	19,0	2,5
83	SUKA MAJU	MATANAIR	2003	MASHARI YADI	20	2,0	17,0	3,0
84	KWT MAWAR INDAH	MATANAIR	2012	KHALIFAH	20	1,5	14,0	2,5
85	BUNGA	MATANAIR	2003	ACH. SHOLEH	22	3,0	17,0	3,5
86	KWT AL - FAJRI	MATANAIR	2007	MAR'ATUL MUSLIMAH	21	1,0	16,0	2,5
87	SUMBER BENING	MATANAIR	2008	MOHAMMAD	20	1,5	18,0	3,5
88	KWT SARE TAMAN	MATANAIR	2012	SULAIHA	20	1,0	17,0	2,5
89	AMANAHAH	MATANAIR	2013	MOH. ALBADRI	22	1,5	17,0	3,0
90	KWT SAKINAH	MATANAIR	2003	KHAIRATUN NAIMAH	20	1,5	19,0	3,0
91	SEKAR MULYO	MATANAIR	2007	SUBAHRI	20	1,0	14,5	2,0
92	KWT MERAH DELIMA	MATANAIR	1997	EMRANI	20	1,0	14,5	2,5
93	KWT SEKAR KERATON	MATANAIR	2012	NORYATUL KHATIMAH	20	1,5	14,5	2,0
94	MURNI	MATANAIR	2004	HASAN BISRI	22	1,5	16,0	2,5
95	ANJUNG	MATANAIR	2000	MARKASAN	20	1,5	15,0	2,0
JUMLAH					413	32,7	321,5	49,9

## 5. Desa Tambaksari

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
96	SUMBER URIP	TAMBAKSARI	2013	YAHYA	21	5,0	12,5	2,5
97	MAKMUR ABADI	TAMBAKSARI	2013	MUKHTAR	20	4,5	15,0	2,5
98	KWT DAHLIA	TAMBAKSARI	2013	ISAWATI	25	4,0	13,5	2,5
99	SUPER MANTAP	TAMBAKSARI	2013	RUDI HARTONO	23	6,0	12,0	3,0
100	KWT BAROKAH	TAMBAKSARI	2012	UMMIYATUN	21	5,0	14,0	2,0
101	BINATANI	TAMBAKSARI	1998	SUCIPNO	20	8,0	21,0	4,5
102	KWT CEMPAKA	TAMBAKSARI	1999	ARMONA	20	4,5	16,0	3,5
103	SUMBER REJEKI	TAMBAKSARI	1997	MASRAMU	24	5,5	15,0	2,5
104	TUNAS BANGSA	TAMBAKSARI	2011	SURAHWI	20	3,0	14,0	2,0
105	AL-IKHLAS	TAMBAKSARI	2007	MOH. HALIL	23	7,0	14,5	3,5
106	KWT KARUNIA ILAHI	TAMBAKSARI	2011	IDA	20	4,5	13,5	3,5
107	NAGERE	TAMBAKSARI	2012	MUHDARUN	20	4,5	19,0	2,0
108	BERTANI	TAMBAKSARI	2013	MUHLIS	20	3,5	16,5	2,0
JUMLAH					277	65	196,5	36

## 6. Desa Banasare

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
109	KERAMAT	BANASARE	2013	TOHARI	20	3,0	7,0	1,1
110	BUNGA AYU	BANASARE	2013	TAHIRA	20	2,0	5,5	1,0
111	KENANGA	BANASARE	2013	SUDI, S.Pd	25	2,5	7,5	1,0
112	KWT MAHARANI	BANASARE	2011	SUMARNI	23	1,5	6,0	1,5
113	ASY SYAKUR	BANASARE	2002	H. FATHORRAHMAN, S.Pd.I	26	4,0	12,0	1,5
114	SUMBER REJEKI	BANASARE	2005	MATRASIT	24	2,0	6,5	1,0
115	AN - NUR	BANASARE	2011	SUGIMAN	21	3,0	7,0	1,5
116	BUNGA DESA	BANASARE	2007	ABDU	20	3,5	8,5	1,0
117	SETIA BAKTI	BANASARE	2013	JUNI	20	1,5	6,0	1,0
118	AL - ISTIQOMAH	BANASARE	2007	WATZEN RIANZAH	22	3,0	8,5	1,2
119	KWT MEKAR SARI	BANASARE	2011	SAKIYA	23	2,0	6,0	1,1
120	KWT SUMBER SARI	BANASARE	2007	FARIDA	22	1,5	6,0	1,1
121	SUKA MAJU	BANASARE	2010	SURAKSO	22	2,5	7,0	1,2
122	BUNGA SEROJA	BANASARE	2007	MURAHMAN	24	1,5	8,0	1,2
123	MELATI PUTIH	BANASARE	2007	JUMATRO	24	2,5	7,0	1,0
124	TUNAS HARAPAN	BANASARE	2007	MAKKI	23	2,0	6,5	1,1
125	JOKOTOLE	BANASARE	2007	MATRAWI	21	2,0	7,0	1,5
126	MEKAR JAYA	BANASARE	2011	AKH. FAJAR	22	0,0	7,0	1,5
127	BAROKAH	BANASARE	2007	ABDULLAH	20	3,0	8,0	1,5
128	AL - AHKAM	BANASARE	2005	SYAMSUL ARIFIN	22	2,0	6,5	1,0
129	SUKA MAKMUR	BANASARE	2008	ABU SANAH	24	4,0	7,5	1,5
130	KWT MAWAR MERAH II	BANASARE	2006	HALIMATUS SA'DIYAH	25	4,0	7,0	1,5
131	ATTHOYYIBAH	BANASARE	2007	TAYYIB	22	2,0	7,0	1,0
132	KWT AISYAH	BANASARE	2012	SUHARTINI	20	0,0	7,0	1,5
133	PUTRA TUNGGAL	BANASARE	2012	SUNARTO	22	2,0	8,0	1,0
134	KWT REJEKI	BANASARE	2004	RINI	20	0,0	6,0	1,0
JUMLAH					577	57	186	31,5

## 7. Desa Bunbarat

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
135	SERBAGUNA II	BUNBARAT	2003	SAHIRUDDIN	25	5,0	15,0	3,0
136	BAROKAH	BUNBARAT	2004	ZAINUDDIN	25	7,0	15,0	2,0
137	KWT MELATI	BUNBARAT	2005	JUNA'IDA	24	3,0	12,0	2,0
138	KWT SEKAR WANGI	BUNBARAT	2006	MU'ESA	24	3,0	13,0	2,0
139	KWT DARUSSALAM	BUNBARAT	2006	KUSMIYATI	22	2,0	8,0	2,0
140	SUMBER TELAS	BUNBARAT	2006	MASRITO	25	5,0	14,0	2,0
141	GAYA BARU	BUNBARAT	2005	M. NIDA	25	5,0	16,0	2,0
142	BUNGA TANJUNG	BUNBARAT	2004	MAHI	25	5,0	16,0	2,0
143	BINA SEJAHTERA	BUNBARAT	2011	MA'MUM	25	3,0	12,0	3,0
144	SERBAGUNA III	BUNBARAT	2008	SAHNAWI	21	3,0	24,0	2,0
145	SUMBER ANYAR	BUNBARAT	2013	SYAMSUL ARIFIN PJ	20	4,0	13,0	2,0
146	SURAMADU	BUNBARAT	2011	DARUN	24	3,0	15,5	0,5
147	LANGIT BIRU	BUNBARAT	2013	TOLA' AMIR FATA	20	2,0	8,0	1,0
JUMLAH					305	50	181,5	25,5

## 8. Desa Karangnangka

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
148	KWT NURUL IJTIHAD	KARANGNANGKA	2013	SA'ATUN	20	2,0	14,5	2,5
149	RAMPAK NAONG	KARANGNANGKA	2013	NAILI	20	2,0	15,0	2,5
150	KWT ROSELA INDAH	KARANGNANGKA	2013	RUSTININGSIH, S. Pd	20	2,0	15,5	3,0
151	JAYA MULYA	KARANGNANGKA	2005	BURHAN DWI SAPUTRO	21	2,5	17,0	2,5
152	AMPAL AGUNG	KARANGNANGKA	2003	MOHAMMAD HAZIN	22	2,0	13,5	2,3
153	KWT AN-NUR	KARANGNANGKA	2013	HOSNIYAH	22	2,0	13,5	2,3
154	TELAGA BIRU	KARANGNANGKA	1996	SIRAJUDDIN	24	2,5	16,0	3,0
155	AL-BAROKAH	KARANGNANGKA	2004	ISMAIL	20	6,5	22,3	2,4
156	SURYA ABADI	KARANGNANGKA	2012	SYADALY	24	2,0	18,0	2,5
157	GEMAR TANI	KARANGNANGKA	2011	AHMAD READY	23	2,0	15,0	2,5
158	USAHA MAKMUR	KARANGNANGKA	2008	ZAINAL	20	2,0	14,0	2,6
159	BUNGA MELATI	KARANGNANGKA	2007	AHMADI	22	2,5	17,5	2,0
160	KARANG TANI	KARANGNANGKA	2013	JUHARI	20	2,0	14,0	2,5
161	SEKAR PUTIH	KARANGNANGKA	2013	MOH. DAWI	21	2,0	14,5	2,0
162	KWT BUNGA MAKMUR	KARANGNANGKA	2000	SAREYANI	20	2,0	16,5	2,5
163	SUMBER REJEKI	KARANGNANGKA	2000	RASYID	20	2,5	17,5	2,0
JUMLAH					339	38,5	254,3	39,1

## 9. Desa Basoka

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
164	PUTRA BASOKA	BASOKA	2009	MU'JIZAT	20	4,0	17,0	1,5
165	KWT PUTRI KENANGA	BASOKA	2012	LUTFIYAH	22	2,0	14,0	1,5
166	AL - HIKMAH	BASOKA	2009	A. FAOZI	20	2,5	15,0	1,0
167	SUMBER URIP	BASOKA	2007	MAHFUT	20	3,4	16,0	1,2
168	BERKAH	BASOKA	2011	AH. FENDI	23	3,5	18,0	1,5
169	PUTRA TOGULUK	BASOKA	2012	JUBRI	21	0,0	19,0	1,0
170	SAMURAI	BASOKA	2013	MUZAMMIL	20	2,0	17,0	1,2
171	SUKA MAJU	BASOKA	1999	MATRAIS	21	2,0	17,0	1,0
172	NURUS SYAFA'AH	BASOKA	2001	MANSUR	20	0,0	17,0	1,0
173	PERINTIS	BASOKA	2011	ABU SYAIRI YANTO	20	4,0	14,0	1,0
174	JOKOTOLE	BASOKA	2013	ABD. MU'IN	24	2,0	16,0	1,0
175	KWT NURUL HIDAYAH	BASOKA	2013	SUBAIDAH	20	2,0	16,0	1,0
176	DUTA FAMILI	BASOKA	2011	MAHFUD REYADI	20	3,0	16,0	1,0
177	KWT PUTRI BAROKAH	BASOKA	2013	UMYATUN	20	2,0	17,0	1,0
178	PUTRA MANDALA	BASOKA	2007	SAMSURIYADI	24	3,0	16,0	1,0
179	AN-NUR	BASOKA	2012	ACH. ZAINI	20	2,5	14,0	1,0
180	AL - ICHLAS	BASOKA	2012	SAMSUL ARIFIN	20	2,5	14,0	1,0
181	KWT PUTRI KENDEDES	BASOKA	2012	SITI HOSNIYAH	20	3,0	16,0	1,5
182	BUDIMAN	BASOKA	2013	BUDIYANTO	20	2,0	16,0	1,5
183	BARU MAKMUR	BASOKA	2012	ACH. PUSAIRI	20	2,5	14,5	1,0
184	KWT NABILA	BASOKA	2012	NURHAYATI	20	2,0	13,5	1,0
185	KWT PUTRI MADURA	BASOKA	2011	NOR FAIZAH MS	20	1,0	14,0	1,5
186	KWT SUMBER BUNGA	BASOKA	2006	RISKIYAH	20	1,5	13,0	1,0
JUMLAH					475	52,4	360	26,4



**10. Desa Duko**

No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
187	ABADI	DUKO	2011	SUBAIRI	24	4,0	14,0	3,5
188	JAYA MUDA	DUKO	1999	ACH. JAILANI	20	2,0	17,0	3,0
189	KWT MELATI	DUKO	2012	SRI WAHYUNI	20	2,0	14,0	2,5
190	NETRAL	DUKO	2007	SAEDI	23	4,0	17,0	2,3
191	BAROKAH INDAH	DUKO	2007	ABD. HAMID	20	0,0	19,0	3,5
192	PANCORAN EMAS	DUKO	2013	QUSYAIRI	20	2,0	16,0	2,3
193	AL - FAIDAH	DUKO	2009	ABU FADLAL	23	4,0	18,5	2,0
194	KWT MOLYA UTAMA SAKINAH	DUKO	2007	ABBASIAH	20	0,0	14,0	1,0
JUMLAH					170	18	129,5	20,1


**11. Desa Kalebengan**


No	Nama Kelompok	Desa	Tahun Berdiri	Nama Ketua Pengurus	Jumlah Anggota	Luas Lahan (ha)		
						Sawah	Tegal	Pekarangan
195	KWT SRIKANDI	KALEBENGAN	2011	HOSNIYAH	22	3,0	14,0	2,5
196	BUNGA HARUM	KALEBENGAN	2007	SUDARMO	21	3,0	16,0	2,0
197	SUMBER ALAM	KALEBENGAN	2011	MOH. SALE	24	1,5	15,5	1,5
198	CAHAYA	KALEBENGAN	2009	KURDI	23	3,0	17,0	2,0
199	TAK KUSANGKA	KALEBENGAN	2011	ABD. RAHMAN	25	2,0	14,5	1,5
200	KARYA MAS	KALEBENGAN	2012	HATIM	20	2,5	22,5	3,3
JUMLAH					135	15	99,5	12,8

**Lampiran 2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)**

No	Rumusan Masalah	Sumber Data		Pertanyaan
		Data Primer	Data Sekunder	
1	<p>Bagaimanakah potensi dalam budidaya tanaman hortikultura di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?</p> <p>Dilihat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keanekaragaman Tanaman Hortikultura</li> <li>Lahan Pertanian</li> <li>Teknologi</li> <li>Tenaga Kerja</li> <li>Pasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep</li> <li>Pengurus Kecamatan Rubaru</li> <li>Kelompok Tani di Kecamatan Rubaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen mengenai hasil produksi tanaman hortikultura</li> <li>Dokumen berisi catatan luas lahan kecamatan Rubaru</li> <li>Dokumen mengenai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pertanian di Kecamatan Rubaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apa sajakah tanaman hortikultura yang dibudidayakan di Kecamatan Rubaru?</li> <li>Bagaimanakah lahan pertanian yang ada di Kecamatan Rubaru dalam budidaya tanaman?</li> <li>Apa saja teknologi yang digunakan untuk mendukung proses budidaya tanaman hortikultura di Kecamatan Rubaru? Seperti: -dalam pengelolaan sumberdaya air -alat dan mesin pertanian -teknologi pascapanen, -teknologi budidaya -teknologi pemasaran -teknologi pengolahan hasil pertanian -teknologi informasi</li> <li>Dalam proses budidaya tanaman hortikultura di Kecamatan Rubaru, berapa jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani yang ikut terlibat?</li> <li>Bagaimana para petani dalam melaksanakan pengembangan budidaya hortikultura?</li> <li>Apakah pasar yang ada mendukung terjadinya budidaya tanaman hortikultura?</li> <li>Bagaimana keadaan pasar dalam mendukung kegiatan budidaya hortikultura di Kecamatan Rubaru?</li> </ol>

2	<p>Bagaimana strategi pengembangan budidaya tanaman hortikultura di kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?</p> <p>Dilihat dari perspektif LERD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tata pemerintahan</li> <li>Proses manajemen</li> <li>Kelompok sasaran</li> <li>Faktor lokasi</li> <li>Kesinergian dan fokus kebijakan</li> <li>Pembangunan berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep</li> <li>Pengurus Kecamatan Rubaru</li> <li>Kelompok Tani di Kecamatan Rubaru</li> <li>Masyarakat Rubaru</li> </ol>	<p><b>a.Tata pemerintahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan mengembangkan budidaya tanaman hortikultura? Dilihat dari segi: <ul style="list-style-type: none"> <li>-pembangunan fisik</li> <li>-pembangunan SDM</li> <li>-koordinasi dalam pengelolaan SDA</li> <li>-kesesuaian dengan kebijakan atau program yang menjadi dasar atau yang mendukung</li> </ul> </li> </ol> <p><b>b.Proses Manajemen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tahap: <ol style="list-style-type: none"> <li>Input (awalan)</li> <li>Proses</li> <li>Output (hasil)</li> </ol> </li> <li>2. Apa saja yang disediakan pemerintah dalam menunjang terlaksananya pengembangan budidaya tanaman hortikultura?</li> </ol> <p><b>c.Kelompok sasaran</b></p> <p>Untuk Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. siapa saja yang aktor yang terkait dalam pengembangan budidaya tanaman hortikultura?</li> <li>2. Sejauh ini bagaimana peran dari masing-masing aktor dalam mengembangkan budidaya tanaman hortikultura?</li> </ol>
---	---	---	--

			<p>Untuk Kelompok Tani</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya apa saja yang telah dilakukan dalam mengembangkan budidaya tanaman hortikultura?</li> <li>2. Dalam pengembangan budidaya tanaman hortikultura, bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan kelompok tani?</li> </ol> <p><b>d. Faktor Lokasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa Rubaru dipilih sebagai kecamatan yang lebih dikembangkan pada budidaya tanaman hortikultura? Dilihat dari:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-sarana dan infrastruktur</li> <li>-potensi SDA</li> <li>-ketersediaan air bersih (irigasi)</li> <li>-tenaga kerja terampil</li> <li>-jumlah lembaga keuangan lokal</li> <li>-peluang kerjasama</li> <li>-terdapat lembaga penelitian</li> <li>-kualitas pemukiman lingkungan</li> <li>-pelayanan kesehatan</li> <li>-fasilitas sosial dan umum</li> <li>-etos kerja SDM</li> </ul> </li> </ol> <p><b>e. Kesinergian dan Fokus Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada kebijakan atau program khusus dalam mengembangkan budidaya tanaman hortikultura? Kesinergian dan fokus kebijakan melibatkan 3 unsur:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-perluasan ekonomi</li> <li>-pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas</li> <li>-pembagian wilayah</li> </ul> </li> </ol>
--	--	---	---

			<p>2. Apakah ada koordinasi dengan pihak swasta dalam mengembangkan budidaya tanaman hortikultura?</p> <p><b>f.Pembangunan Berkelanjutan</b></p> <p>1. Apakah pemerintah dalam mengembangkan budidaya tanaman hortikultura ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang melihat situasi dan kondisi di masa mendatang atau menghadapi permasalahan di masa mendatang? Dilihat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-keberlanjutan ekonomi</li> <li>-keberlanjutan sosial</li> <li>-keberlanjutan lingkungan</li> </ul>
--	--	---	---

**Lampiran 3. Bukti Penelitian (Peneliti pada saat Wawancara)**

a)



b)



Peneliti sedang melakukan wawancara

Gambar a) dengan salah satu petani (Bapak Wr) di Pasar Rubaru

Gambar b) dengan Bapak Sw selaku Kepala UPT. Pertanian Kecamatan Rubaru

## Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 – 662 128  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

Sumenep, 11 Maret 2016

Nomor : 072/ ~~151~~ /435.206/2016  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian/  
 Survey/Research

Kepada  
 Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
 Pembangunan Daerah Kab.  
 Sumenep;  
 2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman  
 Pangan Kab. Sumenep;  
 3. Sdr. Camat Rubaru Kab. Sumenep;  
 4. Sdr. UPT. Pertanian Tanaman Pangan  
 Kec. Rubaru Kab. Sumenep;  
 di -

**SUMENEP**

Berdasarkan surat dari Dekan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
 Malang :

Tanggal : 16 Februari 2016  
 Nomor : 2579 /UN.10.3/PG/2016

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **NOVITA ARIYANI**  
 N I M : 125030100111020  
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 16 RT : 004 RW : 006 Desa. Kalianget  
 Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/  
 Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : **STRATEGI PENGEMBANGAN BUDIDAYA TANAMAN  
 HORTIKULTURA BERBASIS LOCAL ECONOMIC RESOURCES  
 DEVELOPMENT (LERD)**

Peserta : -

Waktu : 11 Maret s/d 31 Mei 2016

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas  
 kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN SUMENEP



**MOCH. KAFRAWI S.Sos. M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19581215 198003 1 015

## Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Dekan fakultas Ilmu Administrasi  
 Universitas Brawijaya Malang;  
 2. Sdr. yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Novita Ariyani

TTL : Sumenep, 15 November 1993

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Administrasi

NIM : 125030100111020

Alamat Email : [ariyaninovita15@gmail.com](mailto:ariyaninovita15@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- 1) SD. Taman Muda 2000-2006
- 2) SMP Negeri 1 Kalianget 2006-2009
- 3) SMA Negeri 1 Sumenep 2009-2012